



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
SEKRETARIS JENDERAL DAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN
KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 10 Februari 2020
Waktu	: Pukul 11.00 WIB
Tempat	: Ruang rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Jl. Jend Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Acara	: Tindak Lanjut Raker Tanggal 18 November 2019, membahas: 1. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020; 2. Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020; dan 3. Lain-lain.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 32 dari 54 orang Anggota Komisi IV DPR RI dengan rincian: 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 8 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI 2. Drs. I Made Urip, M.Si. 3. Ono Surono, S.T. 4. H. Yadi Srimulyadi 5. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. 6. Vita Ervina, S.E., M.B.A. 7. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si. 8. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

- 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)**
5 Dari 8 orang Anggota
 1. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
 2. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
 3. Ir. Ichsan Firdaus
 4. Budhy Setiawan
 5. Alien Mus
- 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)**
4 dari 7 orang Anggota
 1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua
 2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
 3. Ir. Sumail Abdullah
 4. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 5. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.
- 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)**
4 dari 5 orang Anggota
 1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua
 2. H. Sulaeman L. Hamzah
 3. Sri Wulan, S.E.
 4. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
- 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**
3 dari 6 orang Anggota
 1. Daniel Johan/Wakil Ketua
 2. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A.
 3. Edward Tannur, S.H.
- 6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)**
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. H. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
 4. Muslim, S.HI., M.M.
- 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**
3 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet
 2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
 3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 4. H. Johan Rosihan, S.T.
- 8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)**
4 dari 4 orang Anggota
 1. Dr. H. Suhardi Duka, M.M.
 2. Dr. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Muslim, S.HI., M.M.
 4. Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
- 9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)**
1 dari 2 orang Anggota
 1. Ema Umiyyatul Chusnah
- 10. Sekretariat Jenderal**

B. Pemerintah

1. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian); dan
2. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
Beserta jajarannya.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

(Suara tidak terekam) ... dan HUT PDI-Perjuangan di sebelah. Saya jam 09.30 sudah ketemu Pak Sekjen tadi di ruangan. Jadi saya datang lebih awal.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

(Suara tidak terekam).

KETUA RAPAT:

Bukan disiplin Pak. Itulah wujud tanggung jawab Wakil Rakyat. Jangan datang 1 jam, hilang 3 jam. Tapi itu terjadi pada Anggota saya umumnya.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Eenggaklah. Kalau Pak Doktor kan hebat.

KETUA RAPAT:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat Sekretaris Jenderal dan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian beserta jajarannya,
Hadirin yang saya hormati.

Mengawali rapat hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat hari ini dalam keadaan sehat dan wal'afiat. Sesuai dengan jadwal rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan II, Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Bamus pada tanggal 16 Desember 2019, dan keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 15 Januari pada hari ini Senin, tanggal 10 Februari 2020 Komisi IV

menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Dengan Sekjen dan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian dalam rangka membahas Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 serta usulan. Saya tegaskan lagi, serta usulan perubahan pagu anggaran Tahun 2020, serta isu-isu yang terkini.

Bapak/Ibu yang saya muliakan,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini Rapat Dengar Pendapat Komisi IV telah dihadiri dan ditandatangani oleh 19 Anggota, 8 Fraksi. Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 246, Pasal 251 Ayat (1), Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rapat Dengar Pendapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Anggota setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Rapat Dengar Pendapat hari ini dimulai pada pukul 11.00 dan akan diakhiri pada pukul 14.00. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar rapat,
2. Penjelasan Sekjen dan Dirjen Hortikultura,
3. Tanggapan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
4. Jawaban Sekjen dan Dirjen Hortikultura,
5. Kesimpulan rapat,
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Dan terhubung belum mencapai kuorum dengan ini Rapat Dengar Pendapat saya skors 5 menit.

(SKORS SELAMA 5 MENIT)

Bapak/Ibu yang terhormat,

Rapat hari ini merupakan rangkaian dari Rapat Dengar Pendapat sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian pada tanggal 18 November 2019 yang lalu. Pada Rapat Kerja ini Komisi IV meminta kepada Kementerian Pertanian untuk menyiapkan rotmap kebijakan pengembangan seluruh subsector pertanian, termasuk hortikultura dan menerima usulan atas perubahan.

Oleh karena itu pada rapat hari ini Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan membahas lebih dalam mengenai rencana kerja anggaran 2020 senilai 1,86 Triliun dilingkup Sekjen dan 1,082 Triliun dilingkup Dirjen Hortikultura. Selain itu Komisi IV juga menerima usulan penambahan anggaran pada Sekjen Kementerian Pertanian sebesar 50 Miliar. Untuk itu kami meminta masing-masing Eselon I memberikan penjelasan yang mendetail mengenai rencana kerja anggaran maupun usulan perubahan Tahun 2020. Adapun mengenai program kegiatan yang diusulkan haruslah yang memberikan manfaat langsung kepada petani. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bukan. Saya tegaskan lagi, dan bukan untuk peningkatan orang per orang maupun golongan tertentu. Karena disini Saudara Sekjen, Saudara Dirjen ada 9 Fraksi. Ini saya tegaskan. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang mendapatkan perhatian dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terutama sekali sub sector hortikultura antara lain: mengenai fluktuasi, harga yang cenderung meningkat pada produk hortikultura. Salah satunya adalah komoditas bawang putih hingga penerapan kebijakan wajib tanam yang berdasarkan masukan dari pelaku usaha bawang putih pada Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 20 Januari yang lalu. Jadi Saudara Dirjen, tanggal 20 Januari kami memanggil semua stakeholder. Semua kami panggil, kami mintakan pendapatnya. Karena salah satu yang kami panggil itu nampaknya lebih pro kepada Saudara Dirjen Hortikultura dibandingkan pada pelaku pasar maupun petani. Komisi IV meminta Saudara Dirjen Hortikultura untuk memberikan penjelasan.

Bapak/Ibu yang terhormat,

Demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Sekjen dan Dirjen Hortikultura untuk menyampaikan penjelasan terkait hal tersebut diatas.

Saudara Sekjen silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismilahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI, beserta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat. Inshaa Allah dalam keadaan sehat wal'afiat.

Mengawali RDP pada hari ini perkenankan kami dari jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas undangan RDP hari

ini sebagai tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 18 November 2019 dengan agenda membahas Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020. Perubahan komposisi Tahun Anggaran 2020 serta dan lain-lain.

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Sebagai agenda pertama, perkenankan kami akan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020, penyusunan RKA Kementerian Pertanian Tahun 2020 ini mengacu pada sasaran umum, kebijakan pembangunan pertanian yaitu mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern. Untuk mencapai sasaran tersebut ada 4 aspek yang menjadi focus perhatian. Pertama adalah peningkatan produksi dan produktivitas melalui gerakan nasional peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian serta peningkatan kapasitas SDM pertanian. Kedua, menurunkan biaya pertanian menuju pertanian yang berbiaya rendah melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan kawasan berbasis korporasi. Ketiga, pengembangan dan penerapan mekanisasi serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. Dan keempat, ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan termasuk lahan rawan dan sub optimal lainnya serta penyediaan air seperti irigasi tersier, embung dan bangunan air lainnya.

Untuk mewujudkan sasaran umum diatas Bapak Menteri Pertanian telah menetapkan target peningkatan produksi komoditas utama sebanyak 7% per tahun, gerakan 3 kali ekspor hingga Tahun 2024, serapan kurs sector pertanian sebesar 50 Triliun per tahun, tumbuhnya usaha mikro, kecil dan menengah sebanyak 7.879 unit pada Tahun 2024 dan tumbuhnya petani milenial berjiwa entrepreneur 500.000 pemuda per tahun. Selain itu Bapak Menteri juga.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen,

Saya nanti setelah anda membacakan ini. Saya ingin penjelasan mendetail, apa yang dimaksud dengan petani milenial? Karena periode yang lalu pun sudah dicanangkan. Di periode yang lalu dicanangkan oh inilah petani milenial, bla-bla, ke laut semuanya. Jadi saya ingatkan, kita sebagai mitra jangan ulangi. Saya tegaskan jangan ulangi kegagalan yang lalu. Untuk apa? Untuk perbaikan Kementerian Pertanian. Apabila Kementerian Pertanian gagal berarti Komisi IV pun ikut gagal. Nanti setelah ini dijelaskan sejelas-jelasnya. Karena saya masih ingat, waktu itu pencaangan petani milenial diadakan di Lampung setelah Pak Amran Sulaeman meresmikan pabrik penampungan jagung di Lampung Selatan. Nanti tolong dijelaskan.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Baik.

Mohon ijin Pak Ketua. Saya lanjutkan bahwa selain itu Bapak Menteri juga telah menargetkan kontribusi sector pertanian dalam penurunan daerah rentan rawan pangan menjadi 10% pada Tahun 2024 serta penurunan stunting menjadi 14% pada Tahun 2024, antara lain melalui family farming, pertanian masuk sekolah dan kegiatan pertanian dengan Perguruan Tinggi. Implementasi dalam rangka melaksanakan target tersebut telah diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan utama oleh masing-masing Eselon I.

Dalam rangka melaksanakan program kegiatan utama untuk pencapaian target yang telah ditetapkan, Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi anggaran pada Tahun 2020 sebesar 21,05 Triliun. Besaran alokasi anggaran per 2020 tersebut lebih rendah 0,66 Triliun atau 3,04% dibandingkan alokasi anggaran 2019 sebesar 21,71 Triliun. Pagu anggaran Tahun 2020 telah dialokasikan pada 11 Eselon I lingkup Kementerian Pertanian guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Terkait dengan pelaksanaan anggaran Tahun 2020 dan mendasari pada kesimpulan dan keputusan Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI tanggal 18 November 2019 dimana kesimpulan atau keputusan hasil rapat, salah satunya adalah Komisi IV DPR RI menerima usulan atas perubahan komposisi pagu anggaran Tahun 2020 lingkup lingkungan Kementerian Pertanian yang dirinci sebagai berikut:

1. Untuk Badan Litbang Pertanian mengalami penambahan anggaran sebesar 100 Miliar sehingga menjadi sekitar 1,9 Triliun dari sebelumnya 1,8 Triliun. Penambahan anggaran tersebut diperuntukan bagi program perbenihan dan terobosan akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi.
2. Badan PPSDMP Pertanian mengalami peningkatan menjadi 2,04 Triliun dari sebelumnya sebesar 1,7 Triliun yang dipergunakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia pertanian melalui penguatan konstra tani berbasis informasi dan teknologi.
3. Badan Ketahanan Pangan mengalami penambahan sebesar.

KETUA RAPAT:

Saudara Sekjen,

Ijin teman-teman. Supaya mumpung masih baru dijelaskan. Apa yang dimaksud dengan konstra tani itu? Tolong dijelaskan. Karena teman-teman Anggota saja tanya saya. Apakah nanti penyuluh dikasih tongkat komando, dikasih baret atau apa. Supaya jelas ini. Ini mumpung. Teman-teman selalu komplainnya ke saya. Bertanya apa, saya bilang Alhamdulillah saya sendiri juga belum tahu. Tolong dijelaskan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Mohon ijin Pak Ketua.

Kontra tani secara sederhana sebetulnya lembaga dulu yang namanya Balai Penyuluhan Pertanian yang dilengkapi dengan instrument teknologi dan informasi. Sehingga selain sebagai tempat berkumpulnya para petani tetapi juga merupakan pusat kegiatan pembangunan pertanian ditingkat Kecamatan. Dan juga di kontra tani ini juga kedepan bisa menjadi pusat data yang diharapkan bisa terintegrasi dengan agriculture forum yang ada di Kementerian Pertanian yang sifatnya rill time. Jadi sederhananya seperti itu. Tetapi dengan kontra tani ini ada dikembangkan brigade-brigade, PT Brigade Tanam, Brigade Alsintan, sehingga pusat-pusat Kementerian Pertanian ini difokuskan di kontra tani. Sebenarnya BPP plus IT dengan gerakan-gerakan pemenuhan pertanian sehingga pemenuhan pertanian apabila ditingkat Kecamatan ini optimal asumsinya secara nasional juga bisa optimal Pak Ketua.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Andi.

Saya dulu jelaskan. Setahu saya yang nama Balai Penyuluh di Kecamatan dari jaman Orde Baru sampai terakhir tahun lalu, kenapa harus diubah namanya. Apa bedanya? BP3, BP4 kan tinggal ditambahkan saja. BP3 atau Balai Penyuluhan Komplit. Tidak perlu ganti-ganti nama lagi. Apa semua orang tahu. Ini loh yang menjadi pertanyaan.

Pak Momon ingat, Saudara dulu sebagai penyuluh. Setiap Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan, ada alatnya, ada komputernya, ada modemnya. Ada kan? Apa bedanya? Dan itu semua tidak dijaga dengan baik. Tinggal tingkatkan saja mutu SDM-nya, tanggungjawabnya. Kenapa harus ganti-ganti pakai kontra tani.

Kemudian Brigade. Sekarang Brigade di... tempat ada. Pak Momon tahu. Tanya Dirjen PSP kalau dia datang, tanya. Di setiap Provinsi ada brigade. Yang sekarang teman-teman pernah bertanya, kok di Kodim dikasih alat eksavator dan lain-lain. Kenapa tidak ditempatkan di brigade Kabupaten. Kalau peningkatan itu tidak perlu ganti nama. Tinggal SDM-nya saja ditingkatkan. Itu loh. Jangan membuat rakyat bingung.

Kemudian ada juga peningkatan bla-bla-bla. Kalau saya ditanya hal ini lebih spesifik. Saya sebagai Ketua Komisi IV lebih setuju tingkatkan SDM-nya dulu. SDM-nya kita tingkatkan dulu. Setelah SDM-nya tingkat baru pikirkan. Jangan main ganti nama, sementara SDM-nya masih yang seperti dulu. Bapak ingat berapa kali kita ke Lampung. Di kasih bantuan. Kalau tidak komputernya, ya CPU-nya yang lenyap. Ini kita tingkatkan dulu SDM-nya, baru kita pikirkan perubahan namanya. Tidak perlu pakai komando atau apa. Yang saya takutkan nanti seperti yang saya katakan tadi. Pakai baju loreng, pakai tongkat, pakai baret, kan lebih bingung lagi.

Silakan Pak Andi.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Jadi karena Ketua juga interupsi saya juga interupsi. Mengenai masalah Pak Sekjen ya. Saya sudah baca bahannya. Kemarin kan ada berita bahwa sudah di launching, sudah diresmikan mengenai masalah AWR (*Agriculture*).

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Mohon ijin soft launching Pak, belum *launching*. Baru *soft*.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Oh, makanya saya tanyakan interupsi Pak. Karena Bapak disini baru minta anggaran sementara Bapak sudah *soft launching* gitu loh. Nah pertanyaan kami, darimana itu anggarannya? Ini kan baru persetujuan Ketua. Baru pengajuan disini kan. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan seperti apa. Makanya saya belum masuk ke pertanyaan Pak baru interupsi. Nanti kita dalam pertanyaan.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Boleh nanti dijawabnya Pak Andi ya. Sekalian nanti sama yang tadi.

Silakan supaya cepat selesai. Untuk hal yang sangat vital, sangat penting yang kira-kira sangat penting boleh kita interupsi tapi lebih baik kita ada waktu sesi pertanyaan.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Terima kasih Pimpinan dan Anggota atas masukannya.

Mohon ijin kami lanjutkan.

Yang ketiga Badan Ketahanan Pangan. Ini mengalami penambahan 160 Miliar. Yang menjadi 823,56 Miliar dari sebelumnya sebesar 663,56 Miliar. Digunakan untuk program terobosan pengentasan daerah rentan pangan terutama melalui family farming. Dan yang keempat, Sekretariat Jenderal mengalami penambahan 50 Miliar yang digunakan untuk pengadaan infrastruktur penambahan agriculture forum.

Terkait dengan pendalaman perubahan komposisi pagu anggaran 2020. Kami laporkan bahwa Sekretaris Jenderal telah melakukan koordinasi dengan masing-masing Eselon I dalam penyiapan bahan RDP yang telah dijadwalkan selama 3 hari dimulai pada pagi hari ini. Ijinkanlah pada saatnya nanti para Eselon I untuk dapat memaparkan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 kepada Bapak Ketua dan Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV yang terhormat sesuai jadwal yang telah kami terima dari Sekretariat Komisi IV DPR RI.

Bapak Ketua, para Wakil ketua dan Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Sebagai agenda kedua, ijinkan kami melaporkan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 beserta rencana perubahan komposisi pagu anggaran Tahun Anggaran 2020 lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Sekjen Kementan pada Tahun 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar 1,8 Triliun dimana dari alokasi tersebut sebagian besar dialokasikan dalam bentuk belanja mengikat yang diperuntukan:

1. Belanja pegawai sebesar 1,32 Triliun. Dialokasikan untuk tunjangan kinerja ASN seluruh Kementerian Pertanian sebanyak 17.950 orang. Ini nilainya sebesar 1,22 Triliun Rupiah. Dan gaji beserta tunjangan ASN lingkup Sekjen sebesar 94,94 Miliar.
2. Belanja operasional sebesar 86,41 Miliar untuk operasional pemeliharaan dan perawatan fasilitas kantor, seperti gedung, listrik, telepon dan lain-lain selama 1 tahun, honor dan gaji security teknisi, dan honorarium satuan kerja, belanja sewa kendaraan, mesin fotocopy dan lainnya, serta alat tulis kantor atau bahan operasional kantor pada 11 Biro dan Pusat. Selanjutnya alokasi anggaran Tahun 2020 lingkup Sekjen dialokasikan pula untuk belanja modal. Ini 84,65 Miliar dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penguatan dan peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi Kementan. Ini di Pusdatin.
 - b. Pelaksanaan pembangunan renovasi, baik gedung A, gedung pustaka di Bogor, dan juga Balai Uji Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian di Mojokerto, dan serta pengadaan alat dan mesin perkantoran.

Selanjutnya sisa anggaran Tahun 2020 lingkup Sekjen sebesar 370,4 Miliar, ini dialokasikan melalui belanja non operasional yang diperuntukan mendukung kegiatan prioritas di 11 Eselon II lingkup Sekjen, baik Biro maupun Pusat.

1. Biro Perencanaan. Dengan kegiatan koordinasi penyusunan rencana kebijakan program dan anggaran, pemantauan evaluasi dan pelaporan. Ini 35,4 Miliar.
2. Biro Organisasi dan Kepegawaian. Dengan kegiatan pengelolaan manajemen SDM, organisasi dan reformasi birokrasi sebesar 19,04 Miliar.

3. Biro Keuangan dan Perlengkapan kegiatan pengelolaan keuangan dan manajemen, BMN, Kementan. Ini 29,2 Miliar.
4. Biro Hukum, kegiatan review, kajian, rumusan, dan penerbitan peraturan perundang-undangan, atau pertanian sebesar 11,19 Miliar.
5. Biro Umum dan Pengadaan kegiatan layanan umum. Layanan kerumahtanggaan dan layanan pengadaan barang dan jasa. Ini sebesar 109 Miliar.
6. Biro Kerjasama Luar Negeri, kegiatan MoU, kerjasama Bilateral, Multilateral, promosi bidang pertanian, sebesar 20,78 Miliar.
7. Biro Humas dan Informasi Publik, kegiatan pengelolaan Humas dan penyebaran informasi pertanian sebesar 53,97 Miliar.
8. Pusat data dan sistem pertanian, kegiatan pengembangan data dan informasi sebesar 39,87 Miliar.
9. Pusat sosal ekonomi dan kebijakan pertanian. Ini berkantor di Bogor. Kegiatan kebijakan sosek dan pembangunan pertanian. Ini 17,03 Miliar.
10. Pusat perpustakaan penyebaran teknologi pertanian juga di Bogor. Sebesar 9,29 Miliar.
11. Pusat Perlindungan Varietas tanaman dan perijinan pertanian. Ini sebesar 25,16 Miliar.

Rincian anggaran Tahun 2020 untuk seluruh Biro atau Pusat Lingkup Sekjen kami sajikan pada bahan RDP yang telah disampaikan kepada Bapak Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV melalui Sekretariat Komisi IV DPR RI beberapa hari sebelumnya.

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Sebagai agenda terakhir kami laporkan tentang usulan perubahan komposisi anggaran Tahun 2020 lingkup Sekjen yang diusulkan mendapat tambahan realokasi sebesar 50 Miliar. Alokasi anggaran tersebut diperuntukan bagi pengembangan agriculture forum oleh Bapak Menteri Pertanian. Dimana tadi saya sampaikan soft launchingnya, ini telah dilakukan pada tanggal 4 Februari 2020.

Rincian distribusi penambahan anggaran tersebut adalah fasilitasi tenaga ahli pendampingan AWR 15,50 Miliar, pengadaan infastruktur AWR sebesar 40,50 Miliar, fasilitasi operasional dan koordinasi AWR 6 Miliar, koordinasi kelembagaan dan kebijakan pengembangan AWR sebesar 7,5 Miliar dan koordinasi penyebaran teknologi, informasi dan publikasi data pertanian serta peningkatan daya saing pertanian sebesar 6,5 Miliar.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat hari ini.

Atas perhatian Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Mohon ijin kalau diperkenankan lanjut ke Dirjen Hortikultura.

KETUA RAPAT:

Kalau kita lihat kesekjenan ini biayanya diluar gaji pegawai. Non operasional, belanja modal dan biaya operasional kurang lebih hampir 200 Miliar lebih. Kami di Komisi IV selama setahun uang Reses, uang makan, uang sidang, uang lain-lain, itu hanya 10%-nya dari situ. Termasuk itu uang Kunjungan ke Luar Negeri kalau ada. Jadi saya minta usulannya secara detail. Sebelum Rapat Kerja harus diserahkan. Masalah setuju tidak setuju nanti kita mintakan pendapat seluruh Anggota Komisi IV.

Silakan Saudara Dirjen Hortikultura untuk menjelaskan.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik.

Bismilahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Bapak Pimpinan, dan seluruh Anggota Komisi IV yang kami banggakan.

Kami langsung saja kepada slide tayangan terkait dengan rencana kerja dan komposisi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020.

Jadi demikian Pak Ketua, Bapak/Ibu Anggota Komisi IV.

Jadi untuk kegiatan hortikultura untuk kawasan mangga. Total anggarannya mohon maaf. Total anggaran 1,082 Triliun. Dengan alokasi yang kita, untuk kawasan mangga ada 1385 hektar dengan nilai 12,6 Triliun. Kawasan manggis 1500 hektar dengan nilai 16,8 Miliar, kawasan pisang 1500 hektar dengan nilai 35 Miliar, kawasan durian ada 1800 hektar dengan nilai 14,4 Miliar, kawasan buah lainnya ada 1451 hektar dengan nilai 20,9 Miliar, kawasan jeruk 500 hektar, kawasan hortikultura 225.000 meter persegi, dengan nilai 35 Miliar. Dan untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman seluas 14.635 hektar dengan nilai 60 Miliar. Untuk penanganan dampak perubahan iklim seluas 75 hektar, dengan nilai 21,8 Miliar, penerapan THT untuk 180 kelompok, sarana perlindungan hortikultura ada 250 unit senilai 4,3 Miliar, untuk sertifikasi benih ada 4000 unit senilai 25 Miliar, dan sarana-prasarana benih untuk 27 unit, ini ada 5,3 Miliar. Untuk benih batang, untuk batang bawah untuk mangga, durian, lengkeng, dan cabe. Ini untuk 3.786.000 batang senilai 30 Miliar.

Nah untuk yang besar untuk kawasan cabe ada 13.328 hektar, untuk kawasan bawang merah ada 5704 hektar dan kawasan bawang putih ada 5453 hektar dengan nilai 220 Miliar, kawasan tanaman obat ada 700 hektar,

untuk kawasan sayuran daun 610 hektar, kawasan sayuran lainnya 250 hektar. Dan ini untuk penerapan *good agriculture practice*, karena kita akan mendorong untuk ekspor komoditas hortikultura dimana salah satunya adalah persyaratan *good agriculture practice* kita alokasikan 125 kelompok senilai 5,8 Miliar. Untuk *good agriculture practice*. Untuk kegiatan buah-buahan dan hortikultura.

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Tolong kalau disingkat dibuat artinya. Sekarang coba tanya Anggota Komisi IV, tahu tidak DPI 75 juta hektar 21 Miliar. Apa DPI? Pak Momon tahu?

Pak Momon?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Tahu tidak DPI?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

... (Suara rekaman terputus). Jadi singkatannya untuk OPT yang pertama Organisme Pengganggu Tanaman. Ini senilai 14.635 hektar dengan anggaran 60 Miliar. DPI untuk sarana Dampak Perubahan Iklim kaitannya dengan kekeringan ini banyak ke bantuan sarana dan prasarannya. Ini senilai 75 hektar dengan nilai 21,8 Miliar. Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) ini 180 kelompok PHT.

Selanjutnya penerapan *good agriculture practice* yang disini Pak Ketua dan seluruh Anggota yang terhormat. Ini *good agriculture practice*. Jadi ini salah satu persyaratan yang diminta kalau kita mendorong untuk ekspor adalah sertifikasi *good agriculture practice* yang dipersyaratkan oleh negara-negara yang menerima barang dari Indonesia. Dan ini kita dorong untuk ada 125 kelompok untuk mendapatkan sertifikat tersebut untuk *good agriculture practice buffalo*. *Bufflo* maksudnya buah-buahan dan floricultura. Jadi untuk kegiatan buah-buahan dan floricultura. Kalau *good agriculture STO* ini maksudnya sayuran dan tanaman obat. Jadi untuk kegiatan sayuran dan tanaman obat ini ada 25 kelompok dengan nilai 1,02 Miliar. Untuk penerapan

good handling practice, karena ini juga penting Bapak Ketua dan Anggota Komisi IV. Bahwa salah satu persyaratan untuk kita bisa mengekspor komunitas hortikultura adalah penerapan handling practice yang baik. Nah ini kita dorong untuk good handling practicenya ini ada 50 kelompok yang kita dorong.

Nah selanjutnya ada juga untuk sertifikasi organic. Jadi ini total untuk sertifikasi GAP, GHP dan organic totalnya ada 350. Artinya untuk organiknya kita alokasikan untuk 225 kelompok atau 225 unit.

Nah registrasi lahan. Ini juga penting karena dari pihak negara-negara yang akan menerima barang dari kita ya khususnya komunitas hortikultura, apakah lahannya teregistrasi atau tidak. Dan ini ngelink disistem registasi yang ada di Internasional seperti global good agriculture practice. Ini kita alokasikan. Untuk registrasinya ini ada 2100 unit. Registasi yang akan kita alokasikan di Tahun 2020. Untuk sarana nilai tambah ada 264 unit senilai 21 Miliar. Untuk parasarana nilai tambahnya ada 52 unit dan dukungan manajemen ini mulai dari gaji, dan operasional lainnya di Direktorat Jenderal Hortikultura ini senilai 233,3 Miliar. Sehingga total anggaran di Direktorat Jenderal Hortikultura 1,082 Miliar.

Kami lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi kami mengemasnya, mohon ijin Pak Ketua, Bapak/Ibu Anggota Komisi IV yang kami hormati. Kami membuat program yang namanya "gedor horti", gerakan mendorong produksi daya saing dan ramah lingkungan horti. Nah untuk produksi kita targetkan untuk Tahun 2020 karena hortikultura prioritas nasionalnya dari 2 komoditas yaitu bawang dan cabe lanjut. Nah kita targetkan untuk cabe ada peningkatan 7% produksi cabe besar dan cabe rawit, juga bawang merah demikian. Ini alokasi peningkatannya. Saat ini untuk cabe besar ada 1,27 juta ton. Kita mentargetkan Tahun 2020 menjadi 1,35 juta ton. Untuk cabe rawit ada 1,37 juta ton. Kita targetkan menjadi 1,47 di Tahun 2020. Demikian juga untuk bawang merah.

Ini untuk target produksi cabe Tahun 2020. Kita alokasikan ada di 33 Provinsi, 225 Kabupaten untuk cabe besar dengan target produksi 1,2 juta ton menjadi 1,35 juta ton dengan langkah operasional. Kira-kira demikian kita memfasilitasi dari APBN, kita melakukan optimasi penggunaan kredit usaha rakyat karena dialokasikan untuk kredit usaha rakyat, ... hortikultura ada 63,69 Triliun, terus penyediaan benih unggul, penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan, dukungan pengairan dan alat mesin pertanian serta penyediaan informasi iklim dan penguatan sumber daya manusia melalui kostra tani.

Untuk bawang merah kita targetkan produksi 1,5 juta ton menjadi 1,625 juta ton dengan langkah operasionalnya menggunakan fasilitas APBN untuk pengembangan kawasan seperti yang tadi kami sebutkan diawal, terus optimasi KUR, penyediaan benih unggul, dukungan pengairan dan Alsin, penyediaan informasi iklim serta penguatan sumber daya manusia melalui kostra tani.

Untuk kredit usaha rakyat dalam rangka gedor horti kita fokuskan untuk kegiatan hortikultura yang bersifat on farm itu untuk usaha peralatan dan mesin, usaha budidaya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Interupsi Ketua sebentar.

Pak Dirjen,

Saya mau tanya sedikit saja karena tadi kan target produksi hanya untuk cabe merah, cabe besar, bawang merah. Sedangkan dialokasi anggaran itu ada kawasan bawang putih, tanaman obat, kawasan mangga, manggis. Itu target produksinya tidak ada datanya Pak?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Kita memang di Bapenas untuk prioritas nasional untuk hortikultura adalah bawang dan cabe Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Maksud saya adalah ini kan mangga, manggis ini dan kemudian aneka tanaman obat. Itu kan pasti kita kasih anggaran tapi target produksinya kita harus tahu Pak. Bahwa itu target nasional saya sepakat. Tapi ini kan ada alokasi anggaran 1,082. Itu target produksinya bukan hanya cabe merah cabe besar, tapi hal yang lain. Boleh tidak ditampilkan Pak, biar kami tahu bahwa sebenarnya target produksi itu berapa, seperti apa.

Terima kasih Pimpinan.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bisa dijelaskan Pak Dirjen.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik.

Terima kasih Pak.

Nanti untuk informasi tersebut bisa kami tambahkan Pak, berapa sih produksi di Tahun 2019 untuk komoditas yang tadi disebutkan. Terus target kita di Tahun 2020 berapa. Hanya memang untuk peningkatan produksi yang 7% itu memang yang ditargetkan karena hortikultura untuk prioritas nasional itu adalah bawang dan cabe, kita memasukan itu yang didata ini Pak. Tapi

untuk berapa produksinya di Tahun 2019 dan berapa target kita untuk Tahun 2020 nanti kami siapkan data dan informasinya Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Boleh disiapkan setelah tanya-jawab Pak?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik Pak.

Kami lanjutkan.

Jadi untuk hortikultura ini ada alokasi kredit usaha rakyat senilai 6,39 Triliun. Dengan kegiatan usaha horti yang kita fokuskan untuk mendapatkan KUR adalah usaha peralatan dan mesin, usaha budidaya, usaha perbenihan, usaha saprotan, usaha lanskab, dan yang on farmnya adalah usaha pasca panen, usaha pengolahan dan usaha pemasaran.

Mohon ijin kami menyampaikan terkait dengan agriculture war room tadi menambahkan. Untuk hortikultura. Jadi agriculturenya kita fokuskan untuk informasinya nanti bisa langsung dilihat melalui agriculture war room. Salah satunya adalah early warning system untuk cabe dan bawang. Jadi kita punya yang namanya early warning system untuk memprediksi kira-kira bawang dan cabe di 2-3 bulan kedepan akan bermasalah tidak, akan menimbulkan inflasi atau tidak. Ini sudah mulai kita terapkan.

Terus untuk CPCL dan off taker KUR horti juga data-datanya semua nanti akan masuk kesini. Terus data produksi dan musim panen. Ini salah satunya juga untuk buah-buahan. Itu juga masuk didalam AWR ini. Terus informasi ketersediaan dan produsen benih hortikultura. Data ekspor-impor hortikultura. Data wajib tanam bawang putih juga nanti masuk didalam AWR ini. Jadi dimana lokasinya, berapa luasannya, ini nanti masuk didalam AWR ini. Data organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim. Ini juga masuk disini. Terus informasi data komoditas hortikultura ini juga masuk disini. Realisasi program bantuan didalam APBN masuk juga didalam AWR hortikultura. Calon petani, calon alokasi penerima APBN hortikultura nanti masuk. Jadi semuanya masuk dalam sistem database.

WAKIL KETUA KOMISI IV/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Dirjen, boleh dijelaskan. Ini AWR (Agriculture War Room) ini data inputnya seperti apa? Darimana?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Inputnya dari BPS, terus data SPH kita statistic pertanian hortikultura mulai dari level Kecamatan, sampai level Provinsi dan level nasional. Gabung jadi satu data.

KETUA RAPAT:

Bapak.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya ingatkan Anggota. Kalau Pimpinan lagi bicara jangan diinterupsi dulu. Ya? Setelah diberikan ijin oleh Pimpinan baru boleh ngomong. Kita pakai Tatib.

Terima kasih.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Jadi boleh tidak?

Oke.

Jadi saya dari itu Bapak bicara data kayaknya sempurna sekali. Sedangkan seingat saya dari rapat pertama kita disini belum ada data yang diberikan kepada kami sampai hari ini. Jadi data yang mana yang mau Bapak sampaikan disini.

Terima kasih Pimpinan.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Mohon ijin Bapak Pimpinan kami jelaskan.

KETUA RAPAT:

Sorry. Jadi nanti saja dijawabnya sekalian supaya jelas.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik.

Mohon ijin kami lanjutkan Bapak Pimpinan,

Lanjut. Gerakan mendorong untuk daya saing hortikultura. Jadi apakah yang dimaksud dengan mendorong daya saing. Jadi kami sebutnya sebagai "Gedorong" gerakan mendorong daya saing hortikultura. Tadi diawal kami sebutkan bahwa ada sertifikasi good agriculture practice yang dipersyaratkan kalau kita ingin ekspor komoditas hortikultura. Nah ini Tahun 2019 ada 1352 unit yang sudah mendapatkan *good agriculture practice*. Di Tahun 2020 kita alokasikan 310 unit.

Untuk sertifikasi *good handling practice*. Tahun 2019 ada 50 unit. Kita targetkan di Tahun 2020 kita nambah 40 unit. Terus untuk registrasi kebun. Tahun 2019 ada 1917 kebun atau lahan usaha yang disertifikasi. Kita targetkan 2020 ada 2000, ada tambahan lagi kurang lebih nantinya totalnya 4000 kebun yang diregistrasi. Jadi kalau nanti untuk ekspor atau apa. Jadi pihak buyer dari Luar Negeri juga bisa melihat, apakah lahan-lahan ini sudah teregistrasi untuk siap ekspor jadi kita akan registrasi disini.

Nah untuk kegiatan kawasan berdaya saing yang kami ingin sampaikan Pak Ketua. Jadi fokus kami adalah, kita targetnya adalah petani-petani kecil yang memiliki luas lahan sempit. Nah kalau mereka bersatu, berkelompok menjadi satu kesatuan. Sebagai contoh ini kami ada foto. Kami melihat di Kabupaten Kuningan, ini pohon durian hanya berdekatan dengan rumah tapi buahnya bagus. Nah kalau lahan-lahan seperti ini, petani-petani kecil ini berkelompok jadi satu. Kita kembangkan kawasan misalnya durian 50 hektar di satu Kecamatan dan ini langsung kelihatan. Dan 1 kecamatan tersebut dalam 4-5 tahun kedepan menjadi 1 kawasan durian unggul dan masyarakat akan datang kesana untuk membeli duriannya. Dan kalau untuk kita ekspor juga lebih mudah untuk controlling. Jadi kita asumsikan demikian Pak Ketua. Jadi ini kecil-kecil luas area lahannya. Tapi kalau ini berkelompok ini menjadi satu kekuatan. Ibarat ada sapu lidi. Kalau ada 1 sapu lidi itu dia mudah patah, tapi kalau gabung dia menjadi satu kekuatan yang besar.

Nah untuk gerakan mendorong horti yang kaitannya dengan ramah lingkungan. Jadi kita fokuskan. Ini sebagai contoh saja Pak Ketua kaitannya dengan dampak perubahan iklim. Jadi kami menghitung karbon stok untuk durian, mangga dan manggis. Karena sekarang kan sedang gencar-gencarnya terkait dengan dampak perubahan iklim. Ternyata dari 3 pohon ini saja, ini bisa menyerap karbon itu sebesar 12,3 juta ton per tahun atau setara dengan penurunan reduksi dari emisi ke karbon dari 13,5 juga kendaraan. Ini dari 3 pohon saja yang data-datanya sudah kita identifikasi melalui data di BPS. Untuk durian ada jumlah pohonnya ada 7,7 juta, untuk manggis ada 2,3 juta, untuk mangga ada 20 juta pohon dan kita hitung karbon stoknya berapa dan setara dengan bisa mereduksi emisi dari 13,5 juta kendaraan bermotor. Kalau kita hitung dari komoditas lainnya itu akan lebih besar lagi.

Nah untuk kegiatan sub sector hortikultura yang dapat menurunkan emisi, gas rumah kaca. Salah satunya adalah dengan penerapan pemupukan dengan ... placement pengembalian bahan organik tanah, penanaman buah tahunan dan pemasangan biopori.

Ini budidaya ramah lingkungan yang sekarang kita dorong yaitu pengelolaan hama terpadu, terus pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) yang ramah lingkungan, teknologi hemat air, pertanian organik, dan penanaman ..., atau tanaman-tanaman border yang bisa menjadi rangkap untuk hama dan penyakit tanaman.

Lanjut. Nah untuk rencana ekspor kita Tahun 2020 ada sekitar 23 Triliun yang kita alokasikan.

Saya kira untuk hortikultura.

KETUA RAPAT:

Saya ingin bertanya dulu. Ekspor ini termasuk yang selama ini Saudara Menteri lakukan. Contoh, ke GGPC ekspor, tanpa Menteri pun dia tetap ekspor. GGPC itu sudah hampir 25 tahun, 30 tahun. Mohon maaf, jangan mengadakan acara-acara yang dibuat-buat. Ekspor tepung kelapa, tanpa Menteri pun tetap ekspor. Ekspor manggis dari Bali. Saya yang melobi China. Saya yang datang ke Beijing dengan ongkos sendiri untuk membuka ekspor pasar manggis. Waktu itu didampingi dengan Ibu Banun. Pakai ongkos sendiri, hotel sendiri. Jadi tidak usahlah di upacara. Eselon I ini seolah-olah Menteri ini wah begini, tidak usah. Yang dipikirkan peningkatan produksi. Itu yang lebih penting. Ekspor manggis. Saya sampai ditanya oleh Pejabat di Bali. Kok ekspor manggis pakai diacarakan. Tidak pakai di acarakan juga tetap ekspor Pak. tolong, jangan membuat Menteri tersanjung tetapi tidak diikuti dengan peningkatan produksi. Kita harus ingat 2020 ini terjadi elnino yang lebih dahsyat daripada 2019. Saya ingatkan saja sekali ini.

Terima kasih.

Lanjutkan.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik.

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak/Ibu Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Selanjutnya kami ingin sekilas sesuai dengan apa yang Pak Ketua sampaikan mengenai bawang putih Pak mohon ijin kalau kami boleh menyampaikan.

Buka slide tentang bawang putih. Jadi ini Pak Ketua. Jadi data-data ini sudah kami klarifikasi juga dengan kegiatan importasi bawang putih di Tahun 2019. Kita perkiraan produksi nasional itu adalah kurang lebih. Ini data-datanya Pak untuk produksi nasional. Perkiraan kebutuhannya kurang lebih sekitar 47.000 ton per bulan. Jadi sehingga neracanya itu kalau dilihat disini memang masih kurang. Tapi kita masih punya stok berdasarkan realisasi impor di Tahun 2019. Ada 106.000 ton.

KETUA RAPAT:

Interupsi atau nanya?

Silakan Pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua,

Ini data yang disajikan oleh Dirjen tidak terdapat dalam dokumen kami. Jadi kami agak susah mengikuti jalan dan alur ceritanya ini Pak Ketua.

Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya lanjutkan.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik.

Jadi ini kondisinya bawang putih sehingga kita sebetulnya di bulan Januari masih ada. Untuk bulan Februari masih ada stok untuk bulan Maret. Ini masih cukup untuk bulan Maret paling tidak sampai pertengahan Maret itu masih cukup. Nah kami sudah membuka RIPH di hari Jumat kemarin itu untuk kurang lebih seratus tiga ribu ton Pak Ketua. Jadi sudah seratus tiga ribu ton kita buka untuk Tahun 2020.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, bisa interupsi sebentar Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Data ini sumbernya dari mana ya Pak? Data ketersediaan bawang putih, perkiraan kebutuhan itu dari Kementerian Pertanian atau.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Kalau untuk kita produksi ini dari angka BPS. Untuk perkiraan kebutuhan kita sudah membuat asumsi-asumsi kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Oh jadi data produksi ini berdasarkan data dari BPS nih Pak.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Iya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Perkiraan kebutuhan dari?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Perkiraan kebutuhan dari Kementan. Kita membuat analisis.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Realisasi impor ini data darimana?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Realisasi dari Kemendag. Ini dari Kementerian Perdagangan.

Mohon ijin Pak Ketua. Boleh kami lanjutkan?

Lanjut. Saya kira kita masuk. Untuk pengembangan bawang putih nasional. Pak Ketua mohon ijin. Jadi ini informasi luas tanam ini sudah berdasarkan data BPS. Jadi luas tanam di Tahun 2016 itu ada 2866 hektar. 2017 ada.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen,

Kenapa ini tidak dicantumkan?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Kami didalam ini. Ya karena didalam undangannya untuk rencana anggaran Pak. Tapi memang kami mempersiapkan untuk bawang putih.

KETUA RAPAT:

Ya tolong dikasih dulu. Disiapkan dulu sekarang sebelum Anggota bertanya.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik.

KETUA RAPAT:

Di copykan.

Di undangan dituliskan anggaran dan lain-lain. Termasuk isu-isu yang sedang berkembang.

Lanjutkan. Sambil nunggu di fotocopy dibagikan ke Anggota.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik Pak.

Jadi ini luas panen pada Tahun 2019 ada 12.000 hektar dengan produksi 87.000 ton, produktivitas 7,29. Untuk APBN ada 8420 hektar. Untuk wajib tanam yang sudah berjalan untuk Tahun 2019 ada 1228 hektar. Jadi ini kira-kira gambarannya Pak.

Lanjut. Untuk pengembangan kawasan bawang putih.

Ini untuk pengembangan kawasan bawang putih. Ini untuk APBN Tahun 2020.

KETUA RAPAT:

Saya minta slide sebelumnya dulu. Sebentar. Saya mau lihat dulu.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Slide sebelumnya.

Baik. Nanti kami copykan semuanya Pak.

Lanjut. Jadi untuk kawasan ini di Aceh kita alokasikan. Aceh 100 hektar untuk APBN 2020. Untuk Sumatera Utara ada 505 hektar, untuk Sumatera Barat ada 150 hektar, Jambi 70 hektar, Bengkulu 225 hektar, Sumsel ada 50 hektar, Lampung ada 80 hektar, Jawa Barat ada 185 hektar, Jawa Tengah ada 1581 hektar, Jawa Timur ada 639 hektar, Bali ada 195 hektar, Nusa Tenggara Barat ada 811 hektar, Nusa Tenggara Timur ada 50 hektar, Sulawesi Selatan 350 hektar, Sulawesi Tengah ada 200 hektar, dan Sulawesi Utara ada 170 hektar. Total bawang putih ada 5453 hektar dengan total anggaran 220 Miliar. Jadi kita fokuskan untuk 220 Miliar itu benih yang bersertifikat untuk pengendali organisme pengganggu tanaman ramah lingkungan. RAMLI ini Ramah Lingkungan Pak Ketua. Jadi termasuk mulsa plastic didalamnya.

Lanjut. Nah ini benih-benih yang direkomendasikan untuk ditanam benih local yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian. Ini ada 5 varietas Pak Ketua. Ada lumbu hijau, lumbu kuning, tawangmangu baru, sangga sembalun dan lumbu putih. Ini adalah varietas-varietas bawang putih yang dilepas oleh Kementerian Pertanian. Terakhir kita melepas varietas bawang putih pada Tahun 1995 Pak Ketua.

Lanjut. Jadi ini adalah foto-foto petani yang sukses menanam bawang putih di beberapa daerah sentra. Ada di Tawangmangu, ada di Nusa Tenggara Barat, ada di Temanggung, ada di Wonosobo, ada di Karanganyar, ada di

Tegal dan di Bima. Ini bawang putih-bawang putih yang kita lihat di lapangan dan sudah mulai berhasil penanamannya.

Lanjut. Mungkin terkait dengan RIPH. Ini untuk Tahun.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen,

1 hektar bawang putih tanam di Indonesia menghasilkan berapa ton?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Angka di BPS tadi ada rata-rata. Rata-rata dari Tahun 2016, 2018, 2019, itu rata-rata 8 ton per hektar per produktivitasnya Pak.

KETUA RAPAT:

Saya minta tolong kepada para Anggota sesuai dengan Dapilnya. Tolong dicek. Tolong nanti dicek.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI :

(suara tidak terekam).

KETUA RAPAT:

Ya berarti tempat Bapak hebat sekali.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Mohon ijin boleh dilanjutkan Pak Ketua.

Tahun 2017 ada 81 importir. 2018 ada 85 importir, Tahun 2019 ada 75 importir. RIPH yang kami terbitkan 2017 1 Juta, 2019 946.000 ton, 2019 760.000 ton. Total target produksi 5% berdasarkan ini adalah sekian ton.

KETUA RAPAT:

Saya mencermati dulu.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik.

KETUA RAPAT:

Kebutuhan bawang putih di Republik Indonesia berapa per tahun?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Kebutuhan bawang putih antar 560 sampai 580.000 ton Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Setahu saya BPS tidak mengatakan itu. BPS mengatakan kebutuhannya 485.000, paling tinggi 500.000. Kalau kita lihat 2017, 2018, 2019. Kalau di negara kita bisa tanam. Ini kan gila RIPH dikeluarkan 1 Juta ton. Coba lihat. Kebutuhannya 485 sampai 500. Terus dikeluarkan 1 juta ton. Itu bukan jaman anda. Anda tenang saja. 2018 dikeluarkan lagi 946.000. 2019 dikeluarkan 760.000. Kenapa tidak dikeluarkan sesuai kebutuhan saja, misalnya 500.000 kan sudah cukup. Dipotong tadi anda bilang produksi dalam negeri bla-bla-bla ya kurang lebih 5% sampai 10% dipenuhi oleh kebutuhan dalam negeri.

Saya ingin tahu, apakah “dikeluarkan 1 juta, 946.000, 760.000 ini ada apa-apanya? Kok tiba-tiba 1 juta, 1 juta. Untung ada Kementerian Perdagangan yang menjaga SPI-nya. Tolong dijawab dulu.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik.

Mohon ijin Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Saya boleh tambahkan Ketua, kalau ditanya dijawab.

KETUA RAPAT:

Ya ini bukan jamannya Beliau. Beliau belum salah.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Boleh tanya sebentar Pak?

Itu kan ada wajib tanam ya Pak. Saya khawatir nanti ada tumpang tindih antara APBN dan wajib tanam. Boleh tidak ditampilkan Pak. kita minta data dari 38 perusahaan yang tidak selesai, 32 perusahaan itu sesungguhnya mereka itu mengajukan wajib tanamnya dimana Pak? Daerah mana gitu maksud saya? Sehingga kita bisa bandingkan. Jangan-jangan nanti yang dibiayai APBN itu diklaim sebagai tempat untuk wajib tanam Pak. Nah maksud saya coba saya minta datanya Pak. Nanti pada saat kita tanya-jawab kita bisa dapat datanya sebelum tanya-jawab. Begitu Pak Ketua. Mohon ijin Pak Ketua.

F- PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ketua, ini usul saja Ketua.

KETUA RAPAT:

Usul sama ngomong sama Pak.
Silakan Pak.

F- PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Jadi begini Pak Ketua. Supaya rapat kita ini teratur, tertib, mungkin kita dengarkan dulu penjelasan dari 2 Dirjen ini baru kita nanti akan bertanya dan mengomentari. Kalau perlu tengah malam kita rapat Ketua. Yang penting tuntas masalah 2 Eselon I di Kementerian Pertanian ini. Ini usulan Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke. Saya setuju usulan Pak Andi.

Jadi Pak Ichsan nanti dengarkan dulu penjelasannya secara detail termasuk Anggota. Alhamdulillah hari ini Pak Haerudin tidak datang. Kalau datang lebih ribet lagi kita.

Lanjutkan.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik.

Mohon ijin Ketua.

Kami menjawab dulu. Jadi sesuai peraturan Pak Ketua. Jadi Kementerian Pertanian itu hanya mengatur apakah bawang putih yang akan masuk ke Indonesia itu aman di konsumsi oleh rakyat Indonesia. Hanya itu saja Pak. Jadi kita tidak mengatur namanya volume Pak. Nah ini mungkin. Itu didalam Undang-Undang Hortikulturanya kira-kira demikian Pak. Kita hanya mengatur yang namanya bawang putih apakah aman dikonsumsi atau tidak. Jadi begitu ada proses pengajuan, pengusulan. Katakan si pelaku mengajukan 20.000 ton, 30.000 ton atau 1 juta ton 1 pelaku usaha. Kami akan cek, apakah betul barang itu sudah menerapkan good agriculture practice atau tidak. Sudah menerapkan good handling practice atau tidak. Jangan-jangan dia asal-asalan sehingga barang yang masuk ke Indonesia nantinya untuk dikonsumsi oleh rakyat Indonesia dia tercemar logam berat, tercemar pestisida, mengandung bakteri. Ini yang kita control hanya disana Pak. Jadi kita tidak mengatur yang namanya volume dalam hal ini. Jadi ini adalah pengajuan dari masing-masing pelaku usaha.

Mungkin itu yang bisa kami jawab Pak.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen Hortikultura,

Masalah keamanan pangan bukan domain anda. Itu domainnya karantina. Jadi kalau anda bilang begini-begini, itu jawaban anda kurang pas atau anda asal menjawab. Saya sangat tahu sekali. Jadi jangan dikaitkan dengan keamanan pangan. Itu bukan urusan hortikultura. Kan kita ada Badan Karantina Nasional. Bahkan sekarang ini Indonesia kerjasama sama negara China membuat juga karantina di RI sana. Dari negara asal itu sudah dikarantina. Sudah dicek. Jadi tolong jawab yang jujur. Jangan muter-muter. Bilang saja ini kesalahan yang lalu. 1 juta, 946.000, 760.000. Sudah itu saja. Jadi jangan masalah food kesehatan, dan segala macam. Itu bukan domain anda. Domainnya Kepala Badan Karantina.

Lanjut.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Mohon ijin Pak Ketua.

Jadi karantina itu fokusnya itu kepada untuk organisme pengganggu tanaman yang tidak boleh katakan yang kategori A1 atau A2. Tapi kalau terkait dengan mutu dan kualitas ini ada good agriculture practice yang harus diterapkan dan ini harus berstandar internasional yang diterapkan di negara asal dan harus kita periksa. Ini istilahnya yang kita lakukan itu seperti itu Pak.

KETUA RAPAT:

Saya sudah belajar di Thailand, saya sudah belajar ke Vietnam, saya sudah belajar ke China. Bagaimana sih mereka standarisasi untuk produknya bisa impor ke negara tersebut. Ini loh. Saya belajar sampai saya ke tempat pengemasannya bagaimana, pencucian, nanti kalau perlu saya tayangkan. Pencucian manggisnya bagaimana, perlakuan manggisnya bagaimana. Coba Indonesia. Standarnya Eropa. Mau masuknya ke negara Asia. Kan tidak benar. Terutama lalat buah dan lain-lain. Ya bilang saja ini kesalahan yang lalu. Sudah titik. Saya bukan tidak paham Pak. Saya paham Pak. Dan ini kan yang diminta juga. Kadang yang diminta 20.000, dikasih SPI-nya 5000.

Dilanjutkan sampai selesai.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik Pak.

Saya kira untuk bawang putih sementara demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

Wabillauhitaufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Pak Ketua, makanya Pak Ketua jangan kedepan saja tengok.

KETUA RAPAT:

Anda sudah nulis ini belum?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Sebentar saja Ketua.

KETUA RAPAT:

Interupsi?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Apa tadi Ketua, ini tidak dibagi-bagi bahannya tadi Ketua? Kalau tidak skors saja dulu. Ini mau kapan dibagi bahan. Besok?

KETUA RAPAT:

Maaf, ini lagi di fotocopy Pak.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Sudah setengah jam Ketua.

KETUA RAPAT:

Fotocopynya ke Benhil. Jalannya macet. Sabar dulu Pak. Kalau orang sabar itu disayang Allah Pak.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Pinang pun jangan kedepan saja Ketua. Kadang-kadang kemari tengok, kadang-kadang kesana. Supaya jelas.

KETUA RAPAT:

Oh ya siap.

Terima kasih atas penjelasannya yang telah disampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya sesuai dengan ketentuan Pasal 257, Peraturan Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bahwa setiap Anggota diberi waktu bicara mengajukan pertanyaan 3 menit. Boleh nambah sedikit kalau kurang.

Silakan.

Yang pertama yang mulia Doktor Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Anggota dan Sekjen dan Dirjen Hortikultura.

Pertama saya ingin menyampaikan baik Sekjen maupun Dirjen bahwa di Sumatera Barat sebentar lagi akan mengadakan Penas di bulan ini 2020 ini. Saya minta supaya beberapa jenis program yang berkaitan dengan perkembangan teknologi baru yang banyak manfaatnya untuk petani dan juga bermanfaat untuk penyuluh. Saya pikir ini. Saya minta, bukan pikir lagi. Saya minta untuk dialokasikan untuk pertunjukan-pertunjukan teknologi barunya agar teknologi itu lebih bermanfaat untuk petani, kaitannya untuk pengembangan produktivitas produk-produk hortikultura.

Yang kedua, setelah saya mendengar dan mencoba untuk memahami penjelasan dari Dirjen Hortikultura. Ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan soal alokasi daerah. Saya melihat disini tidak ada penjelasan tentang kemana saja alokasinya itu. Hanya menyebutkan 33 Provinsi, 200 sekian Kabupaten/Kota dan seterusnya, tidak menjelaskan dimana alokasinya, by name, by addressnya dimana. Kalau ini tidak disampaikan maka Anggota akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan. Saya minta melalui Pak Ketua, ini data ini harus disajikan. Dan harus disampaikan kepada Anggota supaya Anggota bisa melakukan pengawasan dan bisa memberikan masukan bila ada temuan.

Kemudian yang ketiga, saya juga melihat tidak tercantumnya program-program Dirjen Hortikultura ini. Program yang berbasis pada masyarakat. Di Komisi IV ini ada 50 Anggota DPR. Dan 50 Anggota DPR ini setidaknya-tidaknya mengetahui dimana alokasi program yang berbasis masyarakat itu, dan juga diberikan kepada Anggota apa saja yang bisa dioptimalkan di Dapilnya masing-masing supaya Anggota juga bisa melakukan perlakuan kepada program ini, kepada petani termasuk pengawasan. Saya nambahin saja Pak Sekjen dan Pak Dirjen. Selama ini kita juga mengalami kesulitan untuk hortikultura ini. Karena memang tidak jelaskan daripada alokasinya.

Kemudian terkait dengan soal. Saya mencermati target peningkatan produksi hortikultura Tahun 2020-2024. Ini angka pertumbuhannya rata-rata 7%. Ini sepertinya angka perkiraan 7% ini memperhatikan variable atau factor lain yang bisa mempengaruhi fluktuasi atau tidak. Asal jangan membuat

perencanaan ini hanya bersifat linear. Kita kan ada factor iklim, ada factor mafia, ada factor lainnya macamnya, dan ada factor pemain disini. Ini mungkin kita jangan disajikan satu data yang bersifat linear. Kalau data yang bersifat linear seperti ini saya pikir kita tidak ada problem. Tapi kita harus masukan factor-faktor lain yang mengganggu perencanaan kita ini. Dan itulah masalahnya yang harus kita selesaikan. Nah ini saya minta supaya perkiraan ini diperbaiki Ketua. Jangan hanya memperkirakan 1 hal ini misalnya ini cabe besar, cabe rawit, bawang merah dan seterusnya. Ini hanya dari 2020 sampai 2004 pertumbuhannya itu sama saja. Ini perencanaan ini saya sebut perencanaan yang membuatnya orang malas. Ingin cepat selesai, ingin semua persoalan selesai. Saya pikir tidak begini perencanaan kita. Tapi kalau perencanaan kita model begini, saya pikir nanti kita akan menghadapi problem ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan dilapangan. Yang seharusnya kita masukan variable itu factor itu sehingga kita tidak bisa menyesuakannya. Tapi begini Pak Ketua, ini harus diperbaiki dulu nih.

Kemudian yang kelima, disini saya tidak mendapatkan 1 gambaran yang utuh tentang bawang putih tadi karena saya ingin mendapatkan data tapi datanya tidak sampai kesini. Berdasarkan penjelasan dari Pak Dirjen tadi, kalau melihat prediksinya tadi. Produktivitas bawang putih ini megalami pertumbuhan yang baik dan meningkat. Tapi kalau kita lihat gejala dilapangan. Sekarang ini harga bawang putih itu hingga ke angka 60.000 per kilo. Pak Dirjen bisa menjelaskan tidak, kenapa itu bisa terjadi. Dan saya berapa waktu yang lalu terus ditanya wartawan, mengapa harga melonjak terus. Nah sementara program-program baik yang bersifat wajib tanam 5% maupun yang dilakukan oleh Kementerian itu apa tidak bisa memasok bawang putih itu ke pasar. Nah berdasarkan program wajib tanam ini, saya melihat juga tidak begitu sukses. Seperti di Kabupaten Solok itu tidak ada hasil panen tetapi tidak bisa diserap, karena alasannya ini adalah untuk kebutuhan bibit. Ini berapa lama kita harus membibit-membibit, terus produktivitas di ... kapan gitu loh. Nah ini persoalannya. Jadi kita harus ada tenggang waktu, kapan waktu membibit waktu dan kapan kita harus bibit itu bisa menghasilkan produksi. Supaya harga bawang putih ini tidak seperti ini.

Kemudian saya melihat juga ini Pak Dirjen sangat gagah sekali memetic durian. Di Dapil saya durian ini sangat dibutuhkan. Mohon dialokasikan durian, mangga, manggis. Karena manggis ini apalagi. Karena di Dapil saya itu betul-betul ada satu sentra sendiri. Nah ini kalau misalnya produksinya surplus. Nah ini gejalanya begitu Pak Dirjen ya di Sejunjung itu. Itu manggis itu surplus. Tapi tidak ada yang menyerapnya. Pak Dirjen tadi mengatakan kita harus memproduksi besar-besaran. Tapi Pemerintah itu sendiri atau para pihak itu tidak sanggup untuk menyerapnya. Akhirnya barang ini hanya tidak ada manfaatnya gitu loh. Saya minta juga selain dari gagasan Dirjen ini adalah untuk memproduksi sebanyak-banyaknya hortikultura ini juga disertai juga dengan penyerapan sebesar-besarnya. Jangan sampai petani itu dia menanam, produksinya berlimpah tapi tidak diserap. Ini kan percuma kita.

Demikian Ketua.

Itu masukan saya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya pak Suhardi Duka.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan, serta Anggota Dewan yang terhormat,
Yang saya hormati Sekjen dan Dirjen, beserta seluruh stafnya yang hadir.

Secara umum di Indonesia komposisi tingkat kemiskinan itu masih pada profesi petani dan nelayan. Sebagai negara Pancasila tentunya perlu keberpihakan, perlu proteksi, perlu subsidi untuk memberdayakan mereka. Kita jangan alergi dengan subsidi. Karena subsidi adalah bukti kehadiran negara terhadap warga yang lemah. Sekaligus sebagai implementasi dari sila ke-2 dan ke-5. Undang-Undang Nomor 19 mengisyaratkan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani. Melihat pemaparan Pak Sekjen dalam komposisi belanja Kementerian tergambar ada 4 secara umum, belanja pegawai, operasional, belanja barang modal, dan belanja bantuan. Saya kira 3 terdahulu itu berkeliling di Kementerian. Yang untuk petani adalah belanja bantuan. Yang dibutuhkan petani adalah, 1. Alat untuk mengolah tanah, 2. Bibit yang baik untuk ditanam, 3. Alat untuk memanen, 4. Jalan yang dilalui dari hasil panen, 5. Pasar untuk ditempati menjual, 6. Aturan dan kebijakan yang berpihak kepada mereka.

Saya melihat bahwa untuk Kesekjenan 1,8 Triliun bertambah 100 Miliar saya kira ini tidak bisa dimanfaatkan oleh petani. Besar ini anggaran Pak Sekjen. Apalagi mau ditambah lagi 100 Miliar. Lihat saja seperti di porsi perencanaan. 35,4 Miliar. Pertanyaannya, rencana besar apa yang ingin dibiayai dengan anggaran 35,4 Miliar. Keahlian apa yang dibutuhkan, informasi intelijen apa yang dibutuhkan, karena informasi data dari BPS kan gratis diambil setelah belanja disana. Tapi ada informasi yang lebih. Sehingga membutuhkan anggaran yang begitu besar. Olehnya itu Pak Ketua mungkin saya tidak setuju kalau digeser lagi ke Sekjen anggaran 100 Miliar. Didalam data saya yang Bapak kasih saya 100. Beda dengan yang diajukan di atas tadi. Bahkan cenderung saya ingin mengurangi untuk kesekjenan itu terlalu besar. Perencanaan saya juga menilai bahwa kunjungan-kunjungan Menteri kemarin itu perencanaan yang tidak bagus. Bapak tidak cermat merencanakan kunjungan Menteri. Bahkan terkesan dadakan. Sehingga itu hampir kunjungan Menteri yang dadakan itu tidak ada Komisi IV yang menghadiri kunjungan atau ikut dengan kunjungan Menteri itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komisi saya kira tidak perlu lagi kita pencitraanlah. Katakanlah kunjungan ke Sulbar. Ekspor perdana CPO. 20

tahun yang lalu CPO sudah diekspor di Sulbar Pak. Tidak ada lagi perdana ekspor CPO di Sulbar.

Pak Sekjen,

Kalau Anggota Komisi IV DPR RI membantu membagi-bagi alat-alat pertanian di Dapil saya welcome. Apalagi kalau Pak Ketua Komisi datang ke Dapil saya ingin bagi-bagi bantuan, saya sangat berterima kasih. Tapi kalau dari Komisi yang lain saya merasa tidak dihargai kalau datang ke Dapil membagi-bagi bantuan. Bahkan merasa ada pembunuhan karakter terhadap diri saya. Kalau bukan Komisi IV. Kalau Komisi IV silakan, siapa saja yang mau datang. Pak Ketua datang mau bagi-bagi di Dapil saya silakan Pak. Saya *welcome*.

Terima kasih banyak.

Kemudian saya ke Dirjen Hortikultura. 1,08 Triliun. Saya kira anggarannya tidak sedikit dan juga tidak terlalu besar. Saya kira saat ini kita menghadapi ada gangguan di China dengan corona virus pasti ada sedikit terganggu impor ya buah-buahan dari China. Jadi saatnya mungkin dalam negeri memanfaatkan peluang ini supaya barang-barang kita bisa dimanfaatkan didalam negeri, harganya bisa menjadi baik. Saya garisbawahi adalah bawang merah dan bawang putih. Bawang merah 5704 hektar. Dengan anggaran 165,1 Miliar dan bawang putih 5443 hektar dengan anggaran 220,15 Miliar. Saya kira ini adalah untuk masyarakat kita. Dan ini anggaran yang paling besar pagunya dari sekian tanaman yang diajukan. Saya ingin mempertanyakan dengan target peningkatan 7%, apakah Tahun 2019 ada peningkatan produksi dari 2 jenis tanaman ini dan berapa peningkatan produksinya. Sehingga kita mematok target 7% itu. Jangan sampai ini hanya semacam target hanya untuk membesarkan hati kita saja.

Didalam lembaran yang Saudara bagi kepada kami, untuk tanaman beberapa pembiayaan ini adalah saya ingin sampaikan ke Pak Dirjen. Untuk Sulawesi Barat bawang merah itu di Poliwali Mandar walaupun tidak Bapak rencanakan. Saya minta ini direncanakan. Mau berapa hektar, apakah 100 hektar, apakah 200 hektar, terserah. Untuk bawang putih, ada 1 Kabupaten di ketinggian lebih 1000 meter dingin. Saya minta buat kebun contoh sekitar 30 hektar, Kabupaten Mamasa. Untuk sayuran saya kira bisa semua Kabupaten Mamuju. Percontohan kebun horti green house, saya kira sudah ada didalam program Bapak. Saya minta supaya juga dialokasikan di Dapil Sulawesi Barat.

Saya kira itu untuk sementara yang saya sampaikan kepada Dirjen Horti.

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Suhardi Duka.

Selanjutnya Pak Muslim.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua dan Anggota Komisi IV,
Pak Sekjen, Pak Dirjen beserta jajaran Kementerian Pertanian.

Pertama berkaitan dengan Pak Sekjen ya. Saya lihat tidak mengulangi yang disampaikan Pak Suhardi. Itu sangat menarik buat saya masalah petani milenial Pak. Sebenarnya kalau kita lihat konsep dari Pak Sekjen ini saya tertarik Pak. Kenapa? Karena kalau kita lihat potensi pengangguran ini luar biasa Pak, apalagi khususnya di daerah kami di Aceh itu. Hampir lulusan S1, S2, ini rata-rata Pak Tapi saya ingin mendapat gambaran Pak Sekjen seperti apa. Karena kebetulan saya masuk Komisi IV salah satu mengangkat potensi milenial ini Pak. bagaimana mereka menjad entrepreneur-entrepreneur dibidang pertanian. Coba bayangkan Pak, ketika mereka ikut andil disektor ini saya yakin ini juga memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Pak. Tentu Pak Sekjen dirancang sedemikian bagus Pak. Kalau ini bisa dikembangkan Pak buat percontohan di beberapa daerah seperti disampaikan Pak Dirjen Hortikultura, saya sepakat Pak. Kita ... misalnya di Aceh. Kita buat sekitar 10-50 hektar. Itu semua anak-anak milenial ini Pak yang bergerak. Itu berapa banyak tenaga kerja yang bisa terserap Pak. Bahkan saya sudah banyak anak lulusan IPB Pak. Di Aceh ada beberapa lulusan IPB. Ini kita dorong mereka ini untuk menjadi motor disana. Saya berharap Dirjen bisa jadikan Aceh sebagai pilot project Pak. Dan kita siap lahan Pak. Disana banyak sekali lahan-lahan tidur yang bisa kita manfaatkan. Tinggal didukung oleh Kementerian Pak. Kita kawal, kita control sebagai fungsi pengawasan dari DPR Pak. Bahkan saya siap turun langsung Pak, kalau ini betul-betul dilaksanakan.

Yang kedua berkaitan tadi Pak Dirjen menyangkut bawang putih. Di Aceh tadi saya lihat sekitar 100 hektar. Itu dimana Pak? Dan konsepnya seperti apa? Siapa yang punya kewenangan untuk melaksanakan. Kenapa? Karena ini menyangkut anggaran negara Pak. Saya sangat sepakat Pak. Selama ini kita impor bawang putih tidak sedikit Pak. Kenapa dengan potensi alam yang begitu besar di Indonesia kita dorong. Kan kita mampu saya yakin. Jangan semua impor-impor. Jadi saya pikir ini solusi, Pak Dirjen betul-betul didorong jangan sampai Pemerintah mengeluarkan terus ini ijin-ijin impor bawang putih sehingga nanti menjadi masalah Pak. ... kita dorong akan bagus.

Yang ketiga ini mohon penjelasan Pak Dirjen ini. Saya mohon dijelaskan secara umum. Kita lihat Tahun 2020 kita lihat masalah Pemerintah menargetkan swasembad bawang putih Pak. Ini saya minta ada hitungan dari Pak Dirjen ini seperti pengembangan bawang putih dalam negeri seperti apa? Berapa produksi dalam negeri? Dan berapa rencana impor Pak. kemudian jaminan ketersediaan bibit seperti apa. Jadi kalau kita ingin mengembangkan bibitnya tidak berkualitas, saya yakin target tidak akan tercapai. Kita lihat tahun lalu itu khususnya bibit bawang putih sangat terbatas ya. Ini seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Bapak sudah gambarkan secara umum menyangkut bawang putih tadi. Saya sepakat kalau ini dikembangkan kalau ini sangat bagus. Kemudian rencana pencapaian produksi cabe Pak Tahun 2020. Disini saya lihat ada 33 Provinsi dan 225 Kabupaten/Kota, kemudian juga 200. Ini dasarnya apa Pak? Dan targetnya dimana ya Pak? Kami tentu semua punya kepentingan Pak, khusus Dapil kami. Kenapa? Kalau ini berhasil jadi kebanggaan buat kita Pak, karena kita mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Kemudian yang ketiga adalah kita tahu betul Pak. Aceh ini sangat tinggi terjadi dampak persoalan pertanian. Kurun waktu 7 tahun ini. Tentu dalam hal ini kita mohon dukungan dari Kementerian Pertanian memberikan khususnya berkaitan dengan kondisi yang ada di Aceh Pak termasuk melalui perhatian, pembinaan terkait dengan praktek good agriculture proseeing gape Pak yang tadi Bapak sampaikan tadi. Kenapa saya katakan disini? Ini mereka butuh misalnya pupuk subsidi, kuota benih yang berkualitas, kemudian kuota dukungan modernisasi pertanian. Bapak bisa lihat di Aceh berapa ribu ini lahan tidur Pak yang sangat rentan dan ini kita dorong Pak. Saya berharap Pak Dirjen bisa kesana ya.

Terakhir ya sedikit, berkaitan tadi saya melihat disini ada target rencana ekspor hortikultura 2020. Saya tertarik disini kita lihat buah ada 17,2 Triliun, sayuran ada 1,8 Triliun, kemudian olah horti tapi dibawah kita lihat ini kan ada baru rencana Pak. Saya ingin dapat gambaran di Tahun 2019 seperti apa Pak. Apakah ini baru rencana saja. Disini kita lihat ada kerjasama dan segala macam Pak. Tentu kalau ini bisa terwujud Pak. Selama ini kita impor Pak, dari Thailand, darimana-mana. Kalau ini bisa kita jalankan. Saya yakin kita ekspor Pak, termasuk yang konsep yang Bapak sampaikan tadi. Kita bikin sentra-sentra durian, buah-buahan. Dan saya yakin tidak sulit Pak kita untuk ekspor Pak ketimbang tadi kita lihat dengan segala keterbatasan itu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Dirjen dan Pak Sekjen.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Muslim, akan sulit. Karena kurangnya pembinaan dari Kementerian Pertanian sq. Hortikultura yang kebawah. Kendalanya itu. Kenapa sih tidak disiapkan misalnya mesin untuk menghilangkan lalat buah, semut. Dulu kan ada P2HP kalau tidak salah. Itu yang menyiapkan. Sekarang

tidak ada. Kendalanya ekspor itu lalat buah atau semut. Jadi tidak begitu gampang Pak Muslim kalau tidak ada tindakan konkrit dari Dirjen Hortikultura.

Pak Budi silakan Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Saya ijin sebentar saja Pak.

Terima kasih.

Pak Sekjen,

Sebenarnya tadi saya sangat tertarik sebenarnya mengenai agriculture war room itu sebenarnya Pak Sekjen. Dan tadi saya teringat waktu Pak Dirjen Hortikultura memberikan paparan. Semua data yang disajikan itu sumbernya masih BPS. Bahkan waktu saya tanyakan mengenai alur informasi data di AWR tersebut pun datanya masih mengacu kepada data BPS. Kalau saya tidak salah ini Bapak ada pengajuan sekitar 50 Miliar untuk pengembangan AWR tersebut. Yang saya ingin mendalami nanti. Sebentar lagi saya harus naik sebentar karena ada Rapat Pimpinan Fraksi tapi saya ingin mendalami ini ... ini untuk apa, apakah ini Cuma untuk mengelola data BPS saja. Kalau kita Cuma mengelola dana BPS saja saya kira saya pakai ipad saya, atau pakai laptop saya pun mengelola data BPS, mengumpulkan data dari BPS pun masih bisa. Jadi sangat penting saya tadi nanya. Input data itu nanti apakah itu dari program kostra tani atau apakah ini nanti tersambung dari AWR itu alurnya itu seperti apa Pak? Saya sangat tertarik mengenai ini karena saya ingin tahu. Pertama, apakah sumber daya manusianya di Kecamatan-Kecamatan yang akan melaksanakan program ini mereka mampu tidak menginput data-data yang sangat vital seperti ini mulai dari harga, analisa inflasi didaerah, dan kalau pun itu nanti tersambung di AWR di sentra itu sangat luar biasa. Tapi saya ingin mendalami ini teknisnya. Tadi Pak Ketua mengingatkan kita selalu jangan kita ini berangan-angan terus nanti tidak ada hasilnya. Jadi Ketua saya ijin sebentar Rapat Pimpinan Fraksi. Nanti saya ingin balik. Saya ingin mendengarkan mengenai penjelasan ini. Karena dananya 50 Miliar, sangat besar untuk program AWR dan tentunya untuk kostra tani itu sangat luar biasa Pak.

Terima kasih.

Saya tinggal sebentar Pak. Mohon ijin.

KETUA RAPAT:

Kalau Pak Budi ngomong apa saya ikuti. Apalagi ada yang sebelah kanan saya selalu tersenyum.

Selanjutnya Pak Edward.

Silakan Pak.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik.

Terima kasih.

Yang saya hormati Pak Ketua dan Anggota Komisi IV,
Dirjen dan Sekjen Hortikultura bersama jajarannya.

Jadi saya mau sampaikan secara sederhana saja. Pak, kalau mau bagi bahan itu bagi cepat. Supaya kita bisa pelajari. Ini ada yang tidak terbagi. Jadi saya juga bingung. Kalau Bapak mau jelaskan angkat, tunjukkan Anggota. Ini buku yang mau dijelaskan. Saya cari dari tadi mungkin 15 menit. Padahal barang tidak ada. Jadi itu tolong Pak. Artinya kerjasama kita supaya mantap.

KETUA RAPAT:

Pak Edward, ijin hanya menyampaikan info. Bahan yang 2 ini hari Jumat sore jam 13.00 sudah ada di Sekretariat Komisi IV langsung saya perintahkan kepada staf Sekretariat untuk mengantarkan ke ruangan Anggota masing-masing. Yang 2 bahan tadi. Kalau yang masalah saya mintakan tadi itu barusan tadi pagi. Karena jumat langsung saya perintahkan. Waktu itu kalau tidak salah tibanya jam 13.00. Ya Pak ya.

Lanjut.

Silakan Pak

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik.

Kalau begitu kita drop saja.

Sekarang berikutnya lagi mengenai singkatan atau istilah-istilah yang digunakan. Ini kan bagi kami barang baru istilahnya ini. Jadi tolong dikasih catatan kaki istilahnya. Dan tolong dijelaskan juga mengenai sumber datanya dari mana, BPS atau mana. Daripada kita tanya lagi kan buang waktu. Kalau sudah ada catatan kaki kan kita tinggal lihat singkatan-singkatan itu, tinggal Bapak jelaskan singkatan ini maksudnya apa. Begitu Pak. Jadi berikutnya lagi ini untuk kerjasama kita Pak. Saya bukan untuk memojokkan Bapak tapi tidak. Kita mau susun skripsi saja tulis dibawah ini Sarjana apa, buku terbitan apa, semua. Jadi itu sebagai keabsahan data ini. Jangan sampai data yang Bapak buat kita mau cek saja susah.

Mengenai sarana pendukung. Tadi saya lihat alsintannya dikasih kurang ya. Tapi Bapak perlu tahu bahwa dilapangan ini masih terlalu kurang alsintannya ini, sarana pendukung ini. Kalau kita mau peningkatan produksi

tapi alat-alat yang ada di lapangan kurang, ya kita hanya membual saja ini. Tidak bisa. Dan juga saya hanya menginformasikan Pak, kita mau tingkatkan produksi tapi banyak bendungan yang jebol. Sudah 3-4 tahun jebol. Saya baru pulang dari ... Dapil. Jadi saya merenung nasib ini. Kapan kita mau maju ini. Air, mau pengadaan pompa air. Tapi air di bendungan tidak ada. Mau pompa darimana nih lobang. Tidak bisa. Sementara hujannya yang kita omong elnino, elnino ini sekarang sudah berjalan elninonya. Jadi tolong itu disampaikan ke Pak Menteri supaya tolong perhatikan. Kami mendukung program ini, bukan tidak mendukung. Jadi bendungan misalnya di daerah saya ini PPU, ada bendungan besar 2. Lahan pertaniannya ratusan hektar tapi kering kerontang. Saya sudah bawa fotonya. Kering kerontang, air tidak ada. Hujan juga datang 2 minggu 1 kali mana bisa ini. Dan itu mengenai air. Saya sampaikan bendungannya. Kalau bendungan mungkin saya sebut langsung lokasinya. Itu di daerah Biboki, Kabupaten Timur Tengah Utara. Itu PPU ini lahan pertanian terluas dan merupakan sumber gudang pangan disitu. Akan kita tanam tanahnya kering kerontang, hewan saja banyak yang mati apalagi tumbuhan mau hidup. Itu satu yang di Biboki Selatan. Jadi tolong disampaikan. Saya ini informasi saja. Mudah-mudahan Bapak bisa menyampaikan informasi ini.

Habis itu satu lagi Pak mengenai lahan bawang putih. Saya lihat disini Bapak hanya membuat Belu saja 50 hektar. Tapi Belu tidak ada bawang putih Pak. Kapan Bapak lihat bawang putih di Belu. Saya dari tadi merenung. Aduh betapa sedihnya nasib daerahku.

KETUA RAPAT:

Mungkin salah tulis kali Pak.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Oh iya. Jadi hal-hal begini sebagai Anggota Dewan, sebagai Wakil Rakyat yang mewakili aspirasi rakyat sana. Kami perlu luruskan Pak. Ini sekedar informasi. Jadi tolong datanya yang baik. Sehingga kalau kami pulang ke daerah, kami bisa memberikan penjelasan yang baik dan benar.

Saya kira hanya itu saja Pak. Cukup sudah lebih 3 menit, Pak Ketua tegur juga tidak enak. Lebih baik sebelum ditegur, saya stop sudah. Nanti lain kali baru saya tambahkan lagi.

Terima kasih banyak.

KETUA RAPAT:

Pak Edward kurang paham tentang masalah singkatan. Dia tahunya singkatannya Sudin (Suku Dinas).

Selanjutnya Pak Slamet.

Silakan Pak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Baik.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan, beserta rekan-rekan Anggota Dewan, Pak Sekjen, Pak Dirjen serta seluruh staf yang saya hormati.

Ada beberapa yang ingin saya konfirmasi. Yang pertama, terkait dengan beberapa data tadi yang juga ada naik-turun, naik-turun itu. Terutama itu di Dirjen Tanaman Pangan ini sampai turun 4 M.

KETUA RAPAT:

Pak Slamet, Dirjen Tanaman Pangan nanti setelah ini. Jadi alangkah baiknya kita sampaikan. Pak Sekjennya tetap disini.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Ya oke.

Terima kasih Pimpinan.

Nanti kita sampaikan disana. Terkait dengan anggaran dulu ke Pak Sekjen. Ada koordinasi penyusunan anggaran itu sampai 11,8 Miliar Pak. Saya ingin mendapatkan gambaran koordinasinya itu yang bagaimana itu kira-kira sampai 11,8 Miliar. Itu kalau tidak salah, kalau saya salah mohon dikoreksi. Karena tadi saya lihat di bahan rapat tidak ada, hanya ditampilkan disana saya foto. Itu Pak Sekjen.

Yang berikutnya, saya juga ingin mendapatkan klarifikasi terkait dari Pak Dirjen Hortikultura. Apakah ini ketidakpahaman saya atau memang apa yang terjadi terkait dengan anggaran-anggaran yang luar biasa, yang ada yang diperuntukan untuk penguatan peningkatan produksi. Sementara minimal yang ada di Dapil saya itu seluruh petani dan pengusaha itu relative dia keluar dari biaya mereka sendiri. Sehingga saya tidak melihat dimana peran Pemerintah untuk kemudian mensupport mereka. Nah makanya saya khawatir saya. Kira-kira bentuk anggaran yang tadi supportnya itu dimana. Karena ketika kemudian termasuk bicara tentang bawang. Saya kaitkan dengan bawang putih. Ketika kita audiensi dengan asosiasi pedagang atau importir bawang kewajiban tanam mereka itu 100% adalah dana dari mereka. Makanya saya sangat mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ichsan dalam forum hari ini juga. Kita harus sudah mendapatkan data dimana yang APBN keluarkan untuk melakukan peningkatan produksi bawang. Karena ini dari seluruh asosiasi itu mereka mengeluarkan per hektarnya 40 Juta untuk menanam tanaman wajib tanam itu. Sehingga kalau kita sinkronkan dengan data ini sementara Pemerintah juga menganggarkan itu. Jangan sampai kita tumpang tindih. Punya Pemerintah diakui oleh

pengusaha, punya pengusaha sebaliknya diakui oleh Pemerintah. Ini kan tidak bagus. Jadi seperti itu.

Kemudian tadi dikaitkan ada juga target peningkatan 7% terutama untuk cabe dan bawang merah. Ada program dalam bentuk fasilitasi oleh APBN. Saya ingin mendapatkan gambaran juga, bentuk fasilitasnya, untuk peningkatan produksi yang 7% itu apa saja, nanti dari Pak Dirjen.

Itu saja mungkin Pimpinan beberapa yang nanti kalau kita kurang di session lain saya tambahkan.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Andi.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati dan juga Pak Sekjen,

Pertama Pak Sekjen tadi, kita ingin mendengarkan sebenarnya mengenai masalah AWR ya (Agriculture War Room) itu. Kita tahu bahwa dibawah Sekjen ini kan sudah ada berapa Biro Pak ya. Ada 11 ya, apakah ini tidak tumpang tindih dengan Biro Data dan Sistem Informasi Pertanian. Atau pertanyaannya, apakah AWR ini dibawahnya Biro ini, atau langsung dibawah Pak Sekjen. Itu yang pertama. Karena saya melihat Pak selama ini Pusdatin ini, saya pribadi 5 tahun Anggota Komisi IV tidak pernah tahu kerjanya apa Pusdatin ini. Produknya itu apa, outputnya itu apa. Tidak pernah kita dapat di Komisi IV ini laporan atau mungkin informasi. Malah ini perlu Pak Sekjen ini data-data yang dihasilkan Pusdatin ini dikasih ke Komisi IV sehingga kita tahu kerjanya apa Pak. Jangan sampai anggaran cukup besar, hampir sama dengan Humas. Tapi kerjanya kita tidak lihat. Itu yang kedua.

Mengenai masalah tambahannya 50 Miliar ini bisa dikatakan besar, bisa juga kecil tergantung kebutuhan dari AWR itu sendiri Pak. Cuma kemarin pas ada launching. Nah sementara kita ini masih membahas anggarannya gitu. Nah mungkin dijelaskan juga seperti apa kira-kira anggaran yang digunakan. Kita berharap kedepan sebetulnya Kementan ini ya bekerja profesionallah Pak. Dan data-data itu betul-betul data valid, bukan data politis Pak. Ya kita ingin Kementerian ini jangan ABS (Asal Bapak Senang). Kita mau semuanya Pak di Sekjennya, Dirjennya kerja professional saja. Karena

kalau ABS itu bahaya nantinya. Data-data yang muncul itu ya bukan data yang valid. Sama dengan yang kemarin Pak penjelasan ekspor kita 160 Triliun. Ini darimana beranjaknya, apakah dari Menteriya dilantik sampai sekarang, atau dari 2019. Ini kan perlu juga penjasna ke public ini. Seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi ekspor tadi darimana angka 160 Triliun ini. Saya sendiri juga bingung darimana angkanya itu. Termasuk untuk ekspor 3 kali. Saya kira kita dukung ini program, karena niat bagus dari Pak Menteri. Cuma harus ada cetak birunya Pak. Rotmapnya untuk 3 kali ekspor itu apa? Jangan uangnya terus yang disampaikan tapi kita tidak tahu bagaimana perjalanannya. Kita sendiri kan masih banyak impor kan ya.

Nah kemudian itu Pak Sekjen. Mungkin nanti dijelaskan. Dan saya berharap Pak Sekjen ini bisa memfasilitasi komunikasi yang baik dengan Komisi IV Pak. Kemarin 5 tahun sudah bagus, sekarang ditingkatkan lagilah komunikasinya.

Kemudian untuk Dirjen Hortikultura. Saya bicara anggaran disini Pak Dirjen ya. Bawang putih, bawang merah memang menjadi prioritas ya. Saya kira ini juga sudah ada lokasinya. Tidak perlu saya tanyakan lagi. Nah ini mungkin untuk anggaran OPT Pak 60 Miliar. OPT itu Organisasi Pengganggu Tanaman ya kalau OPT itu ya. Ini seperti apa gambarannya mungkin nanti bisa dijelaskan kepada saya. Dan satu lagi Pak, Bapak punya anggaran yang sangat besar, kegiatan pendukung manajemen dan yang lainnya 233 Miliar. 20% dari pagu anggaran 1,08 Triliun. Ini dijelaskan Pak Dirjen ini. Apa kira-kira yang mau digunakan anggaran sebesar ini karena hanya judulnya saja. Apakah disana ada seminar, apakah pelatihan, dan lain-lain. Sekali lagi saya berharap, betul-betul di Kementerian Pertanian kerjasama dengan Komisi IV karena Bapak ini kan pelaksana kegiatan Pak. Yang punya uang ini kan rakyat. Rakyat itu menitipkan sama wakil rakyatnya. Uang ini mau digunakan untuk apa.

Kemudian yang kedua mengenai masalah. Tadi Pak Dirjen mengatakan masalah impor itu diperiksa. Saya kira tidak ada masalah. Cuma Bapak pastikan bahwa yang punya RIPH ini betul-betul menanam 5% saja Pak. Bagaimana sistemnya Pak Dirjen Hortikultura ini memastikan bahwa, saya lihat tadi ada angkanya bagus Pak. Perusahaan yang memang tidak menanam lagi di blacklist saja Pak. Tidak diberikan kesempatan lagi. Karena itu sudah nakal dengan kesepakatan.

Yang kedua, saya tidak melihat di program atau pun anggaran Dirjen Hortikultura mengenai pengolahan pasca panen. Ini dimana Pak? Sementara masalah kita ini kan pada saat panen raya banyak barang tapi tidak bisa bertahan lama, seperti bawang merah di Brebes itu kan kalau panen tidak ada harganya. Bawangnya dibuang-buang. Ini bagaimana Bapak memikirkan untuk pengolahan pasca panen agar produk hortikultura ini bisa bertahan lama dan bisa bermanfaat untuk ke masyarakat.

Saya kira ini ada beberapa pertanyaan, masukan Pak Ketua dan juga kita butuh informasi. Dan kalau nanti memang ada hal yang bisa disusulkan nanti bisa tertulis kepada saya secara pribadi.

Sekian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Bu Riezky.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pertama saya ingin menyoroti Pak Sekjen. Yang tadi saya ingin mengulangi kembali memperkuat dari Pak Budi terkait AWR tadi ya. Karena seingat saya pada saat rapat pertama Pak Menteri menyampaikan bahwa akan dirumuskan data mana yang akan dipakai, seingat saya. Terus tiba-tiba hari ini sudah ada keputusan menggunakan data BPS. Ini kan agak kontra produktif maksud saya. Sedangkan kita belum mendengar lagi data mana yang katanya 1 pintu mau dipakai. Itu yang pertama.

Kedua, saya juga penasaran Pak. Daerah saya itu sinyalnya saja susah Pak. Kalau mau pakai satelit, satelit mana yang mau dipakai khusus buat itu. Saya ingin tahu. Saya dari Sumatera Selatan. Kalau memang ini bisa berhasil saya sangat dukung program Bapak, tapi tolong realistis Pak. Jalan saja masih banyak yang belum di aspal Pak. Apalagi yang mau masuk satelit disitu.

Kemudian kepada Bapak Dirjen Horti. Dari tadi saya mencoba yang awal terlihat oleh saya tadi masalah Sumatera Selatan terkait produksi dan produktivitas 38 sentra bawang putih. Mudah-mudahan saya yang salah Pak, Bapak yang benar. 25 September 2019 ada berita menyatakanantisipasi kelangkaan Sumsel mulai menanam bawang putih. Baru mulai itu September 2019. Saya mohon pencerahannya, karena saya ini anak baru disini. Mungkin saya kurang paham. Sedangkan disini sudah ada produktivitas per ton per hektarnya sudah ada.

Kemudian terkait juga masalah, saya mencoba membaca. Saya terima kasih Bapak sudah memberikan bahan juga ada, yang beberapa hari lalu saya sudah baca. Rencana ekspor 2020 yang kurang lebih dengan rincian itu. total kurang lebih 23 Triliun, realisasi ekspor dan lain-lain. Dari data realisasi ekspor 2019 = 5,79 T itu. Rencana ekspor 2020 ini 23 T, potensi ekspor 21,1 T. Ini mohon maaf, saya mohon penjelasan saja. apakah ini berarti Dirjen Horti akan meningkatkan ekspor 2020 ini 4 kali lipat dari realisasi 2019. Saya tidak tahu nih. Ini hitungan saya. Saya tadi minta tolong hitung ada 300% sampai 400%, dan melebihi data potensi berarti Pak ya atau bagaimana ya maksud saya. Karena saya coba dari tadi ngoprek-ngoprek tidak ketemu Pak. jadi tolong nanti dijelaskan Pak terkait hal tersebut.

Jadi itu saja dari saya. Saya mohon juga. Oh ya mumpung saya ingat Pak. Waktu itu kita rapat Pimpinan dengan asosiasi bawang putih bukan ya,

kalau tidak salah ya. Nah ini mumpung teringat. Nah asosiasi bawang putih itu waktu terakhir bertemu kan ada 2 asosiasi kalau tidak salah. Mohon teman-teman tolong dikoreksi. Berapa Pak? Ada 3 ya. Bahkan ada statement. Ini statement loh, mungkin bisa dibuka saat rekaman kemarin atau Lapsingnya. Sempat ada yang berbicara masalah wajib tanam ini katanya fiktif. Ini saya mau nanya, ini sistemnya bagaimana? Ini saya bukan ngarang loh ya. Tapi karena kita rapat saya catat. Tolong saya minta penjelasan jangan sampai saling pointing hidung masing-masing. Itu saja. Kita ingin clear. Karena jangan sampai, nah mungkin sudah beberapa yang ekspor-ekspor-ekspor tetapi punishment rewardnya tidak berkembang gitu loh Pak.

Itu saja dari saya.

Sekian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.)

Terima kasih Mba Kiki.

Pak Dir, banyak sekali masalah bawang putih. Yang berjalan banyak yang tidak benar, yang mau kerja benar kagak bisa jalan. Jadi mohon dikoreksi. Jadi kita minta. Mungkin kita lakukan secara khusus ya nanti untuk benar-benar memahami segala penyelewengan yang ada data-data yang ada, tanaman fiktif yang ada, jumlah luas lahan yang harus ditanam berapa, tapi yang sudah terealisasi itu berapa, dan lapangannya dimana saja, produksinya dimana saja. Sehingga segala hal bisa kita koreksi yang tidak benarnya.

Selanjutnya Pak Sutrisno.

Silakan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya biasa mengawali. Ingin membangun kesamaan dulu. Kesamaan sikap dan harapan. Semua para Pejabat Pemerintahan kalau ganti tahun awal tahun menantikan anggaran. Kalau harapannya baik tentunya begitu digelontorkan anggaran ada sikap rasa syukur bisa membantu rakyat, meningkatkan produktivitas rakyat, mengatasi permasalahan rakyat. Tapi sangat disayangkan begitu buka-buka penjabarannya anggarannya statis. Tidak ubahnya seperti yang kemarin. Persoalan-persoalan yang berkembang itu tidak terjawab. Bukan tanpa alasan nih Pak Dirjen Horti. Kan persoalan kurang pasok akibatnya kita harus impor. Nah ini kan mestinya kita cari penyebabnya. Kenapa kurang pasok. Apakah akibat bibit yang kurang baik sehingga produksi tidak meningkat. Ini Pak Dirjen saya punya rekamannya.

Bibit bawang putih itu dikirim begitu saja di desa-desa dan sampai hari ini masih ada. Tidak ada ditanam.

KETUA RAPAT:

Pak Sutrisno ada rekamannya?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ada.

KETUA RAPAT:

Mana?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Saya tidak bawa. Nanti di TA saya.

KETUA RAPAT:

Tolong nanti TA-nya kirim kesini. Nanti ditayangkan ya.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Saya teruskan dulu ya. Bukan hanya itu termasuk juga bibit jagung. Ditempat itu apa ... nanam, jagungnya dibeli lagi sama cukong. Berputar lagi ke tempat yang lain. Seharusnya ada solusi, kenapa. Jangan programnya kemudian memperluas lahan, padahal masalah belum diselesaikan.

Yang kedua, potensi sebagaimana yang disampaikan Kiki tadi. Bapak mentargetkan 2020 ini akan ekspor 22,1 Triliun. Padahal 2019 realisasinya hanya 5,9. Kami sangat mendukung kalau itu bisa direalisasikan. Mestinya program kerjanya adalah berorientasi bagaimana potensi itu bisa jadi ekspor. Tidak ada. Tidak ada program yang bagaimana menjaga, memelihara agar potensi itu bisa diekspor. Jangan kemudian akhirnya data-data itu hanya untuk mendorong supaya dapat anggaran. Ini saya sangat berharap tidak seperti itu.

Kemudian masalah nanas. Ini kan olahan. Di Subang ini nanasnya dibongkar semuanya Pak. Diganti sama kelapa sawit, sedangkan kelapa sawit ada persoalan. Kenapa dari Kementerian tidak turun, tidak memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nanas Subang dibongkar diganti dengan tanaman-tanaman sawit. Duren, Bapak memprediksikan 11 koma sekian Triliun. Hanya menghitung karena produksinya ada 11 Juta ton, mungkin kali 1 jutaan. Betul itu 11 Triliun, tapi nanti bagaimana merealisasikannya. Nah persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat itu adalah jadi rakyat itu tidak punya program menanam apa. Ya karena sangat ketakutan kalau panen tidak terbeli, itu persoalannya. Mestinya ada arahan. Bagaimana mengarahkannya, kami butuh tahun depan sekian. Begitu panen itu bisa

dibeli. Saya jadi Bupati sampai ikut nanam bawang Pak. 20 hektar. Masih dapat untung 1,5 Miliar saya. Dapat bantuan dari Kementerian. Tapi uang bantuan saya kembalikan untuk nanti dipakai lagi sebagai cadangan untuk menanam. Coba program-program seperti itu dijalankan, jadi tidak terus menerus menyerap uang negara. Karena rakyat minta itu hanya semata-mata ingin dapat bantuan, bukan untuk memproduksi. Begitu juga bawang putih, ditempat saya juga ditanam tanpa ijin dengan saya. Tidak berhasil. Kenapa Pak tidak berhasil, begitu tanam dilepas. Oh itu diatas ada Profesor Pak. Professor yang sengaja memang nanam bawang putih. Tadi Pimpinan mengatakan dia punya niatan mengembang bawang putih tapi terhambat. Tidak pernah disiram, suhunya tidak sesuaikan, termasuk Sulawesi Tengah Pak. Saya lama disana. Ada 200 hektar lebih. Daerahnya panas tidak ada air Pak masa ada bawang putih di Sulawesi Tengah. Jadi semua Kepala Dinas Pertaniannya kalau ada program minta Pak. kenapa? Tidak ada pertanggungjawaban kalau gagal. Oleh karena itu pesan saya, usul saya. Setiap program-program spesifik ini akan dimintakan laporannya dari Dinas-Dinas supaya kami pun bisa ngontrol. Jangan kemudian terus-terusan anggaran itu dialirkan ke daerah tapi tidak pernah ada hasilnya.

Kemudian Pak, ini masuk anggaran. Minta ijin Pak Pimpinan, saya orang Jawa Barat. Halaman 15 daripada program Bapak ini. Jawa Barat gede Pak dapat anggarannya satu Triliun koma tujuh. Tapi bidang horti hanya dapat 9,1 Miliar. Jawa Tengah 184 Miliar, kemudian hanya di bagi sama Subang, Cianjur, Garut, Majalengka Cuma 1,2 Miliar. Disini ada 2 program di Dinas Provinsi di pecah 2. Begitu juga di Jawa Tengah. Ada Dinas ... di pecah 2, apakah untuk mengurai supaya tidak kelihatan besar. Di era otonomi daerah Pak yang bersentuhan dengan petani adalah Kabupaten/Kota. Kalau memperbesar program anggaran di Provinsi lahannya apa. Ini mohon penjelasan ini. Daerah kami Pak, penghasil kubis terbaik Pak. Mohon diperhatikan. Garut itu kalau produksi kubis Majalengka habis harus datang ke Majalengka dapat surat jalannya. Harus bisa diterima oleh pasar. Majalengka hanya bisa dikasih 1,2 Miliar. Artinya apa? Kementerian tidak paham objeknya. Kondisi didaerah masing-masing mana penghasilnya. Oleh karena itu pertanyaan saya adalah apakah penganggaran ke Kabupaten-Kabupaten ini, ini sungguh-sungguh berdasarkan potensi atau karena kedekatan. Karena ini bukan hanya Jawa Barat saja. Di tempat lain juga tidak ada, kasihan itu. Nah kalau begini, bagaimana daerah lainnya. Kalau kita ingin memajukan pertanian, ingin membuat juga biayanya rendah. Tentunya juga ada pengkajian, harus ada pengkajian. Harus ada pedoman. Rakyat sampai hari ini tidak ada yang diberikan bimbingan. Semau-mau rakyat karena selalu dibayang-bayangi ... (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Pak Trisno, sudah 5 menit. 1 menit lagi silakan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Baik.

Terakhir Pak, bawang Pak. Orang Brebes itu nanam bawangnya di Majalengka Pasal. Setiap panen bawang harganya jatuh. Tidak usah import Pak. Serahkan saja Majalengka maunya berapa. Kita akan kumpulkan. Uang yang begini banyak yang terbaik adalah Bapak fasilitasi gudang Pak, supaya barang itu bisa dimasukkan gudang, syukur ada blowernya. Tidak perlu import. Apalagi risk program, program special bawang sama cabe.

Oleh karena iut usul saya, kedepan agar sungguh-sungguh berdasarkan objek berdasarkan kebutuhan. Jangan bagi rata Pak. Kalau bagi rata buang-buang duit.

Itu saya terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sutrisno.

Beliau ini dulu Bupati. Jadi kalau Bupati itu lebih tahu daripada Anggota Komisi IV yang baru masuk yang bukan bekas Bupati. Nah. Lebih pengalaman. Selanjutnya Pak Firman Soebagyo.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan yang saya hormati,
Pak Sekjen, Pak Dirjen beserta jajarannya, dan Anggota Komisi IV yang kami banggakan.

Pertama Pak Pimpinan, saya tidak mau marah-marah. Mungkin seperti yang lain, karena kami di Komisi IV ini kan mitra Pemerintah. Keberhasilan Pemerintah tentunya keberhasilan Komisi. Kegagalan Pemerintah kegagalan Komisi.

Kita memberikan satu apresiasi yang telah memberikan suatu penjelasan pada pagi hari ini terlepas itu memuaskan dan tidak memuaskan. Namun saya akan bicara kerangka besarnya, apa sih tugas dari Kementerian ini. Kalau bicara tugas Kementerian adalah menjabarkan, melaksanakan visi-misi Presiden.

Pak Sudin,

Saya masih ingat kita sama-sama di Komisi IV ini berapa puluh tahun yang lalu. Kita memberikan anggaran di Kementerian Pertanian diawali dari 6 Triliun itu saja sudah ngos-ngosan kita memperjuangkan anggaran. Sampai hari ini sudah 20 Triliun lebih. Tetapi hasilnya apa, ya masih begini-begini

saja. Seperti benang ruwet. Artinya ada persoalan besar ditubuh Kementerian Pertanian ini. Oleh karena itu Pak Sekjen, mohon diingatkan kepada Pak Menteri saya agak ragu kemarin ketika Beliau menyampaikan rapat pertama. Yang saya lihat ini bicara Beliau itu diawang-awang tidak menyentuh bumi. Padahal kita kerja di Kementerian harus nyentuh bumi. Itu seperti yang diinginkan Pak Jokowi. Saya sebagai pendukung Pemerintah tentunya harus kritis terhadap ini. Bukan saya tidak suka dengan Pak Menteri. Pak Menteri Golkar juga. Tapi saya akan mengkritisi. Yang saya lihat sampai hari ini adalah tidak ada satu kerangka besar dari Kementerian Pertanian yang terkait dengan apa rencana kerja Kementerian Pertanian 5 tahun kedepan. Sehingga kalau kita lihat dari rapat ke rapat Dirjen satu ke Dirjen lain, itu loncat sana loncat sini, henggang sana henggang sini, tidak ketemua antara satu dengan yang lain. Padahal ini kan satu kesatuan, masing-masing jalan sendiri-sendiri.

Oleh karena itu pertama, harus dibuat suatu perencanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Artinya bahwa apa yang dilaksanakan pendahulunya yang baik kita teruskan, tidak diubah nomenklturnya sehingga masyarakat itu mudah menghafal. Dan kemudian yang jelek atau kurang sempurna kita sempurnakan. Nah dari sistem ini Pak. Dari semuanya ini harus punya sistem. Sistemnya seperti apa membangun petani kedepan. Kemana orientasinya. Karena di pertanian ini ada 2 kelompok besar Pak. Pertama adalah kelompok tanaman pangan termasuk hortikultura dan non tanaman pangan yaitu yang namanya perkebunan. Tapi nyaris. Setiap rapat itu kami tidak pernah bicara detail tentang masalah perkebunan. Yang notabene perkebunan ini adalah sebagai penggali devisa negara yang cukup besar. Ini tidak ..., bagaimana nasib karet hari ini, bagaimana nasib kopi hari ini, bagaimana nasib sawit hari ini yang selalu jadi bulan-bulanan. Begitu dihantam kanan-kiri, devisa negara turun baru Presiden sampai ke Menterinya gugup. Gagap. Semuanya berbondong-bondong ke Luar Negeri baru lobi. Ini kayak orang bangun tidur dan kemudian ada mimpi. Nah setelah sistem dibangun Pak, kita haru punya data yang kuat. Kalau saya cermati, data dari Direktorat Jenderal masing-masing ini tidak akurat. Ketidakakuratan tidak bisa disalahkan. Karena Kementerian harus mengacu kepada data BPS. Data BPS ini Pak amburadul. Terus terang. Jangan dikira bahwa BPS itu juga bukan mafia. Dengan adanya larangan ekspor kemarin semua para pelaku mafia impor mengimpor ini mainnya disana Pak, memainkan data sehingga perlu impor dan sebagainya.

Nah setelah kita punya data Pak mungkin kita masuk kepada bagaimana kesiapan sumber daya manusia kita sendiri. Jadi rencana kerja yang Bapak sampaikan tadi tentunya bagus tapi kerangkanya kerangka besar. Jadi penempatannya pada posisi ... yang strategis, dan targetnya apa. Apakah kita focus kepada tanaman pangan untuk menuju swasembada pangan kedaulatan pangan atau kita mau kemana. Nah ini yang penting. Setelah SDM baru kita bicara anggaran. Kalau anggaran sekarang ini kita focus kepada anggaran tapi tidak ada perencanaan besarnya. Saya yakin anggaran ini seperti buang garam ditengah laut. Jangan sampai kita ini di Komisi IV dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian ini jangan sampai kita orang yang punya cita-cita besar tetapi kalau tidak nanti kecapekan Pak kita bisa gila. Makanya saya bilang Pak Azikin saya tidak mau marah-marah, saya

tidak mau stroke dalam ruangan ini. Karena dari tahun ke tahun ya begini saja seperti benang ruwet.

Nah oleh karena itu Pak, mungkin ini yang mesti direncanakan. Pimpinan, mungkin saya menyarankan. Sesekalilah para Pimpinan dan Kapoksi kita kumpul, Pak Sekjen, Pak Menteri, para Dirjennnya, kita bicara hati ke hati, apa sih targetnya.

Nah kemudian bicara tentang masalah ekspor-impor Pak. Saya terus terang senang kalau dengan masalah ekspor-impor ini. Bicara tentang ekspornya dulu Pak. Saya melihat ekspor ini kan seolah-olah menjadi salah satu target. Tetapi tidak pernah kita sadari, apakh barang komoditas yang kita ekspor ini sudah mencukupi tidak kebutuhan dalam negeri kita. Oleh karena itu sebelum kita ekspor ada pemetaan dulu. Bawang merah kita itu berapa produksi nasionalnya dan dimana pos-pos produksinya. Nah setelah itu baru kita ekspor. Kalau ekspor sasaran negaranya mana. Apa kita mampu bersaing atau tidak dengan harga di luar negeri. Karena produk China ini Pak sudah masuk mendunia dan nyaris tidak ada yang bisa menyaingi harganya. Sangat murah sekali. Seperti beras. Kita tidak bakalan bisa bersaing dengan Vietnam. Itu tidak mungkin mustahil, sampai kapan pun. Oleh karena itu keberpihakan kepada Pemerintah untuk memproteksi local ini sangat penting.

Nah yang terkait masalah ekspor ini mohon dipetakan betul. Bawang merah ini apakah betul. Kayak kemarin mohon maaf Pak Menteri Pak Amran, impor jagung. Ternyata didalam negeri masih defisit. Pabrik-pabrik masih kekurangan. Kemudian ekspor bawang merah juga begitu.

KETUA RAPAT:

Pak Firman,

Benar tidak omongannya jagungnya defisit di Indonesia. Katanya berlebihan.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Nah makanya itu Pak, kita bedah ini Pak.

KETUA RAPAT:

Oh gitu.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Kita bedah ini. Nah posisi ini harus.

KETUA RAPAT:

Ya mungkin bedahnya nanti waktu di tanaman pangan Pak Firman. Habis ini kan tanaman pangan.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Ya contoh Pak.

KETUA RAPAT:

Oh ya. Oke.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Konteksnya kan hortikultura. Ini bawang merah ini.

KETUA RAPAT:

Oke.

Tapi Bapak jangan pulang dulu ya Pak sampai selesai ini.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Oke.

Bawang merah ini. Nah bawang merah tadi Pak. itu juga sama Pak. Bawang merah ini sekarang ini posisi sama. Di sisi lain tadi Pak Sudin menyinggung. Saya tidak mengulangi apa yang disampaikan Pak Sudin. Yang namanya manggis Pak. Betapa susahnya urus ijin. Padahal keinginan para pembudidaya hortikultura itu pasar yang luar biasa di China ketika itu mencari ijin kesana kemari. Gape antara Kementerian Pertanian-Perdagangan itu lempar sana lempar sini. Nyaris tidak pernah bisa terlaksana. Mohon ini Pak Dirjen, mohon diperhatikan betul agar diberikan kemudahan kemudian.

Kemudian yang terkait dengan masalah impor Pak. Ini juga masalah mafia Pak. Jangan dilihat Pak bahwa Bapak ini harus cemat. Mafia ini dimana-mana ada Pak. hari ini saya baru saja melihat. Bukan melihat, dikirim WA. Ini di Tempo "Investigasi jejaring hitam bawang putih. Impor bawang putih berlumur kongkalikong Pengusaha dan Pejabat nakal jejak suap sampai level Menteri". Mohon ini dicermati betul. Pasti ada asap tanpa api Pak. Mesti ada ini. Kalau sudah muncul begini, mesti ada sesuatu. Nah oleh karena itu mohon dicermati Pak, karena masalah bawang putih yang hari ini konon katanya 2 hari yang lalu itu semua stok di pasar habis diborong oleh pemborong yang tidak tahu orangnya. Berarti ini ada pemain ditengah Pak. Karena ini kan supply demand, hukum ekonominya. Ketika stok itu diborong habis oleh orang tertentu maka akan terjadi defisit. Begitu mengalami defisit di pasar harga melonjak. Yang mengendalikan siapa? Ya pedagang ini. Pedagang ini yang punya stok. Nah oleh karena itu mohon ini betul-betul dicermati, ayo rajin-rajinlah kita turun kelapangan untuk melakukan cek and ricek dilapangan. Jadi bawang putih ini adalah komoditi yang betul-betul menarik Pak. Karena sekarang posisi dagang hari ini Pak, bisnis apa pun yang memang sangat menguntungkan, menggiurkan itu adalah bisnis dagang

Pak. Karena ini jualan kertas. Kita tidak boleh capek-capek. Petani kita yang sekarang memproduksi sebagai buruh tani yang 1 harinya 50.000. Sekarang ini kalau mau jual barang hasil produksinya itu tidak pernah laku dipasaran. Makanya tadi saya tanya, kalau mau ekspor yang mengeksport siapa? Jangan-jangan nanti barang kita diekspor, tengah jalan ada permainan lagi balik lagi. Nah seperti ini. Nah ini mohon betul-betul dicermati.

Paling akhir Pak Sekje, ini tadi kan banyak yang Bapak rencanakan untuk kegiatan sosialisasi dan sebagainya. Apakah kita tidak bisa buat sama-sama dari Kementerian itu ada sosialis berbagai Undang-Undang atau sosialis program, atau sosialis apa pun, kita lakukan bersama-sama dari Anggota Komisi IV. Didaerah masing-masinglah minimal. Saya kemarin di Komisi II Pak dengan Pak Azikin bikin terobosan yang sama Pak. KPU, Bawaslu yang tadi sosialisasi sendiri ... sendiri begitu, akhirnya kita dilibatkan, dikasih Itu jauh lebih efektif Pak karena kita bisa langsung kelapangan mengundang masyarakat. Dan masyarakat biar tahu sampai bawah, ini loh regulasinya, ini loh aturannya, ini masyarakat juga punya hak untuk melakukan control kebijakan-kebijakan. Karena begini Pak, mohon maaf. Kepala Dinas yang dibawah itu Pak enggan turun ke lapangan Pak. Tergegap-gegap kalau ada Pejabat Pusat turun baru mereka ribut. Saya terima kasih kemarin itu karena ada puso tanaman jagung. Dinasnya itu Kepala Desanya mondar-mandir tidak dipedulikan. Begitu kami kelapangan, kemudian kita telepon Pak Dirjen, direspon Pak Dirjen dapat bantuan, tim turun, baru mereka kenapa kok tidak lapor saya. Padahal Kepala Desanya sudah lapor tapi sudah terlambat. Sudah terlanjur habis dimakan tikus. Obatnya baru datang. Nah seperti ini. oleh karena itu, ini mohon betul-betul diperhatikan Pak supaya sosialisasi ini bisa langsung menyentuh kepada masyarakat. Karena DPR ini saya yakin kalau ditugasi seperti ini Pak rajin. Karena mereka juga ada kontak dengan konstituen. Kalau kita tidak berbuat tentunya akan dievaluasi-evaluasi. Tapi kalau ada instrument-instrument yang kita sepakati bersama kita turun sama-sama sosialisasi alangkah indahnya dan bisa kita selesaikan persoalan dilapangan di wilayah masing-masing.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Pimpinan.

Jadi kalau saya lihat kalau suruh jawab yang jujur ini Sekjen ini, sosialisasi Undang-Undang tidak penting tetapi coba dicek. Selama 5 tahun terakhir kunjungan Pejabat Eselon I, Eselon II ke Luar Negeri berapa puluh Miliar. Itu yang lebih penting dibandingkan sosialisasi. Betul Pak Sekjen. Nanti di brakedown. Hortikultura berapa, tanaman pangan ini-ini-ini, termasuk Kesekjenan berapa puluh Miliar. Supaya jelas. Ini loh. Kalau tidak jelas ya begitu. Saya juga ditawarkan oleh Kementerian Kelautan untuk sosialisasi

Undang-Undang. Saya katakan kalau saya Cuma sendiri tidak usah. Saya berserta Anggota semua dapat baru lakukan sosialisasi. Kalau tidak, tidak usah.

Selanjutnya Pak Dokter Azikin.

Silakan.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan segenap Anggota yang saya hormati,
Pak Sekjen dan rombongan yang sama saya hormati.

Pak Sekjen, kita ketahui bersama bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia basic ekonominya berada pada 4 sektor, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sehingga apabila Kementerian Pertanian bisa optimal melaksanakan program-programnya saya yakin bahwa masyarakat Indonesia bisa sejahtera. Tapi sebaliknya apabila Kementerian Pertanian gagal melaksanakan programnya, maka gagallah kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pak Sekjen yang saya hormati,

Saya umar bakri Pak, lama di Pemerintahan. Dan saya juga Saya pernah melakukan uji coba untuk mengetahui berapa hasil panen padi 1 hektar. Padi kering panen. Diperlakukan secara optimal sistem pembibitan yang kita seleksi, pemupukan. Hasilnya Cuma 6,5 ton sampai dengan 7 ton per hektar. Itu membramo Pak. Bahkan ada dibawah itu juga. Kalau itu kita kalkulasi Pak Sekjen, Pak Dirjen, tidak bisa petani itu kalau hanya memiliki 1 hektar tanah untuk menyekolahkan anaknya sampai ke Perguruan Tinggi. Sudah dilakukan juga sistem tumpang sari. Tidak bisa. 86 Pak saya Camat melakukan penelitian itu dengan beberapa mahasiswa itu UNHAS. Tidak ada. Bahkan saya coba lagu menanam semangka. Saya perlombakan semangka itu. Bisa ditanya Pak Menteri Pertanian, saya tetangga. Dia di Kecamatan Bontonopo, saya di Bajeng. Saya perlombakan itu hasil semangka. Saya tahu kalau ini tidak manis, KCL-nya kurang. Dan pada saat itu saya mengetahui bahwa memang kualitas SDM kita punya penyuluh pertanian perlu ditingkatkan. Jadi bukan saja petaninya yang masih lemah tapi penyuluhnya juga perlu kita tingkatkan.

Oleh karena itu Pak Sekjen, saya ingin mendukung bahwa program prioritas Kementerian Pertanian untuk mendapatkan data rill terhadap produksi pertanian di Indonesia itu sangat dibutuhkan. Terutama juga kami di DPR itu membutuhkan. Karena dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran untuk mendukung perencanaan Bapak tentu perlu data yang rill, yang mana yang perlu kita tingkatkan produksinya, yang mana sudah bagus. Karena kalau ini. Tidak ada Pak Mungkin saya bisa tahu kalau wilayah saya. Katakanlah Dapil I Sulawesi Selatan, mulai dari Kabupaten Gowa, sampai kepulauan Selayar saya bisa hafal. Bahwa di ketinggian ini 800 sampai

dengan 100 meter di atas permukaan laut cocok untuk kentang drakola dan dinggola. Tapi yang lain tidak ada. Jadi saya harapkan pada pertemuan yang akan datang Pak Sekjen. Sudah ada data juga dibagikan kepada kita tentang program prioritas Pak Sekjen bahwa ada data pertanian untuk di Indonesia. Kalau tidak selesai itu 100 hari Pak Sekjen kasihan itu. Berarti gagal program 100 hari ya.

Yang kedua pak Sekjen, saya baru dari Dapil. Salah satu keluhan petani adanya pajak penjualan yang dikenakan kepada hasil pertanian. Walaupun kita ketahui bahwa bukan di sector pertanian ini tapi Pemerintahan itu totalitas kegiatan yang berhubungan satu dengan yang lain. Mungkin didalam rapat-rapat terbatas Kabinet ini bisa disampaikan agar PPN hasil pertanian dan perkebunan bisa ditinjau kembali.

Yang ketiga Pak Sekjen, jangan lagi ada dropping jagung dragon. Dragon itu bukan mensejahterakan petani tapi bahkan menyengsarakan petani. Tidak ada yang mau beli itu jagung dragon.

KETUA RAPAT:

Pak Azikin,

Itu dragon itu merk.

F-GERINDRA (DR. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Merk dragon.

KETUA RAPAT:

Jadi benih jagung merk dragon.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Dikasih petani untuk ditanam tidak ada yang mau beli, tidak ada yang mau ambil.

KETUA RAPAT:

Kenapa Pak?

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Tidak tahu. Memang jelek.

KETUA RAPAT:

Jangan-jangan nanti belum ditanam sudah berbuah gitu Pak.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Jelek kualitasnya Pak.

Jadi Pak Dirjen, Pak Sekjen,

Kalau kasih petani diteliti dulu ya. Kasihan itu petani. Sudah rugi waktu, rugi modal, rugi pupuk. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada asuransi pertanian. Mungkin sudah bisa mengimbangi kondisi-kondisi tersebut.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi masalah tadi Bapak Azikin mengatakan mengenai asuransi pertanian. Kemarin pun saya sempat dipanggil oleh Partai saya, oleh Fraksi saya karena selama ini kurangnya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi asuransi pertanian dari Kementerian Pertanian maupun dari Dinas. Jadi saya juga nanti minggu depan saya ada Rapat Kerja Partai, saya akan siapkan seluruh Anggota Fraksi saya se-Provinsi Lampung untuk membantu mensosialisasikan.

Ya silakan Pak Salim.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Saya pun interupsi dari Fraksi saya. Kasihan ini Pak Sekjen, Pak Dirjen. Ini kita break saja dulu Ketua. Ini interupsi dari Fraksi saya barusan Ketua.

Terima kasih kalau diterima. Kita break saja. Sayang ini Pak Sekjen, Pak Dirjen dan kawan-kawan nih dan kita kasih break dulu Ketua mumpung ini sudah waktunya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke.

Kalau nanti tidak break, kepala agak puyeng mau menjawabnya nanti salah. Jadi berhubung waktunya mepet. Kita break 30 menit. Kita kembali kesini pada pukul 14.00. Saya berharap seluruh Anggota pukul 14.00 setelah ISHOMA kembali ke ruangan.

Silakan Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Saya usul saja Ketua.

Saya setuju break. Tetapi ada beberapa data yang harus disiapkan oleh Dirjen Horti Pak terkait dengan tadi data target produksi Pak. Kalau bisa nanti ditampilkan pada saat kita break ini.

Yang kedua, data luas tanam. Tadi Pak Slamet sudah menyampaikan bahwa mana data yang ditanam oleh APBN, mana data yang ditanam wajib tanam itu. Kalau bisa disiapkan Pak. sehingga kita tahu dimana kekhawatiran tumpang tindih itu. Saya usul begitu Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya saya setuju Pak Ichsan.

Jadi itu bukan urusan Pak Dirjen, bukan urusan Pak Sekjen. Tinggal perintahkan stafnya saja. Yang penting Pak Sekjen, Pak Dirjen jangan telat makan siang nanti masuk angin.

Saya break dulu.

(RAPAT DI SKORS)

(SKORS RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Pimpinan beserta seluruh jajaran Komisi IV yang saya hormati, Pak Sekjen, Pak Direktur, serta seluruh hadirin dari Kementerian yang saya banggakan.

Ijikan saya sedikit ingin mendengar penjelasan tentang konstra tani (komando strategi) tani. Kami, saya pribadi ingin mendapat kejelasan konkrit tentang program Pak Menteri tentang Konstra tani, apakah Konstra tani ini merupakan sebuah wadah tempat bergabungnya para peyuluh atau memang ada perekrutan baru. Apalagi walaupun saya sebagai orang baru di DPR dan di Komisi IV, beberapa program Kementerian dulu seperti pemuda tani juga outputnya tidak maksimal. Maka saya perlu minta kejelasan tujuan berdirinya ini, kemudian Konstra tani ini (Komando Strategi) pertanian. Jadi ini, karena saya sependapat bahwa ada harapan besar sama Pak Menteri yang baru dimana dengan gebrakan awalnya berjanji 100 hari akan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih data pertanian dan juga pada kesempatan ini karena 100 hari sudah terlewati mohon melalui Pimpinan mungkin, kami bisa mendapatkan data berapa atau setiap permasalahan yang selama ini tumpang tindih tidak terjadi kedepan. Kemudian kami juga minta data, contoh

misalnya persawahan. Berapa jumlah sawah konkrit, kemudian berapa luas areal sawah yang telah dialiri air, kemudian berapa luas lahan yang per tahun bisa nanam 3 musim, atau 2 musim ini kan tidak ada data ini. Jadi seperti komitmen kita awal. Kita tidak akan bisa mencapai swasembada pangan kalau itu tidak bisa kita hadirkan data yang maksimal. Jadi pertama menyangkut dengan data, yang kedua konstra tani. Jujur, kami sepakat. Tetapi kalau konstra tani ini hanya sebagai ruang, seperti yang Kementerian-Kementerian telah berlalu saya tidak sependapat. Saya sependapat bagaimana mengoptimalkan para penyuluh pertanian dan malah kalau bisa setiap desa yang ada sawah itu ada penyuluhnya.

Kemudian yang terakhir, menyangkut dengan Dirjen Hortikultura. Bahwa program pengembangan Hortikultura di petani selama ini nampaknya mohon maaf hanya sebatas bagi-bagi benih atau bibit saja. Sedangkan pembinaannya, pengembangan praktisnya nampaknya kurang, bahkan belum ada. Terutama pada tahap pemeliharaan. Maka pada Tahun 2020 ini apakah masih dengan pola yang lama atau pola yang sama. Mohon diberikan penjelasan kepada kami. Agar kita bisa membangun sinergitas antara Kementerian dengan Komisi, sehingga cita-cita kita untuk membangkitkan para petani kita bisa maksimal. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kami perlu penjelasan konkrit tentang konstra tani.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Khalid,

Semangatnya Pemerintah itu dari 10 tahun lalu 1 desa 1 penyuluh, semangatnya. Tetapi Alhamdulillah sampai hari ini belum terjadwal.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Ijin Ketua.

Kalau memang semangatnya saja dan kalau memang Tahun 2020 ini tidak ada. Berarti apa yang dijanjikan Pak ... bohong juga ini.

KETUA RAPAT:

Ya kita lihat saja nanti.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Johan Rosihan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua dan Anggota yang saya hormati,
Pak Sekjen, Dirjen Horti yang saya hormati, dan seluruh jajarannya,

Yang pertama Pak, dari data yang disampaikan kepada kami ini, itu ternyata hanya NTB yang produktivitasnya itu diatas 11 ton per hektar ... bahkan di lapangan kita bisa sampai 30 ton per hektar kalau sawah irigasi, salah satu.

KETUA RAPAT:

Tadi katanya 25, sekarang 30. Mana yang benar?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Barusan saya dapat dari BPPT Ketua. Sampai 30. Ya kalau untuk bibit ya kita dapat 6 bulan, susutnya 30% lah. Jadi 10 ton untuk bibit. Tapi yang basah umbinya itu 30 ton. Tetapi ketika kita melihat anggaran BPPT Pak, BPPT NTB itu minim sekali. Harusnya, kenapa saya bilang BPPT? Karena tinggal BPTT saja yang nanam bawang putih di Sembalun itu. Rakyat tidak lagi mau tanam bawang putih. Padahal Tahun 80'an bawang putih itu menjadi primadona. Disitu semua orang Sembalun naik haji Pak. ... bawang putih Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Johan, sebentar saya tanya tadi. Bapak katakan, rakyat tidak ingin tanam bawang putih.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Tidak ada.

KETUA RAPAT:

Tidak ada. 2018-2019 tidak ada?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

2018 itu setahu saya Cuma BPPT yang tanam.

KETUA RAPAT:

2019, tidak ada?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

2019 hanya BPPT Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi nanti tolong Saudara Dirjen dicek karena ada laporan ada kewajiban importir menanam ... (suara tidak jelas).

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Menanam 5% itu.

KETUA RAPAT:

Nah tolong nanti dicek.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ini sudah masuk APH Pak Ketua soal bawang putih ini. ... (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Jangan sampai datanya tumpang tindih antara APBN dengan kewajiban importir.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Yang saya sampaikan ini adalah fakta di sentra. Di sentra bawang putih. Dan hanya di NTB Pak yang 11 ton, yang lain-lain dibawah itu. Coba lihat. Nah karenanya saya minta supaya tolonglah diberi insentif daerah yang produktif ini Pak. Ini anggaran BPPT ini Cuma 19 Miliar disini, itu pun Cuma belanja pegawai 8-9 hektar. Karenanya saya meminta supaya ada insentifnya itu. Karena begini, untuk hortikultura ini kan harus. Dia harus ketiga komponen itu harus mendapatkan keuntungan. Karena ini adalah produk yang nilainya strategis. Untuk petaninya ada apa insentifnya, untuk pelakunya apa insentifnya, untuk pasar apa insentifnya. Kan harus kita pikirkan yang begitu. Jangan sampai kemudian kita menyuruh tanam ketika panen seperti itu. Nah saya juga kontak barusan kepada petani bawang di Bima Pak. kalau di bawang putih itu di Sembalun. Kalau bawang merah itu di Bima sama Sumbawa. Sumbawa Timur, dari Meronge sampai ... sampai Sapir itu sentra bawang merah. Mereka sekarang teriak itu dengan harga pestisida itu Pak Ketua. Itu biaya per hektarnya sampai 50 juta per hektarnya. Nah sekarang ini karena petani tidak bisa lagi menanam secara serempak maka hama itu datang darimana-mana. Nah karenanya petani sekarang mengeluh. Nah

sementara kita lihat dari Dirjen Hortikultura ini Bansosnya kurang Pak Ketua. Bukan kurang, tidak ada malah. Tidak tahu yang setahu kita. Karena ini Bansos perlu Pak, biar nanti kita yang bagi kepada masyarakat. Jangan hanya PSP saja yang ada Bansosnya. Hortikultura itu banyak sekarang itu petani kita itu beralih ke tanaman ... karena produksinya, harganya juga bagus. Jangan sampai mereka tidak kita beri insentif untuk itu.

Nah jadi yang berikutnya soal konstra tani Pak Ketua. Sejak awal saya sudah ingatkan Pak Menteri tentang konstra tani ini. kalau konstra tani itu hanya sekedar menjadi judul dan gagah-gagahan. Saya bilang gagah-gagahan begini Pak, Bapak program namanya "Komando Strategi". Terus ruangnya war room. Bapak kalah-kalah Menteri Pertahanan ini. Nah tapi sudah ... mau pukul gong berapa kali Pak dengan komando ini, 1 komando pok begitu. Tapi kalau dibawah itu penyuluh tidak beres. Tidak akan bisa bergerak biar 100 kali, 1000 kali Bapak pukul gong itu karena penyuluh tidak siap. Penyuluh sekarang ini menderita Pak. Statusnya tidak jelas. Tidak usah 1 desa 1 penyuluh. Yang ada saja mereka tidak jelas statusnya. Saya reses itu Pak di Kantor BPP Dompus, aduh miris kita lihat Pak. karena saya pernah menyuarkan soal penyuluh ini. Ketika saya datang saya dikerubungi sama penyuluh-penyuluh itu. Dia titip nasibnya. Jadi Pak berhenti dengan gagah-gagahan kayak itu. Yang penting itu adalah bagaimana kita itu, sudah kalau untuk penyuluh anggarannya jelas.

Nah jadi Pak Ketua, saran saya adalah coba kita sisir ini. Kita sisir ini anggarannya Sekjen segala macam ini. Jangan terlalu banyak anggaran-anggaran untuk yang kita tidak jelas. Perbanyak Bansoslah biar kita bisa serahkan langsung kepada masyarakat. Jangan terlalu banyak program gagah-gagahan. Mau buat war roomlah, mau buat komando ini, komando itu. Ya percuma kalau misalnya sekedar turun itu sekedar bagi-bagi untuk acara partai kan susah. Masih 4 tahun Pemilu ini. Sama-sama kita Pemilu ini Pak Ketua. Jangan begitu. Kalau misalnya ada Bansos bagi ramai-ramai sama kita. Jangan sendiri-sendiri pakai acara partai segala.

Jadi begitu Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Tadi saya tidak paham. Yang dimaksud acara partai tadi apa Pak?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Kan Pak Ketua yang kasih tahu kita acara di Sulawesi Selatan itu.

KETUA RAPAT:

Jadi macam Pentagon gitu ya.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Betul Pak Ketua. Kayak kita ngomong-ngomongkan di grup itu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh begitu.

Jadi tadi ada kritik dari Anggota, kita breakdown dulu angka-angkanya supaya jelas. Karena kalau kita lihat biaya operasional Kesekjenan sampai 100 Miliar lebih kan ini terlalulah. Jangan keterlaluan. Yang saya tekankan disini adalah peningkatan produksi, peningkatan ekspor. Tapi bukan ekspor yang dirayakan. Itu loh.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Maksudnya dirayakan apa Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Ya Pak Dirjen tahulah.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Ketua, jadi kalau dulu panen yang dirayakan. Sekarang ekspor yang dirayakan gitu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

Satu lagi. Tapi ingin melanjutkan kata-kata Pak Suhardi Duka. Kalau niat undang jangan besok harinya sore diundang. Saya jelaskan Saudara Sekjen, saya sangat kecewa sama Kesekjenan. Benar-benar saya kecewa. Besok ada acara sore saya di WA, di WA oleh staf Kesekjenan ke staf saya. Staf saya ke saya. Saya berpikir alangkah sibuknya Eselon I, Eselon II, Eselon III tidak bisa telepon saya. Cuma ngomong, Ketua, Anggota, 2 hari lagi ada acara ini. Kalau ada waktu dan mau datang silakan kami undang. Ini tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan ini nanti akan saya sampaikan juga kepada Saudara Menteri. Yang lebih tragisnya lagi, kenapa saya kemarin tidak mau datang ke Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian mengundang Saudara Ketua Komisi IV untuk datang ke soft launching ini. Betul tidak Pak Momon? Betul tidak kata-kata seperti itu? Tolong Bapak jawab.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Betul mungkin Pak. Saya cek iya.

KETUA RAPAT:

Betul?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Betul kan. Jadi Kementerian ini manggil Anggota dan Pimpinan Komisi IV sebagai Saudara. Kira-kira etikanya bagaimana sih? Periode lalu tidak ada kata-kata surat seperti itu. Mohon maaf, yang namanya Pak Amran Suleman itu 2 hari itu pasti telepon saya. Walaupun saya Cuma Anggota abal-abal di Komisi IV. Pak Ketua, ijin kalau bisa datang ke Lampung saya undang. Oh ya Inshaa Allah saya datang. Ini besok acara, hari ini saya diundang. Maka jangan harap saya sebagai Pimpinan akan datang. Maka kemarin ya saya suruh Pak Hasan kemarin saja yang datang. Pak Hasan ini surat Saudara harus hadir saya bilang. Itu saja. Apa tidak ada bakunya etikanya seperti itu. Kok makin lama makin tidak ada aturan. Ini loh yang menjadi beban saya. Masa saya setiap Rapat Kerja, RDP harus marah, harus gebrak meja.

Selanjutnya Pak Salim Fachry. Bapak tidak perlu gebrak meja Pak. kata sebelah Bapak nanti Bapak ikut kena stroke Pak.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Ijin Pak Ketua.

Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan jajaran yang kami hormati, Pimpinan.

Pak Sekjen tadi sudah dengar keluhan dari Pimpinan kami. Bayangkan seorang Ketua kami begitu surat apalagi yang ... Pak. Ketua tinggal perintah saja yang seperti biasa ini.

Baik, saya langsung saja Pak Sekjen. Begini Pak Ketua, kalau pemaparan Sekjen seketika tadi dan Pak Dirjen saya kira kalau masalah anggaran ini Pak Ketua tidak usah kita ajari lagi seorang Sekjen atau pun seorang Dirjen. Sudah khatam dia semua Pak Ketua. Sama seperti Pak Ketua sudah ke China, Thailand, Bangkok, kemana-mana masalah bawang. Mau ditanya, padahal Ketua sudah hafal.

Tadi Pak Sekjen saya kira selalu kita ini mitra kita bilang Pak Sekjen. Sebenarnya tidak susah Pak Sekjen. Pak Sekjen sudah berapa tahun Pak. Sebenarnya kalau sudah ada kata sepakat untuk membangun negeri ini gampang saja Pak, tidak payah-payah Pak. Ini contoh, belum ke Dirjen TP Pak. belum apa-apa sudah begini, sudah begitu. Makanya timbul pro dan kontra Pak. Sebab semua punya hak. Saya kira melalui kami Pimpinan kalau antara Sekjen dan Pimpinan saja, saya kira semua Anggota sudah bisa memahami Pak. tidak usah Pak Ketua setiap RDP, Raker bertengkar begini-

begini saja. Kalau sudah merasa sepaham, sependapatan saya kira tidak ada masalah. Sependapat Pak sorry. Contoh yang dibilang Pak Dirjen Horti tadi Pak, ini ada durian, ini-itu. Seingat saya Pak mungkin Bapak belum Dirjenya. Tidak ada pernah khususnya saya dapat apa pun tuh Pak. maunya dari awal Pak Sekjen di koordinir Dirjen ini. Di Horti mana yang bisa bantu. Bantu bukan untuk Anggota Komisi IV Pak. membantu Bapak menyalurkan ke Dapil masing-masing. Kita ini pun dipilih Pak. Kalau Bapak mungkin di SK-kan oleh Pak Menteri. Tadi apa kata teman-teman, jangan memberikan yang bagus-bagus sama Pak Menteri. Sebab Menteri ini Pak jiwanya kita apresiasi nih Pak. Semangatnya tinggi. Cuma apa kata Pak Firman tadi. Saking tingginya takut nanti kita terjebak. Contoh Pak Dirjen, di Aceh itu. Pak Khalid ini orang Aceh Pak. Saya tahu hafal betul Beliau ini orang Aceh. Ada bibit bawang 100 ton Pak ya. 100 hektar Pak ya, sorry Pak. Ada di Benermeriah dan Aceh Tengah. Kedepan apa salahnya ajak Pak Khalid ini dan Pak Muslim, sebab orang nih 2 di Aceh sini Pak. Daerah mana yang ada 100 hektar ini? Berarti Anggota Komisi itu itulah mitra Pak. Mungkin manfaat Pak Khalid dan Pak Muslim itu orang tahu ini Anggota DPR kami. Ada gunanya Pak Ketua. Kalau kedepan semua gitu gampang nih Pak. Tergantung Pak Sekjen, Cuma Pak Sekjen. Saya kadang-kadang Pak Sekjen pembelaan saya terhadap Bapak dan Pak Dirjen tadi Ketua untuk tidak mau break, saya usulkan untuk di break. Supaya tenang semua Pak Sekjen. Bapak Ketua kami ini Pak Sekjen. Tembak bilang Ketua, pasti kami tembak Pak Sekjen. Cuma itu pun yang nolong Pak Sekjen perhatikanlah. Ini menyangkut yang hebat sekarang Pak Dirjen masalah bawang putih, heboh Pak. Bawang putih ini adalah komoditi yang luar biasa Pak. Sekarang harga naik. Cuma kita ingin tanyakan Pak penjelasan Bapak, berapa stoknya Pak? Stok yang terbatas ini atau permainan di pedagang Pak. Yang mana Pak? Sudah itu Pak, perkiraan stok bawang putih yang masih dikuasai importir dan pedagang. Mengapa saat ini RIPH belum walaupun sudah Bapak jawab hari Jumat sudah dikeluarkan penjelasan Pak Dirjen tadi.

KETUA RAPAT:

Ijin.

Saudara Dirjen, jumat kapan RIPH bawang putih dikeluarkan? Jumat sore, oh.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Berdasarkan informasi Pak, indikasi pelaku usaha ada upaya pengaturan untuk oknum tertentu Pak. Sudah itu menurut Pak Dirjen, kapan Indonesia ini bisa berswasembada bawang Pak? Ini saya melihat Pak kawan-kawan tidak perhatikan Pak Dirjen, Pak Sekjen. Disana ada 3 Bu kan? Apa tuh Bu? Bawang putih tuh Bu ya? Contoh, ini sebenarnya salah Bu 3, ini aturannya 4 buat. Sebab indikasi ada 4 perusahaan yang sudah disetujui Dirjen. Perusahaan siapa. Ini indikasi Pak. Kalau indikasi belum tentu benar. Ada. Sudah 4 yang ditentukan menjadi importirnya.

KETUA RAPAT:

Ya saya paham. Bapak ngomong empat karena Partai Bapak Nomor 4 Pak. Dirjen Hortikultura teman saya. Jadi dikeluarkannya 3 PDI-Perjuangan.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Ya kalau soal teman Pak, Bang Firman katakan tadi Dirjen itu adik kelas saya. Memangnya kalau adik kelasmu, kalau tidak jelas untuk apa.

Sudah, menyangkut ke bawang putih Pak. Mohon waktunya Ketua. Ini gape ini siapa yang buat Pak. Untuk siapa gapenya Pak? Siapa yang menentukan gapenya ini? Di kasih ke PT mana. Indikasi ada 4 PT yang sudah dikasih. "indikasi" Pak, saya tanda kutip. Jadi apakah Kementerian yang menentukan. Atau adakah importir yang mengajukan. Tapi menurut biasanya importir yang pakai gape ini sama Pak. Kita mau tanya, mekanismenya bagaimana? Karena supliernya sama semua Pak. Nah siapa yang menentukan importirnya? Pak Dirjenkah, aturankah? Ini yang mau kita pertanyakan.

Saya kembali nih Pak Dirjen. Kalau anggaran tadi Pak Ketua, kawan-kawan tidak usah lagi diajari ini. Semua hafal Beliau ini. Apalagi tadi ada foto Pak Dirjen lagi sama durian ya Pak Khalid. Padahal kalau body saya sama Pak Dirjen sama tinggi besar. Sama-sama Pak Sudin lagi. Makanya, ini ada Pak Ketua dalam sambutan Ketua tahapan tadi mengatakan jangan menguntungkan satu kelompok. Saya dalam, saya pelajari dalam ini Ketua. Saya ikuti ini Ketua apa pembicaraan Ketua. Sebagai Anggota yang patuh dan taat asas kepada Pimpinan harus saya cermati. Ketua katakan tadi untuk menguntungkan satu kelompok, apa maksudnya ini Ketua. Apakah untuk konstra tani tadi? Ini mohon Pak Sekjen. Ini saya minta maaf. Konstra tani bagus ini Pak. Cuma jangan kejadian macam dulu-dulu Pak. Pendamping desa. Kan paham Bapak. Jangan dijadikan ini momen politik, masih jauh Pak dan ada indikasi lagi. Ini balik saya nih. Ketua mungkin tidak tahu 4 PT tadi. kalau nanti Pak Dirjen tanya sama saya, saya buka 4 mata 2 pandangan. Makanya Pak Dirjen, Pak Sekjen, tidak payah-payah nih Pak. Nanti langsung ke TP Pak. Jelas saja Pak. Berapa? Bukan kami minta jatah untuk kami Pak, tidak. Apa keberatan Bapak? Ada barang itu 10 sama-sama kita Bapak. Kami hanya menyalurkan Bapak. 10, 5 sama kami atau 6, 7 sama kami, 3 sama kalian. Yang 3 itu mau Bapak kemanakan, mau kasih PDIP kasihlah Pak, mau kasih sama Golkar kasih, mau kasih sama Gerindra kasih. Tidak ada masalah Pak. Supaya ini clear Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Salim Fakhry,

Saran saya jangan nyerang sayalah. Saya ini Pimpinan disini.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Tidak menyerang Ketua.

KETUA RAPAT:

Tadi kalau Bapak bilang nanti kalau 6 di Anggota, 4 di PDIP. Ya tidaklah, saya juga tidak begitu.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Maksud saya Golkar juga dapat Ketua. Ini bukan untuk PDIP saja. Arah pembicaraan saya ini Pak Sekjen sudah paham itu.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Semua ini menyatakan ada kegiatan yang dibilang Beliau tadi, ada kegiatan sana sudah apa yang tidak berhak membagikan. Contoh, salah satu teman mengatakan tadi di Dapil Beliau. Bukan Anggota Komisi IV membagikan barang itu. Barang-barang Komisi IV. Makanya Pak Dirjen tadi Dirjen TP jumpa sama saya barusan. Pak Sekjen, tanggal 22, tanggal 21 ada acara di Aceh Ketua. Presiden hadir. Kenduri Nusantara. Kebangsaan Nusantara Pak Ketua. Presiden hadir. Acaranya di Birun Pak ya. Mungkin Pak Sekjen tidak tahu Pak. Di Birun, kami diajak Pak. Tadi jelas. Saya belum tentu, Pak Khalid juga belum tentu. Sebab ada salah satu acara Partai disana. Mana mungkin Ketua mau hadir.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

(Suara tidak jelas).

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Saya tidak bilang Pak Khalid kalau saya tidak mau tembak langsung. Cuma dari pinggir-pinggir saya tembak. Ini tolong berikan masukan kepada Pak Menteri. Sayang Pak Menteri, Pak Sekjen. Sebab Pak Sekjen yang diharapkan oleh Pak Sarulimpo. Karena Pak Sekjen ahli sudah didalam Kementerian ini. Jangan dijebak Pak Sarulimpo ini sudah saya katakan Pak, ini orang Golkar dulu Pak. Sekarang kami titip di Nasdem. Kalau Bapak Dirjen dan Sekjen dan kawan-kawan sayang berikan masukan Pak Ketua. Termasuk Pak Ketua juga jangan bosan-bosan memberikan masukan kepada Pak Sarulimpo. Ini Pak Ketua sini gebrak sini. Saya ada yang kurang terima dari Pak Ketua. Pak Firman ini selalu mengatakan, masa saya dulu. Sekarang kok diam? Masa saya dulu anggaran 6 Miliar, tidak seperti 20 Triliun, sorry. Ah tambah saja nolnya kok susah. Sekarang masa Pak Sudin 20 sekian Triliun sama masa Pak Budi. Kenapa Kementerian menyalurkan sendiri-sendiri Pak?

Apakah saya bilang sama Pak Firman tadi karena dia senior saya. Jangan ngomong. Ngomong tadi saya sudah bilang, sayang Dirjen Horti adik kelas saya. Eh memang boleh begitu. Sedangkan Pak Sudin Pak Firman Partai Penguasa penuh di Republik Indonesia bisa tegas. Ini karena ada 2 Pimpinan sini. Saya kira itu saja Pak Pimpinan.

Harapan terakhir kepada Pak Sekjen. Ubah pola kita saja Pak. Ada rupanya yang dari Jawa Tengah. Durian, sudah kasih sekian ribu. Apa yang susah Pak. Ini supaya Anggota Komisi IV nih pun. Namanya bermitra. Ini Pak kalau dulu Pak. Ini kawan-kawan yang baru ya, siapa yang mau minta tidak dapat. Ya betul. Siapa yang ... mau minta tidak dapat, siapa yang mau minta dibawa ke Philipin Pak Sudin dan Pak Bobby disini, mari kita bangun kebersamaan Pak.

Sekian dan terima kasih.

Mohon maaf kalau kurang berkenan.

KETUA RAPAT:

Cukup?

Kok bilang Pak Budinya nengok kanan. Apa maksudnya?

Selanjutnya Mba Alien Mus.

Ini dilihat. Dalam rangka rilis dan luas lahan sawah. Sekaligus soft lounching agriculture war room. Kami mengundang Saudara untuk hadir. Jadi Ketua Komisi IV dipanggil Saudara, saya tidak tahu kalau Anggota. Dan ini yang ngetik tidak mungkin Pak Tidak mungkin juga stafnya. Kira-kira pantas tidak kata-kata ini. Ya bisa jadi karena putrinya sahabat saya. Cukup.

Selanjutnya tadi Mba Alien Mus.

3 menit cukup?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Cukup.

Terima kasih Ketua.

Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan, dan juga Anggota Komisi IV yang saya banggakan,
Bapak Dirjen, beserta jajarannya yang juga saya banggakan.

Saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang Provinsi saya Pak. Saya dari Maluku Utara. 22,6% PDB itu Produk Domestik Bruto itu masih ada dalam pertanian. Tapi juga kita juga di Maluku Utara di Kota Ternate kemarin saya turun di waktu pada masa Reses. Itu kan mereka sangat membutuhkan

perhatian dan atensi dari Pusat tentang Hortikultura. Tapi Pak, permintaan pupuknya tidak sesuai dengan apa yang diberikan. Mereka mintanya pupuk hortikultura, yang datang adalah bukan pupuk hortikultura. Dan yang terjadi adalah mereka harus dipaksa untuk menerima pupuk tersebut. Ini kan lain diminta lain juga yang dikasih. Lain yang diharap, lain juga yang terjadi.

Untuk Pak Dirjen Hortikultura. sejak Tahun 2018 tadi saya sudah sampaikan Ternate dijadikan sentra pengembangan hortikultura seperti tanaman cabe, tomat, kangkung, sawi, bayam, dan lainnya. Namun saya belum melihat keberpihakan akan hal tersebut. Saya meminta kepada Pak Sekjen dan Pak Dirjen Hortikultura agar slogan sentra pengembangan di Sulawesi Utara bukan sekedar slogan saja. Namun ada keberpihakan anggaran dan kebijakan yang mendukung mulai pra produksi hingga distribusi. Dan juga saya ingin menyampaikan lebih baik untuk kontra tani, saya membaca bahannya masih belum jelas seperti apa tugas dan fungsinya. Sehingga disetujui untuk program anggaran tersebut direncanakan ulang kembali. Karena banyak permasalahan yang urgent dan penting. Dan saya ingin menyampaikan lagi Pak. Kalau tidak salah RIPH rekomendasikan ijin produk hortikultura buah baru saja di bulan Januari itu diterbitkan ijin, kalau tidak salah ada beberapa PT. Benar tidak itu Pak Dirjen? Di bulan berapa ya? Ada beberapa perusahaan Pak?

KETUA RAPAT:

Dijawab pakai speaker, pakai mic.

KEMENTAN:

Ada 3 perusahaan. Amerika Serikat.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

3 perusahaan itu apa-apa saja Pak?

KEMENTAN:

Wah saya tidak hafal namanya. Tapi ada 3 perusahaan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Bapak tidak hafal atau Bapak tidak mau kasih tahu nih. Karena ini sudah jadi. Masa ijin ke perusahaan. 3 perusahaan yang dikeluarkan oleh Bapak Dirjen ini tidak tahu.

KEMENTAN:

Nanti kita mintakan dari Timnya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Bisa tidak dikasih namanya sekarang?

KEMENTAN:

Bisa nanti di Pusat.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ijin Pimpinan.

Bisa saya meminta nama.

KETUA RAPAT:

Silakan saja. Tapi nanti jangan sampai lebih dari 3 menit.

Permasalahan apa? Tadi 3 PT permasalahannya apa?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Permasalahannya, apa standarisasi pemberian ijin terhadap 3. Misalkan 3 perusahaan tersebut. Kriterianya seperti apa saja, apakah perusahaan-perusahaan lain tidak memenuhi syarat-syarat tersebut atau standarisasi. Kriteria kan kita harus tahu juga Pak. Makanya kita ingin tahu, perusahaan ini apa saja. Jadi saya ingin tahu Pak, ijin.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

Setiap Anggota punya hak untuk ngomong. Silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Tolong dijawab Pak melalui dengan stafnya Bapak karena waktu saya berjalan nih Pak. Jangan sampai 3 menit nih.

KETUA RAPAT:

Mba Alien, boleh tidak dijawabnya nanti sekalian? Kalau boleh. Saya bukan membela Pak Dirjen, kalau boleh.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Cuma jawab saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sudah ada jawabannya Pak Dirjen?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Bu Sesdit silakan Bu. Perusahaan namanya sebutkan.

KETUA RAPAT:

Dibelakang tidak apa-apa Bu Sesdit jawab,

SESDIT HORTIKULTURA:

Tiga perusahaan itu yang terbit itu adalah 1. PT Karunia Alam Raya Sejati, 2. Chery Fruit, dan 3. Laris Manis Utama.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Masih diminta diulangi lagi. Pertanyaan saya berarti banyak yang membutuhkan.

SESDIT HORTIKULTURA:

Diulangi lagi ya. Yang pertama, Karunia Alam Raya Sejati. Yang kedua, Chery Fruit, dan yang ketiga Laris Manis Utama.

KETUA RAPAT:

Sudah dijawab Mba Alien.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik.

KETUA RAPAT:

Bu Sesdit minta tolong mic-nya dimatikan.

1 menit lagi Bu Alien Mus.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik.

Terima kasih.

Dari 2 PT, satunya CV ya Bu?

KETUA RAPAT:

Jadi Cuma nama perusahaannya saja.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

... juga Ketua.

KETUA RAPAT:

Nanti begini saja. Setelah itu kita dalam nanti pada putaran sesi selanjutnya. Yang penting sudah dijawab oleh Ibu Sesdit. Kalau memang diperlukan kita panggil semua pengusaha hortikultura. kita minta keterangannya, kita buka sejelas-jelasnya. Gitu kan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Tolong nanti dimasukan kesimpulan Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya yang atur, bukan anda yang atur. Jelas!

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih Ketua.

Ijin selesai.

KETUA RAPAT:

Saya Pimpinan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya.

Pak Salim.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sesuai dengan usulan ketua, Anggota Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Mba Vita Ervina.

F-PDIP (VITA ERVINA, S.E., M.B.A.):

Terima kasih Ketua.

Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan, juga Sekjen dan Dirjen Hortikultura,

Saya mewakili dari Dapil Jawa Tengah VI. Yang kita tahu Jawa Tengah merupakan penyanggah terbesar dari komoditas cabe, dan juga bawang putih nasional. Di Dapil saya merupakan Magelang, Temanggung menjadi sentral pengembangan cabe yang memberikan kontribusi besar pengembangan cabe untuk ketersediaan cabe hingga bisa memberikan ekspor. Maka saya harap untuk kesinambungan peningkatan produksi dibutuhkan juga dukungan Pemerintah kepada petani berupa teknologi budaya agar produktivitasnya semakin meningkat. Sehingga target pertumbuhan yang 7% tadi yang dari paparan Dirjen Hortikultura bisa tercapai. Maka anggaran hortikultura untuk kawasan aneka cabe harus juga tepat guna.

Sebagai gambaran Tahun 2018 di Jawa Tengah saja ada kawasan 2280 hektar diberikan 68,4 Miliar. Itu kisarannya per hektar berarti sekitar 30 Juta. Di Tahun 2009 untuk dikisaran nasional memberikan anggaran APBN 100 hektar mendapatkan anggaran 130 Miliar. Itu berarti sekitar 13 Juta per hektar. Namun pada Tahun 2020, usulan dari ... menjadi ada perluasan kawasan memang. Menjadi 13328 hektar. Namun anggarannya menjadi menurun. Menjadi 59,9 Miliar. Ini berarti 4,5 Juta per hektar. Bagaimana bisa mendukung Pemerintah kepada petani untuk budidaya kawasan aneka cabe ini. Saya mohon penjelasannya terkait alokasi yang menurun secara signifikan ini. Itu yang pertama.

Kemudian saya mohon, biasanya juga terkait dengan alokasi anggaran untuk benih batang. Ini ada mangga, duren, lengkeng, cabe. Volumennya 3 juta 786 batang dengan anggaran 30,8 Miliar. Ini mohon agar ada penyajian secara rinci dan rigit lebih rinci terkait dengan volume per komoditas dan juga anggarannya. Sehingga kita bisa melihat penyajiannya lebih rinci lagi.

Kemudian ada lagi terkait dengan hortikultura duren. Tadi pak Salim juga sudah menyampaikan. Saya harap potensi duren di Purworejo juga bisa diperhatikan.

Sekian dari saya.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Ibu Ema, silakan.

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Sekjen, Pak Dirjen Horti beserta seluruh jajaran yang hadir.

Sangat singkat pertanyaan saya. Yang pertama, mohon dijelaskan Pak Sekjen tadi dalam paparannya terkait dengan, secara detail terkait program family farming dan pertanian di Perguruan Tinggi. Terkait penanggulangan stunting menjadi 14%. Bagaimana dengan tujuan, sasarannya yang ingin dicapai. Serta rencana realisasinya. Mohon kami diberi penjelasan tentang bagaimana program ini bisa berjalan.

Yang kedua, banyak masukan dari banyak konstituen waktu kita menyerap aspirasi didaerah. Masyarakat kita terutama di Kabupaten Jombang Dapil kami. Khususnya bagi para Ibu-Ibu para perempuan tani. Jadi Bapak-Bapak mengelola sawahnya ini dan Ibu-Ibunya ini kadang-kadang menunggu dirumah. Nah yang ingin Ibu-Ibu sampaikan ke kami ini, mereka ini Ibu-Ibu para perempuan tani ingin punya usaha yang mana memanfaatkan lahan-lahan pekarangan di sekitar rumah, entah itu ada program KRPL, atau program terkait dengan bantuan benih atau bibit sayur yang ada di tanam oleh Ibu-Ibu di sekitar rumah. Mohon ini dari Kementan bisa memberikan program tersebut karena kami juga ingin memberdayakan para perempuan tani.

Yang terakhir, didaerah kami juga dilalui tol yang sangat panjang. Dampak pembangunan tol di Kabupaten Jombang, petani mengeluh. Ada 2 hal Pak yang saat ini mereka mengeluh terkait dengan banyaknya hama tikus disekitar jalan tol. Yang kedua, saluran irigasi yang hilang. Sebelum dibangun tol saluran irigasi bisa baik dan berjalan dengan lancar dan itu sangat banyak manfaatnya. Begitu ada pembangunan tol irigasinya hilang dan sawah-sawah disekitar tol itu yang mepet dengan jalan tol itu banyak yang tidak produksi. Bisa dimanfaatkan lahannya karena memang saluran airnya tidak ada. Jadi mohon dari Kementerian untuk bisa membantu kami didaerah kami terkait irigasi tertier yang mana ini sangat dibutuhkan para petani di Kabupaten Jombang.

Terima kasih Pak Sekjen dan Pak Dirjen Horti.

Saya akhir.

Wauallahumafiq Ila Aqwamtih Thoriq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mba.

Selanjutnya Mba Luluk.

F-PDIP (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Sekjen dan juga Pak Dirjen.

Saya akan menyoroti beberapa hal. Mudah-mudahan waktunya cukup 3 menit. Yang pertama yang terkait dengan swasembada bawang putih. Dalam rencananya Kementan 2021 adalah tahun dimana swasembada bawang putih itu bisa diwujudkan. Benar Pak ya? Rencananya demikian. Ya rencana itu kan bukan impian kosong. Kalau rencana Kementerian itu ya pasti dengan semua pertimbangannya.

KETUA RAPAT:

Kalau saya bilang impian kosong.

F-PDIP (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Nah itu. Saya mau bilang.

KETUA RAPAT:

2021 Swasembada, impian kosong.

F-PDIP (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Exactly Ketua, cocok. Ini berarti *mission impossible* ya Pak Ketua. Ya karena saya juga menyoroti dari catatan yang Bapak punya juga bahwa luasan lahan bawang putih kita saja maksimal hanya 2500 hektar. Sementara idealnya luasan lahan kita kalau mau benar-benar swasembada bawang putih maka setidaknya 50.000 hektar. Karena per hektarnya kan maksimum itu pun hanya 10 ton. Jadi kalau untuk bisa memenuhi kira-kira kebutuhan konsumsi yang 500.000 kan begitu logikanya. Maka sekurang-kurangnya 50.000 ton. Tapi direncanakan yang anggaran 2020 saja itu lebih kurang hanya 5433 hektar, dengan anggaran 200 Miliar. Nah bagaimana bisa mengejar ketertinggalan yang luar biasa itu. Dari yang sekurang-kurangnya 50.000 hektar dalam bayangan saya itu kalau misalnya ada kecepatan dan produktivitasnya maksimum bisa dilakukan. Dalam waktu 1 tahun kedepan itu bagaimana bisa menyulap kondisi yang seperti ini. Jadi kalau mau bikin perencanaan ini kan kita akhirnya tidak hanya pada pemanis saja begitu, ya impian kosong atau *mission impossible*. Jadi lebih bagus membuat perencanaan yang memang benar-benar terukur sehingga kita sama-sama bisa memastikan dari sisi anggarannya dan juga ketersediaan luasan lahannya memang memungkinkan atau tidak.

Nah kebutuhan yang 100% impor hampir 100%, karena 96 koma sekian itu dari impor dan itu dari China. Itu dulu juga pernah saya

tanyakan, kenapa sih kok hanya China. Ketika kita memulai membuka keran impor kepada China sebenarnya disitu asal mula kebangkrutan dan musnahnya potensi bawang putih kita. Tahun '94-'95 benar tadi yang disampaikan oleh Bapak kita dari Lombok bahwa petani dari bawang putih saja bisa Haji. Bahkan disebut white diamond ya. Karena memang bawang putih itu bisa jadi unggulan produk horti kita. Ekspornya bagus, kemudian didalam negeri juga tidak kekurangan. Tetapi '96 ketika importasi dari China itu mulai Pak dan kemudian harga mulai tidak bersaing karena 50% itu jauh lebih murah maka disitulah pelan-pelan yang namanya petani bawang putih itu terbunuh. Nah ketika ada masifikasi importasi dari China itu malah bukan menguatkan kita otomatis. Ya negeri yang mensupply kebutuhan kita inilah yang mau tidak mau mereka juga makin kuat. Wong jelas ada kebutuhan pasar yang itu sudah 100% butuh dari mereka kok. Apa pun intervensi, regulasi, lahan dan anggaran dan seterusnya itu pasti kemudian mereka akan dukung sepenuhnya agar petani mereka dan produktivitasnya bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah ini berbanding dengan kita kondisinya. Nah ketika kita tidak punya perencanaan. Saya justru berharap begini, selain ada rencana swasembada bawang putih. Tapi impossible kalau 2001, misalnya kita kurangi 50% impor, gimana misalnya kita bisa mengurangi 50% impor. Kalau tidak salah Kementan atau melalui Dirjen Horti kan sudah dapat informasi Pak ya bahwa di Jawa Tengah itu ada luasan 100.000 hektar yang bagus di lereng gunung Merbabu. Ini Dapilnya sahabat kita sebelah. Saya tidak ngomong tentang Dapil tapi ngomongnya tentang konteksnya Indonesia ini penting. Nah kenapa tidak kita fokuskan disana, ada intervensi anggaran, kemudian juga intensifikasi lahan yang nyata-nyata memang itu cocok untuk pengembangan lahan bawang putih. Nah kalau kebutuhan kita 50.000 hektar sementara ada lahan disana itu dilereng Merbabu itu 100.000 hektar. Sebenarnya itu sudah cukup Pak untuk kemudian bisa mewujudkan swasembada bawang putih tadi itu. Asalkan ada political will. Nah itu saja. Jadi soal kemauan politik ini penting. Karena apa? Pasti disana ada kepentingan para importir yang mungkin jumlahnya tadi sudah disebutkan yang itu pasti akan dirugikan. Nah disini lain tidak ada hukuman atau punishment bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban wajib tanam bawang putih itu. Kalau rekomendasi kita kemarin itu harus dicabut haknya. Tetapi apakah benar pihak Kementerian itu memiliki keberanian untuk melakukan itu. Sementara hubungan saling ketergantungan itu sudah mengikat sedemikian rupa. Ini cinta mati ini yang repot Pak. Jadi ini tolong perhatian bagi yang lainnya. Oke.

Yang kedua, saya menyoroti tentang ekspor-impor. Saya juga sangat tertarik. Ini satu. Ini Indonesia sama Australia kan baru saja menyetujui yang namanya IAC Pak, *Australian Indonesian Economic Comprehensive Economic Partnership Agreement* ya Pak ya. Dimana masing-masing kedua negara ini diiberi kebebasan bea masuk sampai 100%. Indonesia ke Australia 100% itu bebas biaya masuk, sebaliknya Australia masuk ke Indonesia 95% bebas masuk. Persoalannya Pak, apakah barang kita yang masuk kesana. Karena ini kaitannya dengan Horti juga. Ini kemudian berbanding lurus dengan yang mereka masuk kesini. Sementara ternyata catatan kita itu masih defisit yang terkait dengan produk-produk yang bagus gitu loh Pak. Jadi tidak imbang. Meskipun kita itu bebas masuk 100% ke Australia tetapi banjirnya barang Australia kesini itu lebih banyak dan kemudian juga nilainya itu lebih besar.

Apakah pihak Kementan sudahantisipasi perjanjian-perjanjian internasional yang seperti ini ketika membuat perencanaan 2020. Karena ini dari tahun kemarin sudah dibicarakan dan kemarin Pak Jokowi juga sudah ke Australia.

Saya mencatat ada 500.000 ton. Mereka akan masuk kesini ya gandum. Nah ini kalau kemudian selama ini kan kita punya penghasilan dari biaya masuk ya. Ini akan 100% tanpa biaya masuk apa pun Pak. Nah sebaliknya produk kita ke Australia nilainya tidak lebih bagus daripada punya Australia ke sini. Ini hal-hal yang ingin saya tanyakan. Karena apa? Biar kemudian Kementerian kita ini saling terkait. Bukan kebijakan yang satu mematikan yang lain karena ini kan sebenarnya suatu Pemerintahan. Jangan kemudian ada perjanjian, entah menguntungkan yang mana, tetapi di sector pertanian ini justru kemudian dimatikan pelan-pelan. Itu nanti aku yakin Pak. Ini akan banjir sekali itu yang namanya importasi baik itu buah-buahan dan produk-produk pertanian dari Australia dibandingkan produk kita yang ke Australia. Nah kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bapak. Karena ini sudah ditandatangani dan juga diratifikasi. Berarti di Tahun ini, itu sudah akan mulai berlangsung yang namanya perjanjian tanpa batas yang terkait dengan IACEPA ini.

Yang terakhir, dari tadi malam itu saya masih ada di Dapil Pak. ketemu dengan para petani bawang juga, seperti yang mereka sampaikan juga bahwa selama sekian tahun mereka terpaksa harus menanam bawang juga karena menurut mereka meskipun rugi tetapi apalah artinya petani kalau mereka tidak tanam. Dan itu menyedihkan sekali karena mereka menanam hanya karena identitas dirinya sebagai petani. Tetapi kewajiban negara seharusnya memastikan bahwa mereka inilah yang harusnya kita lindungi dengan apa pun caranya.

Nah yang kedua, saya juga punya pikiran bagaimana kalau petani ini SDM-nya konteksnya konstra tani mulai ditingkatkan. Jadi pengolahan pasca panennya itu Pak. Jadi tidak hanya jual bawang merah yang itu kan umurnya kan terbatas karena tidak ada fasilitas lain yang memungkinkan hasil panennya ini bisa bertahan lama. Misalnya itu bisa menggerakkan perempuan, juga kelompok-kelompok muda gitu ya Pak ya. Kita sudah mulai mengenalkan misalnya jualan bawang goreng, kemudian pasarnya bisa online. Tetapi masalahnya mereka baru potongnya pakai tangan jadi panas dan berurai air mata seperti nasibnya. Mungkin dari Bapak juga bisa ada bantuan untuk alat mesin pasca panen yang bisa menggerakkan kelompok-kelompok seperti ini sehingga tidak hanya jualan mentahnya saja bawangnya tapi juga hasil olahan dari bawang, bisa Dapil saya, bisa Brebes, bisa yang lain, bisa juga di Lombok. Saya kira pasti ini juga akan menggerakkan kelompok-kelompok masyarakat. Jadi program pemberdayaan masyarakat bisa dimasukkan disitu.

Saya kira itu Bapak. Yang paling penting mohon nanti direspon dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mba Luluk.

Selanjutnya dari Fraksi Golkar Pak Ichsan. Tolong jangan terlalu panjang Pak, seperti teman Bapak tadi yang dari Dapil Aceh. Ngomongnya banyak artinya tidak ada Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Baik.

Terima kasih Ketua.

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Pak Sekjen, Pak Dirjen yang saya hormati,
Pak Dirjen Horti.

Ada beberapa hal yang ingin saya tanya, terkait dengan pertama harga bawang putih di pasaran sekarang Pak. Harga bawang putih di pasaran sekarang berapa Pak kalau boleh tahu Pak. Per Februari 2018. Pak Dirjen tidak memantau harga. Berapa Pak? Masa tidak memantau, masa harus tanya ke Bu Ses Dirjen ini.

KETUA RAPAT:

Tampilkan dari berita. Jadi Pak Dirjennya tidak tahu harga bawang putih berapa. Mungkin tidak banyak dilapangan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Berapa Pak?

58.000. Harga biasanya berapa Pak rata-rata.

Ada HET-nya tidak Pak? Berapa Pak?

KETUA RAPAT:

HET-nya 32.000. Kalau Bapak bilang tidak ada Bapak salah. HET yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan 32.000.

Ini bagaimana Bapak, kalau dibilang tidak ada HET-nya. Kementan tidak mengeluarkan HET Pak. Yang mengeluarkan HET itu Kementerian Perdagangan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Artinya Pak Dirjen tidak tahu ada HET Pak ya. Artinya begini, HET kita 32.000 sekarang harga di pasaran kira-kira 60.000 lah Pak ya. Berapa sekarang? 70.000. Artinya ada sesuatu yang salah Pak. Ada sesuatu yang salah didalam stoknya. Tadi ada pertanyaan tentang stok Pak. Nah sekarang saya mau tanya lagi. HET cabe berapa ini Pak? Harga cabe di pasaran berapa sekarang? Berapa? 80.000. HET-nya berapa pasarannya Pak Dirjen? Cabe tidak ada HET-nya. Oke. Harga 80.000 ini cukup tinggi Pak. Saya bayangkan Pak, 2 bulan lagi kita mau lebaran Pak. Mau Idul Fitri, mau bulan Ramadhan. Dan sepengetahuan saya inflasi tertinggi di Indonesia itu karena berpotensi menyumbang inflasi tertinggi Pak. Jangan sampai kejadian 2016 itu cabe menyumbang inflasi tertinggi di Indonesia Pak. Nah ini saya mau tanya, bagaimana mengantisipasi hal itu Pak? Bapak bilang di media mengatakan bahwa cukup bawang putih itu sampai bulan Mei katanya, bahkan sampai bulan Maret katanya. Karena sudah ada wajib tanam sekian ribu hektar, produksinya sekian dan sebagainya. Nah saya mau tanya Pak, antisipasi terkait dengan inflasi kemungkinan inflasi tinggi di bulan Ramadhan itu Pak. Karena bagaimana pun jangan sampai nanti ada berita di public bahwa bulan Ramadhan ini terjadi kenaikan signifikan bahkan sangat tinggi 2 produksi ini, bawang putih dan cabe. Karena jelas konsumsi di bulan Ramadhan ini sangat tinggi Pak untuk kedua hal ini. Ini saya mau tanya, nanti kita pendalaman ya Pak. Bagaimana cara mengantisipasi hal itu. Itu yang pertama.

Yang kedua Pak saya mohon ijin, terkait dengan tadi saya interupsi sebentar. Pak Slamet tadi membisikan ke saya bahwa asosiasi bawang putih itu mengeluhkan Pak bahwa ada saling klaim terkait dengan luas tanam bawang putih yang ada di Indonesia. Saya khawatir luas tanam yang dibiayai oleh APBN itu diklaim oleh perusahaan yang diharuskan melakukan wajib tanam. Makanya nanti saya minta tolong Pak Dirjen agar dicantumkan Pak lokasinya dimana untuk yang APBN, yang wajib tanamnya dimana Pak. Kabupaten mana? Misalnya di Sembalun tadi. Ini contoh Sembalun tadi yang paling rill tadi Pak Johan menyampaikan, bahwa yang ditanam di Sembalun itu adalah sesungguhnya BPPT ya Pak ya. Tapi ada perusahaan yang disinyalir mengklaim bahwa dia menanam di Sembalun. Saya khawatir itu kejadian bukan hanya di Sembalun. Makanya kemudian saya mau minta tolong sama Pak Dirjen, tolong tampilkan nanti Pak pada saat dijawab mana area yang ditanam oleh pemakai APBN, mana yang ditanam oleh perusahaan yang wajib tanam. Tolong ditampilkan Pak, sepanjang 2017-2019. Itu yang kedua.

Yang ketiga terkait dengan pengenaan sanksi terhadap perusahaan. Tadi Bu Alien sudah menyampaikan. Persoalannya adalah apakah kemudian sanksi ... atau tidak.

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen,

Tolong didengar dulu pertanyaan Pak Ichsan. Nanti kalau Bapak tidak dengar dengan seksama tidak bisa menjawab, dia ini gampang dikompromi sama 1 partainya Pak. Lebih baik Bapak simak dulu.

Pak Ichsan,

Pertanyaannya diulangi lagi supaya disimak sama Pak Dirjen. Karena ada dikompromi sama yang kanan nanti.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pengenaan sanksi untuk perusahaan-perusahaan yang harusnya wajib tanam. Saya sudah cek Pak datanya. Ada katanya ada sekitar 30-an perusahaan dari 72 perusahaan yang tidak melakukan wajib tanam. Itu hampir setengah 50% Pak tidak melakukan wajib tanam kalau boleh dari alokasi itu. Artinya bagaimana pengawasannya Pak sesungguhnya oleh Kementerian Pertanian terkait dengan kewajiban perusahaan untuk melakukan wajib tanam. dan bagaimana pengawasan, apakah betul dipastikan bahwa perusahaan tersebut memang melakukan wajib tanam itu. Kasus Sembalun yang disampaikan Pak Johan ini, ini menurut saya sebuah gunung es Pak. Bahwa sesungguhnya banyak perusahaan juga Pak yang tidak melakukan wajib tanam. Di klaim memang ada. Nah kita nanti cek Pak yang Sembalun itu betul atau tidak. Itu yang ketiga.

Yang keempat, Bapak tadi menyampaikan hasil dari apa yang dialami oleh Pak Salim Fachri terkait dengan rekomendasi impor produk horti yang terkait dengan bawang putih Pak. Bapak bilang Jumat sore sudah dikeluarkan Pak ya. Betul. Saya minta daftar importirnya Pak. Ada 10 Pak ya. Yang disampaikan tadi ada 10 ya kalau tidak salah Pak Salim ya. 4 ya. Tapi Pak Dirjen bilang 10 Pak ya. Ada 10. Nah 10-nya ini kita coba bagaimana mengeceknya Pak, apakah perlu tidak. Maksud saya begini, apakah Dirjen Horti itu kepemilikan si perusahaan ini. Saya khawatir Pak, ada beberapa perusahaan yang pemiliknya sama, tetapi memakai bendera yang berbeda. 2016-2017 sepengetahuan saya Komisi IV pernah mengingatkan. Mohon maaf bagi teman-teman yang baru. Pernah mengingatkan, jangan sampai ada perusahaan pemiliknya A, tapi nama perusahaannya B, C, D, E. Bapak pernah mengecek itu tidak maksud saya. Tolong ditampilkan Pak, siapa nama pemilik perusahaannya Pak? Itu yang ketiga.

Yang keempat, boleh saya minta tolong Pak? Ini agak mengkhawatirkan data ini Pak. Pengembangan bawang putih nasional 2016-2019 boleh ditampilkan Pak? Boleh ditampilkan Pak Dirjen? Yang tayangan ini Pak? Yang di copy tadi ini. Ada kekhawatiran saya terkait dengan data ini Pak. Boleh dilihat? Tahun 2019. Ambil contoh 2018 Pak. APBN luas hektarnya 3885 wajib tanamnya itu 4160. Kalau dijumlahkan itu sama dengan 8045 Pak. tetapi luas tanam menurut data BPS 2018 itu 8073. Yang ini Pak. coba cek dulu. Saya tadi diajari sama Pak Slamet soalnya, makanya saya mau tanya ini Pak. Nah ini Pak. 2018 kita cek Pak. Luas tanam adalah 8073, yang dibiayai APBN 3885, wajib tanamnya 4150 itu ada selisih dari 8073, kalau ditambahkan APBN 3885, 4160 itu sama dengan 7045. Maksud saya

8045. Berarti ada selisih sekitar 20 hektar. 2018 saja. 2019, yang dibiayai APBN ada 8420, wajib tanam 1228. Tapi luas tanamnya 12.461. Ini apakah kemudian luas tanamnya adalah warisan dari yang lalu. Kalau warisan dari yang lalu Pak, logika saya 2017 kalau memang dibiayai oleh APBN 1923, wajib tanam 1866, kalau dijumlahkan dengan 2018 luas tanamnya itu tidak 8073 Pak. Lebih dari 10.000 mestinya logikanya Pak. Ngerti Pak ya? Kenapa luas tanamnya itu Cuma 8073 Pak? Ini beda dengan luas panen. Berarti ada kegagalan luas lahan Pak. Berarti ada kegagalan APBN untuk melakukan perluasan luas area. 3885 ditambah 4160 ditambah 1923 ditambah 1866 itu jumlahnya 12.000 Pak. Tapi kenapa 2018 luas tanamnya hanya 8073. Sama juga 2019 begitu Pak. Kalau dijumlahkan APBN Pak dari 2016 sampai 2019 itu kira-kira ada sekitar 12.000 hektar ditambah wajib tanam itu ada sekitar 7000 hektar. Berarti ada sekitar 20.000 hektar Pak, seharusnya. Tetapi kenapa luas tanam 2019 hanya 12.461? Berarti ada yang salah disini datanya. Ini menurut data BPS Pak. Logikanya begitu Pak bagi saya. Berarti ada sesuatu yang salah disini. Berarti selama ini APBN membiayai untuk kemudian melakukan perluasan area bawang putih itu sia-sia Pak Bukan begitu Pak? Kalau kita logikanya begitu. Kita berbicara logikanya. Artinya kalau kemudian Tahun 2020 ada kawasan luasa lahan bawang putih kita biayai senilai 5453 dengan anggaran 220 Miliar. Ini ada 5453, itu apakah penambahan luas lahan atau pemeliharaan luas lahan? Kalau dari data 2016-2019 tidak ada perluasan area lahan sesungguhnya. Seharusnya logika kita kalau ditambahkan 2016-2019 ditambah lagi wajib tanam ada lebih dari 20.000 hektar. Semestinya. Tapi yang tercantum disitu 12.461 hektar. Saya tidak sampai logika saya terkait dengan hal itu. Nah sekarang ada tambah kawasan bawang putih 5453 dengan anggaran 220 Miliar Rupiah. Artinya kalau kemudian alokasikan anggaran untuk bawang putih 220 Miliar tapi hasilnya seperti Tahun 2019 berarti kita buang-buang anggaran Pak. Logika saya mengatakan itu. Tolong koreksi kalau saya salah. Nah artinya kebijakan yang disampaikan Bu Luluk tadi bahwa kita bermimpi untuk swasembada bawang putih 2021 hanya 12.000 Pak. Padahal kebutuhan luas area kita kalau rata-rata 7 ton saja Pak, kalau kemudian kebutuhan konsumsi kita 500.000 saja dibagi 7000 itu 71.000 hektar. Sedangkan 2019 baru 12.000 luas tanam kita. Apakah mimpi atau tidak? Logik saja Pak saya. Logika saya mengatakan ini tidak logic. Tetapi 2016-2019 juga ada luas area yang hilang. Kesimpulan saya. Kalau logika APBN dibiayai, kalau memang itu perluasan luas area berarti 732 ditambah sekian tambah sekian sampai 8420 ditambah lagi wajib tanam 20.000 Pak. Tapi kenapa 12461. Saya minta jawaban dari Pak Dirjen.

Terakhir Pak terkait dengan alokasi anggaran secara keseluruhan Pak Sekjen. Saya melihat ini ada yang tidak realistis. Makanya kemudian kalau boleh saya minta catatan kepada Pak Ketua, Pak Pimpinan, alokasi yang disampaikan nanti sama Pak Sekjen. Yang Pak Sekjen sampaikan itu kita kasih catatan Pak, bahwa kita belum bisa menyetujui alokasi anggaran ini. Walaupun nanti ada Dirjen A, Dirjen B, Dirjen C, dari Horti saja sudah kelihatan Pak. Ada persoalan, apalagi nanti di Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen yang lainnya.

Demikian Pak Ketua. Tapi saya minta daftar importir Pak. Daftar importir yang 10 itu, siapa nama-nama pemiliknya Pak? Alamatnya dimana? Dan kemudian apakah kepemilikannya sama atau tidak.

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Ichsan sudah cukup ngomongnya?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Cukup Ketua.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Ansilema.

Silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Selamat sore buat Bapak/Ibu Komisi IV yang terhormat, juga Buat Pak Sekjen, Dirjen dan jajarannya.

Saya langsung mulai dari satu kesimpulan Pak. Omong kosong besar pertanian kita ini mau maju kalau 2 hal ini tidak beres. Yang pertama soal data, yang kedua soal penyuluh. Berkali-kali selalu kita omong soal itu Pak. Kenapa data itu penting? Ya data itu pijakan dasar Pak. Itu ibarat peta, dan kalau itu tidak pernah ada kita tidak akan kemana-kemana. Omong kosong. Kita hanya berputar-putar disitu saja Pak. Saya ingat betul Raker pertama Pak Menteri dengan gagah perkasa itu bicara soal, kasih saya waktu 3 bulan. Saya akan buat data 3 bulan saya akan buat data. 1,5 bulan. Sampai hari ini tidak ada Pak. Pak Ichsan itu berargumentasi itu. Saya tadi berharap mendengarkan ... dari Bapak sekalian ngomong atas dasar data juga tapi tidak ada Pak. Lalu saya yakin kenapa? Ya harga eceran bawang putih saja Pak Sekjen dan Pak Dirjen tidak tahu. Itu berarti Bapak tidak turun ke lapangan Pak. Saya ngomong fakta Pak dan ini bukan untuk kepentingan pribadi saya Pak.

Yang kedua saya ngomong penyuluh. Kenapa saya ngomong penyuluh. Ya penyuluh ujung tombak Pak. Mereka yang mengerti lapangan. Mereka yang bisa memberikan pembinaan Pak. Kita boleh ngomong gagasan besar macam-macam tapi kalau 2 hal menurut saya yang fundamental dan vital ini tidak beres Pak kembali lagi kita akan melakukan hal kesalahan repetisi kesalahan Pak.

Yang kedua Pak, saya mencatat Kementerian Pertanian itu menargetkan ekspor 3 kali lipat Pak. Menurut saya ini target yang sangat ambisius. Saya kutip saja hasil data BPS. Saya ambil contoh impor buah-buahan sepanjang 2019. Itu mencapai 1,48 Miliar U\$. Naik sekitar 13.36% dibanding periode yang sama Tahun 2018. Impor sayur Tahun 2019 mencapai 770,1 Juta U\$, meningkat 4,29% dibanding Tahun 2018. Kesimpulan saya, selama 1 tahun 2018 ke 2019 impor kita dalam hal buah-buahan dan sayur mayor itu meningkat Pak. Lalu tiba-tiba Bapak menargetkan dalam waktu 1 tahun ekspor kita itu dari 6 Triliun menjadi 24 Triliun. Itu bagaimana Bapak bisa menjelaskan ke kami sehingga kemudian itu bisa masuk ke otak saya. Saya mencernanya logis, loncatannya itu bagaimana Pak? Terus pos-pos yang mau digenjut itu dimana Pak? Memang keren sih saya baca. Konsep Bapak soal dobrak atau apa tadi itu. Gedor dan segala macam itu Pak. Tetapi saya lihat ini ada loncatan yang tidak logis Pak dari segi ini. Dari 6 Triliun ke 24 Triliun itu berarti 300%, 3 kali lipat Pak. Sementara tahun kemarin bukan ekspor yang naik dalam 2 komoditas ini, tapi impor. Lalu saya ingin tanya, sentra-sentra, pos-pos sayur mayor dan buah-buahan yang mau dikembangkan itu dimana Pak kasih tahu saya. Berapa lahannya Pak? Sehingga saya yakin. Dari 6 Triliun naik menjadi 24 Triliun gitu loh Pak. Saya Anggota baru, tapi tidak bodoh-bodoh amat juga Pak. Saya baca data ini ya mohon maaf Pak, kalau baca disini Pak semua yang Bapak buat ini bagus. Semuanya keren Pak. Tetapi yang saya ingin dapatkan itu Bapak mulai dengan persoalan, kalau boleh. Persoalan yang mendasar 5 prioritas utama di hortikultura 1a, 2b, 3, itu yang kita pecahkan Pak. Tentu di hortikultura ini banyak persoalannya. Tapi karena anggarannya terbatas menurut saya harus ada prioritas Pak. Saya ingin tahu 5 prioritas unggulan diatas itu yang mana Pak? Karena apa? Kalau dibagi rata tidak akan nendang Pak. Anggrannya tidak akan nendang. Itulah orang bilang prioritas penganggaran. Fokus. Sehingga kemudian target dan orientasinya itu terukur Pak. Bapak omong ekspor. Bagaimana mau ekspor Pak, tahun lalu kita masih ekspor buah-buahan dan sayur mayor. Jadi kendala kita, 1. di produktivitas, 2. di kualitas. Produk kita contoh nanas yang mau dibawa keluar. Ada problem kualitas dari segi yang tadi. Good agriculture practices. Sampai tadi Pak Sudin Ketua sampai ngomong melakukan lobi pribadi terkait dengan manggis sehingga bisa masuk ke pasar China. Lalu Kementerian lakukan apa Bapak? Nah belum lagi kalau sekarang ada corona lagi, ada yang lain-lain lagi. Saya tidak tahu Pak kalau impor lebih besar terus dari ekspor kita ya neraca perdagangan kita tidak akan seimbang dan tidak akan sehat terus Pak. Memang gampang sih impor Pak. Enak memang Pak. Saya baca tadi pagi sudah disinggung oleh senior saya Pak Firman Soebagyo. Tempo hari ini itu menulis khusus tentang kita. Tentang kita Pak. Kita itu bawang putih Pak. Ya saya Komisi IV dan Bapak. Bawang putih itu ada di kita Pak. Dan itu disinyalir itu kartel, rensiker bermain disitu. Kalau ini sudah jadi berita besar. Saya bingung Pak Sekjen dan Pak Dirjen tidak tahu harganya 32.000, jadi sekarang 60.000-70.000 Pak. Nah mohon maaf. Saya ngomong begini karena capek juga. Dari hari pertama saya duduk disini ngoceh segala macam menurut saya tidak ada progress Pak. Tidak ada progress menurut saya Pak. Ya mungkin suara kita juga tidak akan didengar juga sama Bapak-Bapak sekalian. Tetapi saya ingin katakan bahwa negara kita tidak akan kemana-mana Pak. Kalau data hal yang sederhana saja tidak bisa kita bereskan.

Yang terakhir sekali lagi. Penyuluh itu tolong itu keberpihakannya Pak. Saya ingin mendengar penjelasan Bapak keberpihakan soal penyuluh karena beberapa daerah yang saya turun hanya ada kantornya. Itu juga sudah reot. Mereka juga tidak melakukan apa-apa. Petani kita ini bukan petani yang cerdas dan yang canggih Pak. Petani kita butuh pendampingan, butuh pemberdayaan oleh penyuluh. Nah karena itu menurut saya ya penguatan kelembagaan ini perlu, penguatan SDM mereka juga perlu, dan juga keberpihakan terhadap kesejahteraan mereka Pak. Jangan sampai anggaran ke arah penyuluh ini harusnya lebih besar Pak daripada war room tadi Pak. Menurut saya kira-kira seperti itu Pak, karena ini ujung tombak Pak.

Demikian Pak. Mungkin sebentar ada tambahan lagi Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Silema?

Mungkin ya semi-semi pentagonlah.

Selanjutnya yang terakhir Mba Nur'aeni yang penting jelas.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.S.):

Baik.

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan Komisi, Pak Sekjen, Dirjen beserta jajarannya, dan teman-teman semua.

Mungkin saya ingin melakukan evaluasi serta mungkin dorongan dan masukan buat Sekjen dan Dirjen Hortikultura. Pertama, dari kegiatan kesekjenan. Dalam hal ini tentu kita tahu peranan Kesekjenan ini sangat strategis serta penting dalam usaha melakukan manajemen untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di masing-masing Biro disekitar Kementerian Pertanian. Banyak hal di masyarakat kita khususnya para petani. Sebetulnya keluhan yang muncul itu sederhana tapi kita berharap bahwa Kesekjenan itu mampu menjawab terhadap persoalan-persoalan yang ada dengan dukungan dari sisi anggaran serta diberikan juga pemahaman dalam bentuk sosialisasi juga kepada petani kita. Saya melihat dari 11 Biro yang diwilayah Kesekjenan ini saya juga masih melihat masih besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pengelolaan hubungan kemasyarakatan dan informasi public. Kalau tidak salah ini 3000 berita 23 Miliar ini. Tentu saya ingin lebih mendalami. 30.000 berita ini apa sih yang akan diberitakan kepada public. Dan pada saat ini pun saya tidak melihat bahwa progress dari pertanian untuk bisa

melakukan upaya memberikan informasi-informasi kepada public juga belum maksimal. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya melihat bahwa tadi ada program kaitan dengan untuk pembinaan kepada petani muda dan lain sebagainya. Nah ini juga untuk bisa di efektifkan lagi dalam hal pelaksanaan program khususnya ini MoU kerjasama bilateral ya salah satu ya kegiatannya, melakukan kerjasama dengan Luar Negeri baik itu bilateral, multilateral serta promosi bidang pertanian untuk lebih dimaksimalkan. Karena anggarannya juga ini tidak sedikit. Ini lumayan besar. Kurang lebih 20 Miliaran. Nah dilihat dari persoalan yang ada bagaimana kita kemarin juga kalah di WTO. Itu juga pasti kualitas dari produk-produk hasil pertanian kita ini juga masih diragukan. Nah ini dibutuhkan suatu dorongan, baik itu diplomasi secara politis maupun hubungan dengan Luar Negeri agar lebih ditingkatkan.

Langsung saya kepada Dirjen Hortikultura. Saya ingin lebih tahu secara detail. Disini melihat bahwa anggaran untuk kawasan-kawasan untuk produksi mangga, manggis dan buah-buahn serta yang lainnya. Ini minta kejelasan. Itu kawasan yang sudah dibuat apakah itu akan dilakukan, apa memang sudah dilakukan pembinaan dan dibentuk suatu kawasan khusus sehingga muncul anggaran-anggaran semacam ini. Disamping itu saya juga melihat bahwa di Dirjen Hortikultura. Kita tahu harga-harga jenis hortikultura seperti cabe ini masih bervariasi dan masih adanya ketimpangan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Mohon saya ingin mengetahui, upaya apa sih yang ingin dilakukan oleh Dirjen Hortikultura untuk bisa menjawab sebetulnya, bagaimana sih dibawah ini yang kita butuhkan adalah tidak hanya sifatnya memberikan bibit atau pun diberikannya benih-benih untuk petani ya. Tapi yang petani butuhkan adalah bagaimana sih ongkos produksi itu sendiri. Belum juga bicara upah ketenagakerjaan antara satu wilayah yang lainnya ini cukup berbeda-beda. Belum bicara pupuk dan jalur-jalur pemasaran. Jadi upaya apa yang dilakukan oleh Ditjen Hortikultura untuk bisa menjawab persoalan tersebut.

Nah yang berikutnya saya ingin mengetahui yang lebih rigit lagi berkaitan dengan program ... sertifikasi ya produk hortikultura. Ini bentuknya seperti apa? Karena petani kita memandang program tersebut masih memberatkan dan masih merugikan. Nah ini juga mohon penjelasan.

Dan terakhir dari 3 gedor horti, gedor produksi, ramah lingkungan, daya saing. Ini sebetulnya seperti apa ya yang akan dilakukan. Terus saya juga berharap ada suatu pemetaan dan langkah operasional yang strategis yang menjadi prioritas point per point. Misalkan begini, dari 3 gedor horti yang sudah dicanangkan ini sebetulnya rancangannya sudah luar biasa, apresiasi sekali. Tapi mudah-mudahan tidak mimpi dan tidak mengandai-andai. Tapi saya ingin adanya suatu action yang jelas dan nyata kepada para petani kita. Langkah operasional ini sudah disusun, tapi saya tidak melihat langkah operasional itu dibuat sedemikian dan menjadi prioritas 1 item ke yang lainnya. Misalkan dari 3 gedor itu yang seharusnya sudah memuat dari sisi ... terus langkah operasional apa yang didahulukan, dari operasional misalkan optimalisasi KUR-kan terlebih dahulu, atau mungkin dukungan pengairan dan

Alsintan yang memang menjadi suatu persoalan sampai saat ini belum diselesaikan dan solusinya juga saya belum melihat ke arah sana.

Yang terakhir untuk aspirasi. Saya melihat dari data yang disuguhkan Banten ini tidak termaktub dalam kawasan-kawasan tanaman hortikultura. Padahal disana potensinya cukup besar. Hanya Pandeglang saja yang memang masuk kedalam data-data tersebut. Mohon kiranya untuk bisa diprioritaskan wilayah Kabupaten Serang dan sekitarnya agar hortikultura Banten juga bisa berkembang dengan baik.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Demikian pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selanjutnya saya persilakan kepada Sekjen dan Dirjen Hortikultura untuk menyampaikan jawabannya. Tetapi sebelum menyampaikan jawabannya. Disini anggaran Dirjen Hortikultura 2018 1 Triliun 355 Miliar 940 Juta sekian. Ini anggaran pertamanya. Tetapi trend anggaran APBN Kementan Tahun 2018 menjadi 1 Triliun 200 sekian. Berarti ada kekurangan 100 Miliar. Yang mana alokasi 100 Miliar dialokasikan untuk Tukin. Saya mau tanya, anggaran mana yang dipotong itu? 100 Miliar. Kalau ini tidak clear Komisi IV akan membuat surat resmi kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa. Saya tegaskan lagi, untuk memeriksa. Karena saya ini tidak pernah ada perubahan, tidak pernah apa 100 Miliar ini Tahun 2018.

Saya baru WA dengan teman di Kementerian Perdagangan. Kalau seorang Dirjen Hortikultura tidak tahu ada HET bawang merah ini kan kelewatan. Eh, bawang putih. Bawang putih itu HET-nya 32.000. Yang paling penting adalah jangan hanya mengurus RIPH saja. Setiap hari yang diributkan hanya RIPH-RIPH. Kenapa sih tidak ditingkatkan bibit mutu yang baik, bibit manggis, mangga, duren, dan lain-lain. Yang pertama untuk penghijauan. Sesuai permintaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Apabila ada tumbuhan berarti ada penghijauan. Ada penghijauan berarti ada lingkungan yang sangat bagus. Kita lihat saja dibeberapa daerah, mana ada bibit yang diberikan yang bagus. Yang lebih penting lagi adalah pasca panennya. Coba nanti ke kampung saya, ke Lampung saya. Gerobak kaki lima menjual 10.000 mangga harum manis 3 kilo. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah, oleh Kementerian. Tidak ada. Hari ini kalau Bapak bicara rambutan Bapak ke kampung saya, tidak usah beli tinggal minta Pak dikasih Pak. Karena tidak bakal dipetik sama pemiliknya. Harganya tidak ada. Terus apa kerjanya Kementerian Pertanian sq. Dirjen Hortikultura apa? Manggis, semua di China itu selundupan. Indonesia, Thailand. Thailand ke China, Indonesia ke Vietnam, Vietnam ke China. Sekarang sudah dibuka tapi masih tetap

dihambat. Karena apa? Kita harus koreksi diri. Kalau kita tidak mau dihambat jangan menghambat orang lain. Cobalah periksa. Pak Sekjen nanti periksa, kenapa importir China dihambat. Dia pasti menghambat kita. Jadikan pelajaran penting CPO kita ... oleh Uni Eropa. Dan yang lebih tidak logikanya lagi, tiba-tiba periode yang lalu Kementerian Perdagangan ... juga. Apa yang di BEN? Impor wine dan whisky. Ini kan tidak sesuai. Berapa banyak ekspor CPO, berapa banyak minuman yang diimpor. Ini loh yang tidak logikanya. Jadi kita jangan menghambat kalau tidak mau menghambat. Saya menerima kunjungan delegasi Uni Eropa. Waktu itu bersama Pak Eddy Prabowo. Saya katakan ya sudah. Kalau begitu kita saling ben saja sudah. Jadi nanti saya minta pendapat saran teman-teman, apakah nanti ada kesimpulan rapatnya atau tidak. Karena yang saya pikirkan adalah anggaran hortikultura diluar bawang putih. Contoh, masa kita mesti impor singkong. Pak, Indonesia jaman saya kecil. Kesemek banyak di kampung saya. Tetapi Alhamdulillah sekarang juga banyak kesemek di toko-toko supermarket tapi dari Korea. Kenapa tidak hal ini dikembangkan di Indonesia? Coba Bapak dan Ibu ke supermarket lihat. Pasti ada kesemek impor from Korea. Malu tidak kita sebagai bangsa yang bicara bangsa. Wah negara kita negara agraris. Tapi kesemek impor Bos. Itu bagaimana kira-kira. Apa Saudara Dirjen tidak malu sebagai seorang Dirjen. Mungkin tidak lama lagi, kalau Pak Firman mau makan sawo, sawonya impor Pak. Sementara kenapa tidak dibatasi masuk alpukat impor. Alpukat di Lampung itu harganya Cuma 12.000 paling mahal Pak, yang kuning mentega. Kenapa tidak distop impor alpukat. Ini loh saya miris sekali melihatnya. Ya mungkin Bapak/Ibu jarang minum air seledri. Saya tiap hari minum jus seledri. Seledri pun impor dari Australia dan China. Ya Allah. Saya kadang-kadang kalau ke supermarket saya elus dada. Apalagi yang tidak kita impor coba. Kenapa tidak produk-produk itu dikembangkan lebih dulu. Ini loh kadang-kadang saya sedih melihat bangsa saya seperti ini. Ya nanti mudah-mudahan hari ini kalau ada yang shoting saya akan laporkan langsung ke Presiden. Biar Presiden juga tahu. Karena Presiden mungkin jarang ke supermarket. Tapi kalau saya tiap seminggu 2-3 kali ke supermarket. Kalau minggu saya ke pasar tradisional. Saya suka melihat oh begini. Dan saya minta persetujuan teman-teman. Dalam RDP kita putuskan nanti. Pemisahan antara kewajiban tanam importir bawang putih antara pengimpor dan APBN. Kalau tidak pasti rancu. Iya kan. Oh ini APBN tapi tiba-tiba ... bilang disana juga ada. Tapi dimana?

Saudara Dirjen,

Sudahi. Yang lalu kan banyak kurang baik. Pak Sarulimpo tidak terlalu mengetahui banyak mengenai bawang putih tanam. Coba tampilkan yang tadi saya bilang, surat edaran. Ini hal yang sangat menggelikan, sangat menggelikan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun 2019. Masalah wajib tanamnya. Pasal 18, pelaku usaha yang melakukan impor bawang putih dan pengembangan kawasan bawang putih paling sedikit menghasilkan produksi 5% per 100 dari volume tanam. Kemudian ada penundaan tanam kan. Ya Saudara Dirjen? Penundaan tanam setelah RIPH keluar. Itu ditandatangani. Tanggal berapa tandatangannya? Coba lihat. Ditandatangani 17 Oktober 2019. 3 hari menjelang Presiden Republik Indonesia masa jabatannya berakhir. Kemudian Saudara Dirjen Hortikultura mengadakan

konferensi pers dengan pengusaha dan Menteri yang baru duduk disebelah. Seolah-olah Menteri yang baru mengamini masaiah ini. Coba kira-kira. Ya sudahlah, saya tidak mau ngomong lagi, nanti saya ngamuk lagi. Ya seharusnya kan dijelaskan dulu sama Menteri. Pak Menteri 3 hari menjelang ... missioner Pemerintahan Republik Indonesia, Menteri mengeluarkan ini. Ini strategis loh. Ada tidak ketentuan Undang-Undanganya? Ada. Dan berapa Dirjen ini berapa bulan sebelum habis masa jabatannya dilantik loh. Betul Pak Sekjen? Betul tidak? Jawab pakai mic Pak.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Ya saya dilantik bulan Juli ya.

KETUA RAPAT:

Bulan Juli.

Anda?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Sama.

KETUA RAPAT:

Berarti berapa bulan? 4 bulan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

4 bulan. Betul.

KETUA RAPAT:

Boleh tidak Undang-Undang?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Waktu itu Presiden mengarahkan untuk jabatan strategis bulan Agustus-September Bapak. Jadi bulan Juli belum ada arahan Presiden terkait pelantikan Eselon I seingat saya.

KETUA RAPAT:

Undang-Undanganya boleh tidak?

Yang saya tanyakan Undang-Undanganya. Pak Sekjen tidak ngerti Undang-Undang ASN. Tidak ngerti? Ya sudah.

Gubernur, Bupati, Walikota begitu dilantik 6 bulan tidak boleh mengadakan pergantian. Begitu pula terakhir masa jabatannya tidak boleh

juga mengadakan pergantian. Ini 3 hari loh. Saya kadang kalau lihat Pak Menteri yang baru ya agak miris juga. 3 hari sebelum itu dibuat surat. Sebetulnya saya tidak mau buka masalah ini. Tapi kalau saya lihat makin lama, makin lama, makin lama ya susah diomong. Jadi silakan jawab Pak Sekjen dan Saudara Dirjen Hortikultura. Apabila teman-teman belum merasa jawabannya dijawab silakan tanya lagi. Kita bukan bermusuhan. Beliau didepan ini adalah mitra kerja kita. Saling mengisi, saling mengingatkan. Mohon maaf Pak Sekjen. Kalau Pimpinan yang lalu ngomong ya halus, lembut, namanya Pak Eddy Prabowo. Kalau saya beda. Kalau saya orang Lampung. Itu saja.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua interupsi. Sebelum dijawab Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Apa tidak dijawab dulu.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Oh ya boleh. Kalau Dokter yang nanya boleh.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Tidak nanya saya. Saya minta Cuma begini saja Ketua. Program-program yang berbasis kepada masyarakat itu kita proporsionalitasnya jelas yaitu 50%, 50%. Jadi supaya ada control yang bagus kepada kelompok-kelompok tani penyalurannya itu. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Jangan sampai hanya Cuma 20% buat berbasis masyarakat ini. Nanti kasihan petani untuk bagian dan jatahnya dia untuk kesejahteraan petaninya itu.

Terus yang kedua Ketua, saya minta supaya wajib tanam bawang putih itu bukan 5%. 10% gitu loh Pak Ketua.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya. Tolong nanti dijawab dulu. Baru kalau kurang memuaskan tinggal bertanya lagi.

Silakan Saudara Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pertama-tama saya mewakili Kementerian Pertanian mengucapkan banyak terima kasih atas masukan, saran yang konstruktif. Mudah-mudahan kedepan Inshaa Allah jauh lebih baik.

Pertanyaan pertama memang banyak yang terkait dengan data. Ini mohon maaf sebetulnya berkat dorongan seperti Pak Ketua sendiri. Alhamdulillah tanggal 4 kami sudah merilis data, ujung tombak data luas baku lahan, kewenangannya ada di Kementerian ATR. Sebetulnya 17 Desember sudah ada. Karena belum dirilis kami belum berani menggunakan. Nah ini tanggal SK dari Menteri Agraria, Tata Ruang Kepala BPN data luas baku sawah 2019 ini sudah ditandatangani tanggal 17 Desember.

Lanjut. Berdasarkan data luas baku lahan yang dikeluarkan Menteri ATR-BPN. Hasil harmonisasi data selain ATR-BPN, Kementerian Pertanian juga lembaga terkait lainnya. Yang semula luas baku lahan hanya 7,1 Juta hektar ini berdasarkan keputusan. Ini menjadi 7,46. Sehingga meningkat sekitar 350.000 hektar. Nah ini tentunya perhitungan harmonisasi data produksi lainnya sudah mengacu pada 7,496.

Bapak/Ibu sekalian,

Selain data terkait luas baku lahan. Kami juga sudah bersama-sama BPS karena kalau data produksi ini BPS dan Kementan. Nah ini kami sudah ditandatangani oleh BPS Kementan untuk produksi padi, jagung dan seterusnya. Pada saat rilis, memang yang dirilis hanya padi. Ini Tahun 2019 ini sekitar ... gabah kering panennya.

Lanjut. Selain produksi tanaman pangan, kita juga sudah harmonisasi data hortikultura. Kemudian data produksi ... (suara tidak jelas).

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ijin Ketua.

Boleh?

Data bawang putih menurut luas panen jumlah itu berapa menurut BPS Pak?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Data bawang putih, data sementara Tahun 2019 luas panennya adalah 11.010 hektar dengan produksi 814.515

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

814.000 ton atau 814.000 kilo?

Ini kan kesepakatan kan Pak ya.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Ya. Kesepakatan antara Kementerian Pertanian dengan BPS.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Kita ambil satu contoh saja Pak. 5013 ya Pak ya, luas tanam Pak ya.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Untuk 2018 luas panennya 5013 hektar.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

2019?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

11.010 hektar.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Oke. Ini kesepakatan tanggal berapa Pak?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Kesepakatan tanggal 4 Februari.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Kalau yang ini Pak 12.007 Pak. Data yang ada disini Pak. Menurut data disini ada sumber BPS 2018-2019. Jadi data yang dipakai yang mana ini. Yang ini atau yang ini Pak? Mau klarifikasi saja Pak. Disini 12.007 Pak luas panen. Luas tanam 12.461. Disitu 11.010 Pak. Yang mau dipakai yang mana Pak? Yang ini apa yang ini Pak?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Kita pakai yang resmi dari BPS ini Pak. Nanti kita cek lagi Pak.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pak Dirjen,

Saya agak bingung nih. Pak Ichsan barusan nanya. Bapak tadi juga bilang acuannya. Saya audio sih ya. Jadi masalah visual mungkin lebih ini. Cuma dari tadi Bapak bilang data yang Bapak pakai ini juga BPS. Jadi BPS yang mana yang benar, saya juga bingung ini. BPS mana? Apakah mungkin BPS Aceh, BPS Sumsel, kan gitu maksud saya. Jadi saya bingung karena dari tadi BPS semua tapi kok datanya tabrakan. Kita ini sama-sama mau cari solusi loh Pak. Kita mau bantu Bapak dan mau bantu masyarakat loh ini.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Pak Ketua bisa lanjut.

KETUA RAPAT:

Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Artinya tanggal 4 Februari secara resmi ATR sudah merilis luas baku lahan. Yang semula 7,1 menjadi 7,46. Nah kemudian pada saat rilis data luas baku lahan memang BPS hanya. Sebetulnya mendeclair hanya produksi padi. Yang lainnya ini harmonisasi kami dengan BPS. Barangkali demikian terkait dengan data. Nah data-data ini yang akan menjadi acuan kami dalam menganalisis target dan lainnya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ijin Pimpinan.

Interupsi.

Jadi ini memang berdasarkan data. Tadi sudah dipanjanglebarkan, dijelaskan melalui data-data yang sudah diberikan kepada kami yang sebelumnya tadi diberikan ke ... kita sudah punya. Sekarang dipaparkan lagi per Ferbruari. 4 Februari. Segera harus dipastikan dalam rapat ini data mana yang betul-betul yang akan ditindaklanjuti atau ada perencanaan 2020. Biar kita jelas juga gambarannya.

Terima kasih Pak Sekjen.

Terima kasih Pimpinan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Mohon maaf. Ini data resmi dari ATR itu yang akan kita pegang. Ini data resmi yang hasil harmonisasi BPS dengan Kementerian Pertanian. Ya mohon maaf kalau ada kekeliruan sedikit di Dirjen Horti. Ini juga ditandatangani Dirjen Hortikultura. Ses Dirjen.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Sekjen, data ini.

Boleh Ketua?

Data yang tadi ini, yang slide ini semua. Boleh tidak nanti kita copy, kita minta data semuanya?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Sebetulnya kami siap bagikan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Oke bagikan ya Pak setelah kita rapat ya Pak.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Oke.

Tolong ... perbanyak ya. Kita bagikan Pak.

Bisa dilanjutkan Pak?

Nah kemudian karena kami kemarin merilis data ini waktunya saya gunakan juga sekaligus untuk soft launching. Soft launching AWR itu sebetulnya lebih berorientasi, pada memotivasi teman-teman di Pusat dan Daerah agar masalah data ini bisa menjadi satu kesatuan. Jadi Pak Andi Akmal pada saat soft launching yang sudah kami lakukan baru rehab bangunan dan layar untuk tayangan saja tetapi kami juga sudah mengembangkan di Balai Penyuluhan sebanyak 400 titik, dan semua BPTP. Nah ini anggarannya masih menggunakan anggaran 2019. Untuk meningkatkan kapasitas AWR yang butuh big data dan mempercepat. Kami butuh anggaran. Dan ini rencana launching Maret, tapi apakah mampu atau tidak karena pelaksanaannya belum Pak. Jadi untuk motivasi kita sudah ada. Komunikasi dengan BPTP sudah walaupun baru ... (suara tidak jelas).

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

Sebelum terlalu jauh Pimpinan, ijin. Saya paham Bapak butuh anggaran untuk supaya AWR ini jalan. Oke. Pertanyaan saya dari tadi, saya coba mencoba memahami. Ini SDM-nya dari mana Pak AWR ini?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Ya pertama, berjenjang Bu. Untuk ditingkat Pusat kami SDM dari masing-masing Eselon 1 ... 2 sampai 5 orang yang akan mengelola AWR dikelola oleh Pusat. Nah untuk masing-masing daerah ini di BPP dan ada latihannya. Kita latih. Sedangkan ditingkat Provinsi itu teman-teman yang ada di BPTP.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Sampai tingkat Provinsi saja?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Sampai tingkat Kecamatan. Nah sampai tingkat Kecamatan yang baru kita latih ini baru 400 BPP. Jadi secara berjenjang. Karena nanti AWR ini kedepan diharapkan datanya bisa real time itu langsung dari Kecamatan Pak. Nah saat ini anggarannya belum ada, kita uji coba 400 Kecamatan. Dan Bapak/Ibu silakan coba bisa langsung komunikasi langsung dengan 400 Kecamatan pada saat yang bersamaa. Nah dengan AWR proses pembelajaran. Kalau misalnya ada pupuk kurang bisa kita cek. Tapi karena data kemarin data akhir anggaran 2019 ini belum semuanya.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Bisa Pak Ketua?

Yang penanggungjawab AWR di Pusat Pak? Biro Sekjen atau Biro apa ini supaya nanti kita juga bisa menanyakan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Saat ini dikelola oleh Kepala Pusat Data dan Informasi. Tetapi tenaga utamanya sebetulnya banyak dari teman-teman Litbang ya. Karena saat ini sebagai contoh, kita sudah menggunakan data lahan citra satelit Pak. Jadi Bapak dengan saat ini karena citra satelit sudah dikembangkan oleh Litbang di AWR, itu bisa ngecek berapa luas lahan disuatu desa yang sudah ditanam, yang ..., tanamannya vegetative berapa. Itu bisa langsung terhitung luasnya. Dan saat ini sudah bisa, karena itu sudah dikembangkan oleh Litbang.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Kalau yang input data-data tadi dari mana tuh?

Bisa dijelaskan sedikit. Karena pertanyaan saya tadi di awal tadi.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Baik

Untuk riil time ini saya katakan ada data yang dari Provinsi. Ini di BPTP. Di Kabupaten juga ada. Yang utama adalah di tingkat Kecamatan. Nah ini data dari tingkat Kecamatan bisa secara langsung menginput data. Hanya saat ini belum Pak. Yang kita gunakan soft launching itu lebih berorientasi baru lebih banyak data yang statis. Tapi kedepan setelah big data ada, setelah kecepatan lebih ini ya kita betul-betul riil time. Nah kebutuhan anggaran baik konstra tani maupun di Sekjen yang 50 lebih konsentrasi untuk itu Pak.

KETUA RAPAT:

Apa bedanya sama yang dulu? Yang dulu juga sama kok. Setiap sore jam 18.00 – 19.00 bikin laporan. Luas tambah tanam ini-ini masuk ke info data juga sama. Cuma mungkin bedanya disini ditambah alat. Kan sama. Coba Pak Momon hari ini telepon ke Kepala BPPT. Sekarang juga. Tahu tidak luasan tanam padi, jagung, dan lain-lain. Coba tanya. Pasti jawabnya tidak tahu. Karena saya yakin Kepala BPPT-nya tidak pernah ke lapangan. Coba cek. Kalau tidak nanti kita sidak sama Pak Momon kita ke Lampung atau ke daerah lain, cek tanya. Tahu tidak luasannya. Belum tentu tahu Pak. Sudahlah Pak. Ini kan sama seperti yang dulu. Cuma ini tambah layarnya besar, tambah alatnya. Terus yang lebih hebat lagi namanya diganti. Itu setengah pentagon.

Lanjut.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Ini sebetulnya mensikapi perkembangan IT juga Pak. Dengan harapan bahwa kedepan karena kita sering bermasalah dengan data, terutama ditingkat Desa dan Kecamatan, dengan AWR ini bisa langsung komunikasi dengan penyuluh-penyuluh yang ada di Kecamatan.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Saya usul Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Tunggu-tunggu.

Bapak pernah ke Pelabuhan Bakauheni? Itu belok sedikit itu signal tidak ada Pak. Jangan masalah wifi Pak. Ini kan bicara wifi Pak. Ini juga terjadi kemarin disini perdebatan antara Himbara dengan pupuk PSP. Ya sama. Begitu Bapak keluar pelabuhan Bakauheni belok kanan 5 kilometer. Jangankan wifi Pak. Telepon saja tidak ada signal Pak. Jangan bicara nanti kerjasama dengan Telkomsel, begono-begini. Pak, ditempat ini begitu Saudara Fadel jadi Menteri Kelautan bicara dengan PLN. 2 minggu setelah

bicara kawasan di pasena semuanya listriknya masuk. Alhamdulillah, sampai hari ini 10 tahun belum ada yang masuk. Kalau kita menyangkut pihak ke-3, itu kan tidak gampang Pak. Pasang BTS itu tidak murah Pak. Dan tidak gampang itu. Itu loh. Harus dipersiapkan matang-matang. Wah ini nanti kayak main sulap. Tidak begitu gampang. Jadi para Eselon I berikan masukan kepada Saudara Menteri walaupun pahit dan tidak enak. Jangan yes Bos, yes Bos. Jangan. Cobalah. Nanti Pak Momon sama saya ke Bakauheni, turun kapal belok kanan. Disana ada kampung orang Bali. Dijamin tidak bisa telepon kemana-mana.

ANGGOTA KOMISI VI DPR RI:

(suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Ya janganlah. Seperti kemarin. Jadi jangan mimpi terlalu jauh Pak. Dalam setahun saya tidak yakin seluruh BPS bisa nyambung. Ini baru Lampung Selatan, Bakauheni. Belum Bapak ke Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat Pesisir Barat Pak. Jangan. Jalan saja susah, apalagi ada signal handphone. di Banten begitu tidak? Di Aceh? Jadi dibuat dulu perencanaan yang matang. Disiapkan rangkanya dulu. Kemarin pun waktu Himbara kita tanya, Pulau Jawa saja baru 60% Pak. Pulau Jawa loh. Yang mana setiap pelosok itu pasti ada BPS. Tidak bisa juga. Sampaikan sama Pak Menteri. Jangan cepat-cepat. Perangkatnya disiapkan dulu baru dijalankan. Gitu loh.

Lanjutkan Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Baik.

Barangkali nanti untuk konstra tani. Kepala BPSDMP akan lebih menjelaskan karena programnya di BPSDMP. Tapi ada beberapa point yang saya sampaikan bahwa di konstra tani juga bisa melakukan peningkatan SDM ... (suara rekaman terputus) anggota Pak termasuk sosialisasi Undang-Undang dan program. Inshaa Allah bisa kita siapkan terkait dengan program Dapil, aspirasi sebetulnya Inshaa Allah masing-masing Eselon I sudah buat. Tapi nanti bisa dikomunikasikan. Tadi setelah misalnya dicek ada yang terlewat atau apa.

Nah untuk family farming dan sebagainya mohon ijin.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Interupsi Pak Sekjen.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Khalid silakan.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Karena tadi yang bertanya awal di masalah kontra tani saya. Saya perlu kejelasan Pak. Agar kita sama-sama pandangan kita atau arah tuju kita menyangkut dengan pemahaman kontra tani. Pertanyaan saya tadi masalah kontra tani, apakah itu sebuah lembaga baru atau badan baru entah apa namanya. Yang namanya kontra tani atau ganti casing daripada Badan Penyuluh atau ada perekrutan lain. Karena apa? Kembali ya sedikit apa yang disampaikan Ketua tadi. Itu bagus, program bagus tetapi kondisi negara kita ada kapasitas kualitas kita yang masih sangat terbatas yang harus kita sesuaikan. Jadi sebuah ide yang bagus, nawaitu yang bagus, nawaitu yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik pula. Begitu pula dengan program yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Dengan kondisi daerah malah kami kemarin waktu ... ada beberapa daerah yang menyatakan bahwa daerah mereka sinyal masih kurang bagus. tapi ini tinggal penyesuaian kita. Tapi yang paling penting karena tadi menyangkut kontra tani saya perlu masalah program Menteri ini masalah kontra tani ini harus betul-betul pure dan sama-sama kita pahami. Sehingga kita bisa mendorong bila perlu kita akan mendukung. Tapi kalau memang ini tidak jelas saya pribadi tidak mendukung itu.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Ijin Pak Ketua, bisa dijelaskan.

Baik Bapak, kontra tan bukan lembaga. Kontra tan adalah gerakan dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan pertanian secara komprehensif dan sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah kontra tani itu pelaksanaannya, mekanisme gerakan percepatan dan akselerasi pelaksanaan pembangunan ditingkat kecamatan. Di kontra tani, kalau di BPP kesannya penyuluh. Tapi di kontra tani tidak hanya penyuluh. Semua fungsional yang terkait dengan pembangunan pertanian ditingkat Kecamatan itu dalam 1 manajemen. Apakah itu tadi ada POPT atau ada insimenator, ada apa itu dalam 1 manajemen. Sebetulnya lebih berorientasi pada pelaksanaan, mekanisme gerakan dan percepatan akselerasi dari pelaksanaan pembangunan pertanian ditingkat Kecamatan. Saya dari pernah Kepala Badan dan pernah Kapus dulu ya. Dulu sama-sama. Justru Kontra tani ini bagi saya merupakan momen untuk kebangkitan penyuluh Pak. Kenapa saya mengatakan begini, dengan kontra tani ini Balai Penyuluhan keberadaannya menjadi positif. Inshaa Allah tiap tahun nanti anggaran renovasi pembangunan melalui DAK bisa termasuk juga penyuluhnya. Penyuluh dengan kontra tani biaya pelatihan dan apanya bisa ditingkatkan. Jadi saya bisa melihat kontra tani adalah peluang positif dalam rangka membangun penyuluh ditingkat Kecamatan sehingga

pembangunan pertanian ini lebih bergerak lagi termasuk peningkatan SDM-nya.

Nah terkait dengan penyuluh. Memang saat ini penyuluh PNS ada 32.000 Bapak. Sedangkan THLTBPP itu sekitar 12 sampai 13 ribu. Nah 11.000 sudah lulus tes ASN P3K. Nah ini Inshaa Allah kalau misalnya peraturannya sudah keluar yang 11.000 bisa menjadi pegawai ASN tetapi melalui jalur P3K. Nah atas perjuangan teman-teman senior disini, Tahun 2017 kita juga sudah mengangkat 6000 lebih THL menjadi PNS. Kebetulan yang berjuang antara lain Pak Sudin, ada Pak Andi, ada Pak Ichsan ya mohon maaf. Artinya kita berjuang terus. Nah kekurangan penyuluh kita tumbuh kembangkan melalui penyuluh swadaya. Tapi menjadi catatan dan saya akan sampaikan ke Pak Menteri, penyuluh untuk lebih diperhatikan.

Nah oleh karena itu mohon ijin, saya melihat apa pun tapi konstra tani ini adalah positif untuk pemenuhan pertanian dan juga momen yang positif dalam memperhatikan penyuluh termasuk kesejahteraannya.

KETUA RAPAT:

Saudara Sekjen,

Jadi Saudara Sekjen ini dari SDM, Suswono jadi Menteri, Amran jadi Menteri, kurang efektif ya. Maka diganti konstra tani, begitu? Enggak, dari kata-katanya begitu kan. Ini lebih efektif, lebih begini. Berarti selama ini tidak efektif. Itu kalau konstra tani ini tidak efektif ganti nama lagi, dengan apa lagi? Sudahlah, kenapa tidak dipenuhi dulu salah satunya. Satu desa, satu penyuluh. Itu dulu yang penting. Baru tingkatkan yang lain. Kalau anda tadi ngomong lebih efektif. Kalau masalah canggih tinggal beli laptop, beli modem, beli apa kan selesai urusan. Jadi kalau anda tadi ngomong tidak efektif, berarti selama 10 tahun Pak Momon jadi Pegawai Negeri di Kementerian Pertanian tidak ada gunanya. Tidak ada hasilnya.

Silakan penjelasannya.

Pak Daniel.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.)

Sebentar.

Pak Sekjen, Pak Dirjen,

Intinya kami disini itu belum melihat urgensi yang membuat konstra tani menjadi sangat penting. Kami belum berhasil diyakini. Karena bagi kami ada tidak ada akan sama kurang lebih. Karena dibahas masalah rill time tadi. Itu menjadi sulit menjadi rill time kalau masih tergantung dari input orang. Itu tidak rill time. Contoh rill time, sekarang ini kalau kita nanya, berapa produksi minyak gas Indonesia per detik ini? Jam 5 sore kurang 7 menit. Kita sekarang belum rill time tetapi itu bisa dibuat rill time. Kalau disuruh kilang di pasang

meteran. Tapi tidak tergantung input orang. Sehingga tidak bisa dicolong itu input kita. Nah konstra tani bisa seperti itu tidak? Kalau bisa seperti itu kita baru punya bayangan. Ini akan rill time dan sangat berarti data war roomnya. Tapi kalau tergantung input orang tidak akan bisa Pak. Atau rill time dari misalkan satelit luas lahan yang memang dipantau dengan teknologi. Saya tidak mengerti kalau dia warna hijau itu Nah itu rill time bisa. Itu satu hal ya.

Hal yang kedua, diluar itu sementara penyuluh dilapangan kita sangat kekurangan. Kalau memang kita belum bisa memenuhi secara anggaran 1 desa 1 penyuluh. Nah setidaknya yang kita pernah usulin buat program penyuluh mandiri. Di desa yang tidak ada penyuluh ambil Anggota Poktan, atau Gapokannya 1-2 orang, dilatih serius. Mengerti hama, cara nanamnya segala macam full 2 minggu. Balik lagi, dia jadi penyuluh di Poktan atau Gapoktannya. Saya rasa itu malah lebih bermanfaat buat diseluruh basis pertanian kita. tetapi intinya adalah kami disini belum melihat urgensi dan betapa menyakinkannya konstra tani dari konteks tujuan yang ingin dicapai data yang valid.

Terima kasih.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Pimpinan sedikit.

KETUA RAPAT:

Pak Khalid.

Silakan.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Ini mohon dipahami oleh Kementerian. Pak Ketua Pimpinan selalu menyampaikan bahwa kita disini mitra, bukan mencari salah, mencari kurang. Cuma bagaimana kita merasionalkan program Kementerian sehingga ... dengan kepala kita. Bagus, program Bapak itu bagus tapi ini kenapa saya tanya tadi apakah direkrut tenaga baru atau tidak. Yang Bapak sampaikan bahwa itu adalah bukan program, bukan kelembagaan tetapi program. Permasalahan seperti yang Pak ... telah sampaikan tadi adalah ini bukan computer yang data orang, sedangkan data orang tidak cukup. Malah saya menyarankan dari awal kalau bisa bagaimana upaya kita mungkin 2020 terjawab bahwa setiap desa yang memiliki lahan dia wajib punya 1 penyuluh. Kalau itu sudah konkrit, dia sudah punya orang, kita optimalkan kapasitasnya. Sehingga baru ini. Kalau orang disana tidak ada apalagi satelitnya tidak ada, sinyalnya tidak ada, orangnya tidak ada, bagaimana dengan AWR ini nantinya. Demikian. Kami berharap pada Tahun 2020 ini terjawab dulu masalah penyuluh pertanian ada di setiap desa minimal desa yang memiliki sawah.

Terima kasih.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pimpinan, Johan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Johan yang ganteng.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Terima kasih Ketua.

Ketika rapat pertama saya punya ekspektasi luar biasa terhadap konstra tani. Tapi setelah saya lihat bagan ini Pak Ketua apakah ini tidak akan memperpanjang birokrasi pertanian. Saya kira dulu pukul komando pokk begitu langsung drett langsung dibawah itu. Tapi kalau ini ada Gubernur, ada Bupati, ada Camat, memang mereka mau dicantumkan namanya tanpa honor? Ini akan menambah belanja pegawai Pak. Nah sudah Pak saya bilang tidak usah buat gagah-gagahan kayak gini. Sudah 1 desa 1 penyuluh 1 smartpone. Berdayakan sudah lembaga yang ada Pak. Tidak usah buat yang begini-begini. Ini apalagi brigade ini, brigade itu. Aduh ini kalah-kalah struktur Kementerian Pertahanan ini Pak. Nah belum lagi. Tidak usah kita bicara ditingkat Kecamatan Pak. Saya resesnya di Kantor BPP tingkat Kabupaten Pak. Kondisinya sudah sangat menyedihkan. Apalagi kita bicara tingkat Kecamatan. Nah jadi saya khawatir ada tidak jaminan ini tidak akan menambah panjangnya birokrasi komunikasi pertanian kita, atau tidak menambah banyaknya, meningkatnya belanja pegawai Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya pikir teman-teman Anggota dijawab dulu biar tuntas. Habis Pak Sekjen mungkin yang lebih banyak nanti pertanyaan untuk Saudara Dirjen Hortikultura.

Silakan. Satu hal yang Pak Sekjen ingatkan. Dulu ada tidak pelaporan. Jamannya periode lalu. Seingat saya jam 18.00 apa jam 19.00 harus melaporkan luasan tanam. Ada tidak? Dijawab.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Ada yang namanya LTT Pak.

KETUA RAPAT:

Ada kan?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Ada.

KETUA RAPAT:

Apa bedanya sama yang akan datang? Hanya pakai computer sama handphone. Itu saja?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Komunikasi langsung bisa. Jadi proses pelatihan pada saat yang bersamaan itu bisa dilakukan. Karena komunikasi bisa langsung Pak.

KETUA RAPAT:

Itu saya paham Pak. Itu pun di partai kami sudah seperti itu. Tapi apa perlu ganti nama? Ya sudah Bapak tidak usah jawab. Bapak tidak bakalan bisa jawab.

Lanjutkan pertanyaan Anggota.

Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Artinya saran dan masukan akan kita implementasikan. Ada sebetulnya konstra tani pun lebih tepat kalau Kepala BPSDMP yang jawab. Karena memang nanti BPSDMP akan membahas juga. Karena programnya di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan tadi yang lebih tepat Dirjen Teknis ya, seperti stanting atau apa itu nanti Kepala Badan Ketahanan Pangan yang jawab. ALSINTAN nanti Dirjen PSP yang jawab. Kalau dari Sekjen barangkali point-point yang sudah saya jelaskan Pak.

Untuk anggaran tadi memang.

Yang pengurangan mohon ijin Pak. Pengurangan ini adalah kesimpulan dari anggaran dari 1,355 Miliar menjadi 1,255 Miliar. Ini adalah hasil keputusan Rapat DPR tanggal 8 Juni 2018 Pak. Tidak hanya untuk Tukin, tapi realokasi anggaran pengganti subsidi benih Tahun Anggaran 2018. Nanti data dan hasil kesmpulannya saya sampaikan ke Bapak.

Barangkali demikian. Kalau ada hal yang kurang bisa saya tambahkan

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Tapi Saudara Sekjen ini ada pagu yang dipindahkan yang untuk 50 Miliar sementara nanti kita bahas sama Anggota. Belum saya setuju dulu.

Dirjen Hortikultura.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik.

Mohon ijin Pak Ketua.

Kami ingin menyampaikan hal-hal tadi yang sudah ditanyakan dari Anggota. Jadi tadi memang banyak saran-saran, masukan yang siap kami tindaklanjuti Pak Ketua. Namun ada beberapa hal yang mungkin kami coba sampaikan memberikan penjelasan. Pertama mengenai data AWR. Bisa ditampilkan yang Agriculture War Room, AWR dulu. AWR Hortikultura.

KETUA RAPAT:

AWR Hortikultura tidak perlu dijelaskan. Nanti saja. Karena kan belum tentu kita setuju anggarannya ini.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik.

Kalau begitu kami langsung saja ke bawang putih. Terkait dengan lokasi-lokasi yang tadi disampaikan ada kemungkinan tumpang tindih dengan APBN. Jadi bagaimana proses verifikasi dilapangan yang kami lakukan. Bisa ditampilkan? Sambil menunggu Pak Ketua. Jadi kami sampaikan dalam proses RIPH semuanya mengajukan secara online Pak. Jadi melalui proses pertama di PVTTP untuk melihat dokumen secara keseluruhan, ada atau tidaknya dokumen tersebut. Terus untuk proses validasi ada di Direktorat Jenderal Hortikultura. Jadi salah satu yang kami tekankan sekarang untuk proses validasi didalam dokumen tersebut mengenai good agriculture practice dan good handling practice Pak. Nah disinilah karena kita ingin menjamin bahwa produk yang diimpor dari negara-negara tersebut itu betul-betul aman di konsumsi oleh rakyat Indonesia. Jadi ini kami cek, kami semuanya, kami validasi. Dan untuk good agriculture practice ada yang namanya global gape yang diakui standarisasi internasional dan kita bisa ngecek disana. Nomor good agriculture practicenya kita bisa langsung cek apakah dia betul atau tidak. Nah dari sana setelah melalui proses validasi maupun verifikasi dokumen tersebut barulah RIPH-nya bisa diterbitkan. Ini kira-kira proses untuk penerbitan RIPH. Bisa ditampilkan terkait dengan validasi?

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Anda mengatakan gape begini-begini-begini. Ini kan pembuatan kartel. Saya bukan tidak tahu. Saya sudah langsung ngecek kemana-mana. Jadi tetap yang mengklik juga anda. Jadi tidak usah kesana-kesini saya tahu. Jadi gape itu seolah-olah hanya perusahaan ini bisa produk impor kesini dan si A harus main kesini. Dan itu pun pernah terjadi di periode pertama saya Jadi Anggota Dewan. Ada 1 komoditas. Yang boleh impor Cuma negara ini. Dengan alasan A, B, C, D. Sudahlah. Saya paham bukan tidak tahu. Jadi jangan menambah masalah lagi. Itu saja ya. Saya tahu ya. Saya bukan tidak tahu.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Juga yang ingin ketemu dengan saya Duta Besar Belanda. Mereka membuat surat dari, mengajukan RIPH untuk bawang bombay. Sampai hari ini belum diterbitkan. Peraturannya bagaimana, Saudara Dirjen tahu. Saya katakan sama Kedutaan Belanda, saya tidak urus begituan. Yang kedua, Kedutaan Korea. Yang ketiga, Kedutaan Australia. Yang keempat, utusan Sekretaris satu dari Kedutaan China. Jawaban saya, saya tidak ikut ngurus begituan. Jadi tidak usah ketemu saya. Sampai hari ini tidak satu pun termasuk saya Pimpinan menerima Kedutaan tersebut. Karena saya tidak mau ikut campur masalah itu. Itu kewenangan Kementerian. Tapi tolong jangan berkata mengada-ada, yang jujur.

Silakan lanjutkan.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi dalam proses verifikasi dilapangan, bisa ditampilkan? Coba silakan Bu Muti. Diperbesar supaya kelihatan lokasinya dimana, ininya dimana bisa diperluas termasuk pemetaannya. Bisa ditampilkan. Misalnya di klik Nomor 13. Ini 13 darimana saja coba. 13 ini. Ini diklik. Ini kelompok tani Sido Makmur. Desanya Binangun, Watu Malang. Luas tanamnya 2500 m2. Ini yang numpuk-numpuk bisa diperbesar lagi. Di zoom diperluas lagi. Coba Bu Muti bisa langsung mengoperasikan Bu Muti. Bisa di zoom lagi. Supaya kelihatan terpisah bulat-bulatnya. Di stretch, dilebarin.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pimpinan, Saya mau minta cek dulu, boleh?

KETUA RAPAT:

Boleh Pak Ichsan sambil nunggu.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Yang merah, yang kuning, yang ungu. Itu maksudnya apa Pak Dirjen? Apa bedanya itu. Sebelum kita menunggu urusan technical.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik.

Jadi ini kita verifikasi importir pada saat mengajukan RIPH-nya. Importir sudah ada kerjasama dengan petani dan kelompok tani, itu by name, by address, by koordinat. Koordinat itulah kita masukan kedalam GPS dan kita lakukan verifikasi di lapangan. Nah inilah lokasi-lokasinya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Maksud saya merah, kuning, hijau itu apa Pak? Apakah ini buat yang ditanam oleh APBN atau yang wajib tanam itu maksudnya. Perbedaannya apa Pak?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Jadi data dan informasi ini kita berikan juga kepada Dinas Pertanian Kabupaten, Provinsi yang ada kegiatan APBN bawang putih.

Nah ini nomornya yang penting. Coba klik No. 11 ini darimana ini? Tidak ada artinya beda warna. Nomornya Pak.

KETUA RAPAT:

PDI, Golkar sama. Nasdem. PPP biru, PKB tidak ada.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Tidak ada makna artinya disini, tidak ada.

Bisa diklik lagi. Di zoom. Jadi ini proses validasi kami di lapangan Pak. Nah terus ada juga kita langsung tim itu melakukan pemetaan. Jadi tidak hanya importir menyebutkan berapa luasan areal yang dia tanam, dia kerjasamakan dengan petani atau dengan kelompok tani tapi juga kita memetakan juga Pak. Ada petanya Pak, dimasing-masing itu ada petanya semuanya. Dan ini bisa kita pertanggungjawabkan, bisa dicek dilapangannya

seperti apa. Ini bisa dicontohkan salah satu contoh untuk pemetaannya. Coba di contohkan satu untuk pemetaannya. Apa ini, yang ini? Bisa dilihat dari perusahaan PT Segar Prima Jaya misalnya. Jadi lokasinya ini dimana saja, titik-titik lokasinya. Ini sudah kita cek. Coba salah satu nomor diklik, berapa luasannya. Ini dengan kelompok tani, karangtaruna tani, sukumakmur. Luasnya 1 hektar ya bukan 1 m² kali ya. Ini pada waktu menginput datanya. Coba klik tempat lain, coba dicek.

KETUA RAPAT:

Coba Pak tidak perlu diginiin Pak.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik.

KETUA RAPAT:

Karena. Saya tanya, jawab dengan lugas. Apakah yang tanam pasti dapat RIPH?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Kalau yang tanam pasti nantinya dapat RIPH Pak.

KETUA RAPAT:

Dapat?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Iya Pak.

KETUA RAPAT:

Yang kedua, kalau yang tidak tanam dapat ada tidak?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Yang tidak tanam tidak dapat Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau ada buktinya bagaimana?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Kalau tidak yang tidak tanam.

KETUA RAPAT:

Jawab. Kalau yang tidak tanam dapat RIPH bagaimana? Saya bisa carikan datanya.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Kalau yang sekarang Pak tidak tanam dulu dapat bisa Pak.

KETUA RAPAT:

Bukan. Yang 2019. 2018-2019. Ada tidak yang tidak tanam dapat RIPH?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Tidak ada Pak.

KETUA RAPAT:

Tidak ada. Masukkan kesimpulan rapat. Keterangan Saudara Dirjen Hortikultura yang tidak tanam tidak dapat. Masukkan nanti dikesimpulannya. Saya mau tahu.

Lanjutkan.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik.

Jadi ini proses validasi di lapangan. Beberapa hal mungkin kami coba sampaikan Pak terkait pertanyaan-pertanyaan dari Anggota yang terhormat. Jadi ini terkait dengan cabe dan bawang. Kami sudah punya yang namanya *early warning system* Pak untuk 3-4 bulan kedepan kondisi cabe dan bawang akan menimbulkan inflasi atau tidak. Nah ini sudah kita sampaikan juga. Setiap bulan kita laporkan semuanya ini kepada Dinas Pertanian Kabupaten maupun Provinsi.

Nah dari *early warning system* yang kita susun, untuk HBKN nanti. Untuk cabe dan bawang kami melihat didalam *early warning system* yang kita susun itu HBKN nanti aman Pak untuk cabe dan bawang untuk bulan lebaran nanti. Jadi ada tekanan memang di bulan Februari karena ada keterlambatan musim tanam karena musim kemarau yang panjang di Tahun 2019. Musim hujannya dimulai bulan Desember. Petani baru tanam. Untuk cabe usianya untuk panen kira-kira baru sekitar 3-4 bulan baru mulai panen. Maret Inshaa Allah sudah mulai panen Pak. Jadi harga cabe menjelang Maret, April, Mei dan seterusnya berdasarkan pantauan *early warning system* yang kami susun Inshaa Allah aman untuk cabe. Untuk bawang Inshaa Allah juga untuk bulan menjelang HBKN nanti aman berdasarkan data dari *early warning system* yang kami susun.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, boleh Ketua?

KETUA RAPAT:

Aman itu maksudnya tentram damai.

Silakan Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Maksud saya begini Pak Dirjen. Aman itu berapa konsumsi, berapa potensi produksi, kapan panennya? Bulan Mei itu misalnya bawang putih. Itu panennya kapan? Berapa produksinya? Luas tanam yang ada berapa? Nah maksud saya begitu Pak. Jangan Bahasa “aman” Pak. Artinya tolong jelaskan Pak dalam 1 slide bahwa yakinkan pada public bahwa tidak ada inflasi yang cukup tinggi potensinya terkait dengan lebaran. Karena ingat Pak, kejadian 2016-2017 cabe rawit itu penyebab penyumbang inflasi terbesar di Republik Pak. Kalau tiba-tiba 2020 terjadi Pak. Yang malu bukan Dirjen Horti saja Pak. Menteri Pertanian Pak, temannya Pak Hasan ini. Ini malu Pak. Artinya nanti public akan bilang. Katanya aman, tapi kemudian tidak aman. Bapak jelaskan Pak? Jangan bicara “aman” begitu Pak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Ketua, saya mau tanya. Ada yang kelewat tadi.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Johan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Bagaimana status hasil dari wajib tanam itu. Kan pemegang RIPH itu kan wajib tanam 5%. Nah siapa yang ambil hasil ini yang 5% ini?

Terima kasih.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Saya satu per satu mohon ijin Pak.

Jadi early warning system bisa ditampilkan. Kalau belum saya menjawab dulu dari Bapak. Jadi untuk yang 5% Pak rata-rata importir masih menyimpannya sendiri untuk perbenihannya mereka Pak. Rata-rata demikian Pak. Jadi mereka menyimpannya sendiri untuk perbenihan mereka. Kecuali ada proporsi bagi hasil Pak ya antara petani sama pelaku usaha. Itu ada rata-rata 70 banding 30, ada 80 banding 20. Yang 30-nya itu adalah pelaku usaha

atau importir, yang 70-nya untuk petani. Kalau yang importir rata-rata mereka menyimpannya sendiri untuk persiapan perbenihan mereka berikutnya Pak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Kebalik Pak. Dia kasih bibit 100 kilo ke petani, dia minta 150 umbi basah. Bapak bisa cek. Saya sudah dapat data dari BPPT. Jadi importir yang nanam, benihnya dikasih 100 kilo misalnya ke petani. Dia minta 150 kg umbi basah. Jadi jangan dibilang bahwa petani yang 70, terus importir 30. Kebalik itu.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Yang diatur didalam petunjuk teknis adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil Pak. Nah ini kalau memang ada ditemukan seperti yang Bapak sampaikan seperti itu, ini importirnya tidak mematuhi petunjuk teknis dan importir tersebut bisa kita blacklist Pak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Terima kasih Pak Ketua.

Tolong dicatat itu karena temuan saya kebalik.

Terima kasih. Jadi artinya kejadian yang saya laporkan ini adalah melanggar prosedur Pak ya?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Iya. Melanggar prosedur.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Terima kasih Pak Dirjen.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi nanti Bapak pulang Dapil, Bapak cek sama PT-nya siapa, ya kita laporkan supaya di blacklist. Itu saja.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Melanjutkan ... (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Melanjutkan apa? Ikut ngomong. Apa?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

(suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Pakai mic.

Ikut ngomong gitu ya?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Ikut ngomong. Melanjutkan tapi bukan pertanyaan. Karena memang tadi kan prosedurnya kalau misalnya tidak tanam, tidak seterusnya ada blacklist. Nah apakah itu sudah pernah diterapkan. Termasuk yang akan ini, apakah ada perusahaan lama yang tidak diikuti, RIPH-nya tidak dapat.

Terima kasih.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Itu langsung kita. Kalau dia tidak tanam Bu, tidak menyelesaikan kewajibannya kita langsung blacklist Bu.

Ini mohon ijin menyampaikan mengenai early warning system yang kami susun tadi sebagai.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Ketua, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar dijelaskan dulu.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Boleh kami lanjutkan Pak Ketua.

Baik. Jadi ini salah satunya untuk bawang merah. Ini gambarannya demikian Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati. Jadi untuk bawang merah Februari ini kita. Ini kita surplus 85.000 ton. Ini kalau lihat Kabupaten yang minus itu dimana saja. Ini kebutuhannya. Kebutuhannya berapa? Produksinya berapa? Neracanya berapa? Mana yang minus disini mana yang surplus. Sehingga total kita lihat coba. Ini sudah kita susun sampai level Kabupaten. Jadi ada carry over karena bawang merah masih bisa disimpan. Ini kita masih ada carry over 254.561 ton. Coba kita lihat di Bulan Maret sebelumnya. Bulan Maret kalau kita lihat disini ini memang minus secara keseluruhan tapi masih ada carry over dari tahun sebelumnya, eh dari bulan sebelumnya yaitu

231.000 ton. Artinya tetap bawang merah di Bulan Maret masih dalam kategori masih terpenuhi.

Untuk Bulan April-Mei. Ini juga gambarannya demikian. Jadi April kita masih ada surplus sekitar 9000 ton secara nasional karena ada carry over sebanyak 240.000 ton. Ini kita masih surplus 9000 ton. Tapi dibulan Mei, ini masih minus kira-kira 129 ton tapi ada carry over 240.000 ton yang bisa mengisi kesini. Karena bawang merah pada dasarnya masih bisa disimpan untuk 2-3 bulan kedepan.

Bagaimana untuk cabe. Bisa dilihat untuk cabe. Dibuka untuk cabe. Nah ini untuk cabe rawit gambarannya. Jadi cabe rawit bisa dilihat. Ini cabe besar, cabe rawit. Coba dilihat keatas dimana saja. Ini cabe besar. Cabe rawit di Bulan Februari, ini cabe besar cabe rawit. Ini kebutuhan produksi dan neraca. Dimana saja yang surplus, dimana saja yang minus bisa dilihat disini. Coba dilihat kebawah. Untuk cabe besar ini masih ada surplus 10.483 ton. Cabe rawit memang ada tekanan. Ini surplus masih hanya 2758 ton. Relative sedikit. Kami sudah mengidentifikasi untuk cabe rawit ada beberapa Kabupaten diluar Jawa yang sedang panen raya untuk cabe rawit, tapi memang mohon ijin terkendala karena biaya distribusinya yang mahal. Jadi biaya cargonnya yang mahal. Khususnya kalau lewat pesawat ini ongkos, biaya distribusinya yang cukup mahal.

Coba dibulan selanjutnya di Bulan Maret. Ini surplus 13.417 ton untuk cabe besar. Untuk cabe rawit surplus 15.021 ton. Ini Bulan Maret.

April-Mei coba. Nah April-Mei ini menjelang lebaran, puasa. Kita masih surplus 12.600 ton untuk cabe rawit. 26.353 ton ini Bulan April. Bulan Mei sebelumnya bisa dilihat. Bulan Mei kita masih surplus untuk cabe rawit ... pas menjelang bulan puasa. Jadi kita sudah merekap ini. Dan informasi ini kita. Mohon ijin Pak, kami kirim semua kepada daerah-daerah supaya mereka aware. Dan mereka harus menargetkan penanamannya harus sekian-sekian. Kalau tidak akan menjadi inflasi didaerahnya. Jadi informasi warning system ini kita sampaikan dan ini salah satu data-data yang kami kirim juga kami masukan didalam agriculture war room. Jadi kira-kira gambarannya demikian Pak.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Pak boleh interupsi.

KETUA RAPAT:

Kalau tidak boleh, yang lain boleh nanti kamu marah lagi.

Silakan.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Pak Dirjen,

Mungkin saya juga mengkoreksi ya kaitan tadi yang disampaikan. Nah yang ingin saya tanyakan kenapa di saat tadi bawang, cabe merah dan sebagainya ini surplus. Kenyataannya di masyarakat itu harga cabe itu gila-gilaan. Khususnya di Banten. Inflasi terbesar itu di sumbang dari cabe. Ini mohon pantauan dari Kementerian Dirjen itu sendiri untuk bisa mengintervensi terhadap pelaksanaan kegiatan harga-harga di daerah.

Terima kasih.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Terima kasih.

Mohon ijin kami jawab Pak Ketua.

Jadi kami sudah memonitor Ibu daerah-daerah yang harga cabenya itu relatif dibawah Rp40.000,-. Kita bekerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan. Cabe yang panen di level petani dibawah Rp40.000,- dan kita melakukan panen dan kita memberikan bantuan subsidi dari aspek transportasinya ke Jawa. Kita melakukan operasi pasar Bu, betul Bu. Itu sudah kami lakukan. Ya memang terkendala dari biaya angkut udaranya yang relatif mahal. Sekarang sekitar Rp20.000 per kilogram. Itu pun sudah melalui negosiasi yang sebelumnya 25.000 menjadi 20.000 per kilogram. Ini besok lusa ada panen raya cabe rawit di Kabupaten Wajo. Disana juga harga sekitar 30.000 dan ini bisa mensupply untuk Jabodetabek, Banten, maupun di Pulau Jawa. Memang di Jawa sekarang panen memang lagi rendah sesuai dengan early warning system yang kami susun disini. Coba dilihat.

Baik. Saya kira gambarannya demikian Ibu untuk sementara.

Terima kasih.

F-NasDem (HJ. SRI WULAN, S.E.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar.

Saudara Dirjen,

Jadi begini, yang anda harus pikirkan kalau kita pro rakyat pro petani, pada waktu panen harganya jatuh bagaimana. Gitu loh. Coba seperti di Lampung dulu harga cabe mencapai 100.000-120.000, begitu panen Cuma 8000. Tugasnya anda sebagai Dirjen Hortikultura menangani ini, apakah dibantu alat pengering atau apa, itu tugas anda. Anda jangan urusin RIPH saja. Coba pikirkan. Kan hampir semua Dapil ini kalau waktu panen jatuh.

Lanjutkan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ketua, saya kira begini. Pertama, Pak Dirjen Hortikultura menjawab semua pertanyaan dulu. Jangan ditambahkan dulu pertanyaannya, karena ini tidak akan selesai.

Yang kedua, mungkin saya sarankan kepada Pimpinan sama Kapoksi ini bisa ketemu dululah, bagaimana kira-kira menyikapi daripada banyak data, banyak masalah yang muncul ini.

KETUA RAPAT:

Ya kalau tidak selesai pending saja, kenapa pusing.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Salah satu opsi seperti itu Ketua juga Ketua. Seperti itu usulan saya. Kalau sebut tadi Wajo. Wajo itu Dapil saya Pak Dirjen. Dan saya kira tidak seluas itu pertanaman cabenya disana kalau mau dibawa ke Jabodetabek. Itu besar sekali berarti informasi dari Pak Dirjen tadi ya.

Terima kasih Pak.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Pimpinan boleh?

KETUA RAPAT:

Baru datang langsung mau ngomong.

Iya sudah.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Terima kasih Ketua.

Jadi seperti tadi disampaikan bahwa banyak data yang kurang lengkap, paling tidak nanti Pak Dirjen bisa melengkapi dulu. Jadi jangan sampai nanti semakin tidak lengkap, terus yang dipaparkan tidak lengkap lagi. Karena yang saya tahu yang ini tidak bisa kita baca disini. Jadi ini kayak kita kuliah. Paling tidak ini juga disampaikan ke kita-kita semuanya. Jadi tolong di break dulu saja. Saya rasa setuju juga Pak Dirjen. Jadi ada tenaga lagi untuk kita memikirkan masyarakat yang lebih maju.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sesuai usulan Pak Andi tadi dijelaskan dulu pertanyaan-pertanyaan Anggota supaya jangan bias.

Lanjut.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik Pak.

Jadi kami mencoba untuk menjawab ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Pak Hermanto. Ini mengenai Sumatera Barat. Kita sudah mengalokasikan kegiatan untuk di Sumatera Barat. Terus kita juga terus berkoordinasi juga dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat terkait dengan CPCL yang harus segera mereka siapkan khususnya dari Dinas Pertanian Kabupaten maupun Provinsi.

Terus untuk bawang putih. Memang tadi kami sampaikan bahwa data kita stok kurang lebih sekitar ada 70.000 ton bawang putih. Ini sudah bersama Kementerian Perdagangan kemarin kita lihat. Memang ada lonjakan harga karena kemarin ada virus corona. Jadi informasi dari Kementerian Perdagangan cenderung para pelaku usaha itu ... bawang putihnya untuk tidak dikeluarkan. Ini perintah dari KSP agar segera melakukan operasi untuk melihat cek gudang-gudangnya para pelaku usaha bersama Satgas pangan agar mereka jangan sampai menimbun bawang putih yang ada di gudang-gudang ini merupakan suatu perintah. Dan kami sudah menerbitkan RIPH hari Jumat sore kemarin. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat SPI-nya bisa segera terbit sehingga bawang putih bisa segera dilaksanakan importasinya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Terus dari Pak Suhardi. Jadi mengenai target peningkatan produksi 7%, bagaimana langkah-langkahnya. Kita ada anggaran dari, baik itu dari APBN. Dan kita mendorong pemanfaatan optimasi dari KUR yang dialokasikan untuk hortikultura senilai 6,39 Triliun dan kita harapkan ini bisa betul-betul bisa dimanfaatkan. Dan ini mungkin menjawab beberapa pertanyaan dari Anggota Dewan yang terhormat, bagaimana upaya untuk mendorong peningkatan produksi selain dari anggaran APBN. Kita juga mendorong agar Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mengidentifikasi petani-petani yang memang bankable supaya nantinya non performance loungenya itu rendah, memanfaatkan anggaran KUR yang senilai 6,39 Triliun ini untuk hortikultura.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen,

Saya tanya, KUR tadi gunanya untuk apa saja ini?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

KUR Pak. Jadi ada dibahan tayang tadi. KUR ini bisa dimanfaatkan. Untuk cepatnya saya coba sampaikan disini. Jadi untuk usaha peralatan dan mesin, untuk usaha budidaya, untuk usaha perbenihan, untuk usaha saprotan, dan untuk on off farmnya, untuk usaha pasca panen, untuk usaha pengolahan dan pemasaran hasil Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi Kementerian mengurangi bantuan peralatan kepada petani, itu digantikan dengan KUR. Ini ada tujuan nanti waktu Rapat Kerja saya jelaskan. Kenapa bisa begini, ada apa, nanti saya jelaskan. Orang selama ini petani dapat bantuan alat pertanian kok tiba-tiba dipotong diganti KUR. Datanya sedikit lagi matang, jangan sampai nanti Dirjen serta Sekjen merasa tidak nyaman nanti. Saya lagi siapkan data. Itu saja. Yang berlaku selama ini adalah bantuan alat mesin pertanian untuk petani dilanjutkan saja, tidak usah pakai KUR segala. Siapa menjamin kalau KUR itu berjalan dengan baik. Kemarin ditempat ini kita RDP dengan Sekjen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017, 2018, 2019 sekian Triliun. Ditanya, berhasil tidak? Apa jawabannya, kami tayangkan pengakuan daripada penerima KUR. Yang ditayangkan Cuma 5 orang, yang dapat KUR-nya ribuan. Ini uang negara loh. Saya setuju, setuju. Tetapi yang mengawasi siapa, pengawasannya bagaimana. Penyuluh kalau 1 penyuluh 3 Desa itu saja sulit. Cobalah, kemarin saya minta data. Contoh di Lampung Selatan ada 3 unit. Saya mintakan kelompoknya mana, tidak bisa. Jadi menyalurkan KUR juga harus penuh kehatian. Harus juga ada pengawasan yang paling penting. Dan yang paling utama adalah pembinaan. Ini KUR-nya nih. Mau dipakai apa silakan, mau kawin lagi silakan sana. Nanti bikin lagi saja laporan karena tidak ada yang mengawasi. Saya setuju sekali dengan kebijakan Presiden memberikan KUR kepada rakyat. Tapi pengawasan, pelatihan, pembimbingan. Ini yang paling penting. Saya tahulah Pak, saya bukan tidak tahu. Nanti ini arahnya kemana saya tahu. Nanti waktu Rapat Kerja akan saya ungkapkan.

Ya lanjutkan.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik.

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi selanjutnya dari Pak Muslim, ini terkait dengan kegiatan di Aceh. Ini ada Pak. Kayak bawang putih itu 100 hektar itu ada dimana saja. Nanti ada data-datanya semua. Nanti kita share Pak.

Terus untuk rencana produksi cabe itu dimana saja. Itu juga di Aceh. Jadi Kementerian Pertanian membagi wilayah-wilayah untuk bawang dan cabe Pak ada kategori utama, ada kategori andalan, ada kategori pengembangan. Nah kategori utama itu kriterianya adalah daerah yang sudah

bisa memenuhi cabenya sendiri. Cabe dan bawangnya sendiri. Nah untuk daerah andalan itu paling tidak 50% memenuhi kebutuhan bawang dan cabenya sendiri. Sedangkan untuk daerah pengembangan sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi alokasi kami untuk bawang dan cabe. Untuk cabe seluas 10.000 hektar kurang lebih, untuk bawang merah kurang lebih sekitar 5.700 hektar kami bagi di 2 kriteria ini Pak yaitu di 70% itu di kegiatan pengembangan, 30% itu di daerah andalan Pak. Jadi ini data-data dan informasinya, mana daerah andalan, mana daerah utama, mana daerah pengembangan. Ini ada semua data-data dan informasinya. Jadi itu.

Tadi Pak Budi terkait dengan AWR. Nanti saya inikan sendiri.

Dari Pak Edward. Terima kasih Pak saran-sarannya Pak Edward tadi. Terkait dengan singkatan-singkatan nanti kami akan perbaiki didalam bahan tayang kami berikutnya. Terus ini juga menjadi catatan kami Pak untuk bisa kami teruskan kepada Direktorat Jenderal terkait mengenai bendungan yang jebol, terus juga mengenai bawang putih yang tidak cocok ditanam di Belu. Tadi ada catatannya tapi nanti kami akan klarifikasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten maupun Provinsinya.

Jadi yang lainnya memang banyak saran-saran dan masukan. Ini menjadi catatan kami. Tapi memang dari pertanyaan-pertanyaan banyak yang terkait dengan bawang putih dan mudah-mudahan kami bisa memberikan penjelasan serinci mungkin seperti yang tadi kami tampilkan, termasuk dengan data-data yang tadi belum didistribusikan terkait bawang putih karena memang presentasi yang ini masih terkait dengan rencana anggaran. Tapi kami memang disiapkan juga untuk bawang putih, karena nanti pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang bawang putih. Jadi kami siapkan. Tadi data-datanya sudah di print dan sudah didistribusikan.

Saya kira demikian Pak Ketua yang bisa kami sampaikan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Pertanyaan saya tadi cukup penting tadi Pak Ketua. Belum dijawab oleh Pak Dirjen mengenai masalah anggaran 250 Miliar itu Pak untuk dukungan manajemen. Mungkin dijelaskan, karena itu 20% dari anggaran pokoknya Bapak gitu. Bisa dijelaskan Pak sebelum ditutup.

Terima kasih.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik Pak.

Terima kasih.

Jadi untuk dukungan manajemen itu berupa. Disana itu ada gaji Pak, terus juga ada honorarium untuk penyuluh POPT Pak karena kita masih ada POPT hortikultura. Nanti untuk lebih detailnya lagi untuk rencana anggaran untuk kegiatan yang 223 Miliar tersebut sebagai dukungan manajemen nanti akan kami berikan ke Bapak untuk disampaikan Pak.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Tapi kalau gaji tidak masuk Pak. Gaji kan sudah di Sekjen gajinya.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Tunkin yang di Sekjen Pak.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ya makanya saya butuh penjelasan nanti ya. Mungkin tertulis dari 233 Miliar ini. Karena saya lihat ini Pak Sekjen, hampir semua di Eselon I ada anggaran seperti ini. Maksud saya kan ini semuanya anggaran bisa kita sinergikan bersama, bagaimana misalnya sosialisasi Undang-Undang, sosialisasi aturan ataupun pemberdayaan kepada masyarakat di Dapil masing-masing gitu loh kalau memang memungkinkan.

Terima kasih.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Siap Pak.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Trisno silakan.

F-PDIP (Dr. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Saya masih terkait bawang putih. Saya menyikapi kewajiban 5%, teman-teman juga menyakinkan benar tidak importir menanam. Itu kan intinya bahwa kita ingin membangun kemandirian. Nah tapi ini data mengalir terus nih Pak Ketua sampai sekarang mengalir. Saya baca data terakhir malah justru Tahun 2020 produk bawang putihnya turun dari Taun 2019 87.500 hanya 56.591. Tahun 2021-nya 70.739. Diluar sana Tempo sudah mulai mengangkat permasalahan bawang putih.

Oleh karena itu saran saya masalah bawang putih ini di Panjakan saja Pak supaya clear, supaya selesai masalahnya tidak memperdebatkan. Kenapa? Kalau lihat perkembangan data, saya bisa menyimpulkan. Ini lebih cenderung ingin terus impor terus impor. Jadi bukan bagaimana kita ingin terbangun kemandirian, tapi yang diinginkan adalah impor terus. Ini yang terjadi. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya dapat data juga nih Pak. pergeseran anggaran. Ya memang Dewan sudah menunjuk Komisi IV ... anggaran tapi bukan pada nilai. Ini yang digeser ini kan dari Dirjen Sarana Prasarana.

KETUA RAPAT:

Pak Sutrisno, saya jelaskan. Kita belum pernah membahas pergeseran anggaran. Belum.

F-PDIP (Dr. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Saya mau saran Pak Ketua. Jadi saya mau saran sebenarnya. Dibahas dulu maksud saya itu. Karena tadi kan ingin 50 Miliar itu.

KETUA RAPAT:

Pak, Bapak tidak perlu suruh bahas. Sudah pasti dibahas Pak. Segala sesuatu harus kami bahas secara detail di Komisi IV. Paham Pak.

F-PDIP (Dr. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Tadi yang diperdebatkan tadi kan yang 50 Miliar. Ini kan sumbernya dari ini makanya ini kan percuma karena ini kan belum dibahas.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Sutrisno,

Ini Sekjen mengajukan anggaran untuk perubahan dari tanaman pangan ke Sekjen. Iya toh, paham Pak? Dan kami ini belum menyetujuinya. Ini lagi dibahas Pak.

F-PDIP (Dr. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Justru itu kami juga tidak setuju Pak. ... 50 Miliar ini saja belum disetujui. Justru ingin ditunda ini, dibahas dulu, dibicarakan dulu.

KETUA RAPAT:

Kan saya belum buka kesimpulan rapat Pak. Nanti waktu kesimpulan rapat Bapak boleh bilang, saya tidak setuju 50 Miliar. Tapi nanti kan kita

tanyakan dulu kepada floor. Karena Anggotanya bukan Bapak dengan saya satu Fraksi Pak, disini ada 9 fraksi Pak. Nanti kita bahas. Saya juga tidak setuju. Dari awal saya kurang setuju kalau ada realokasi anggaran.

F-PDIP (Dr. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pak, kalau Bapak sudah menjadi catatan. Saya hanya ingin mengingatkan saja sebenarnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.

Anak muda rasanya ingatannya lebih bagus daripada orang yang agak tua sedikit Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, boleh nanya Ketua. Pendalaman Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini nanya mulu.

Iya Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Baik.

Pak Dirjen,

Ini ada hal yang menurut saya urgent untuk dijelaskan sama Pak Dirjen terkait dengan bawang putih. Pertama EWS tadi *early warning system*. Early warning system yang didesain mencegah inflasi di bulan Ramadhan ini. Tadi Bapak tampilkan bawang merah dan cabe Pak. Saya optimis Pak kalau kemudian ini terjadi, kalau itu betul surplus terjadi Pak. Saya khawatir ini inflasi Pak. Tanda-tandanya sudah ada Pak. Harga cabe ini agak naik ini Pak. Saya khawatir ini Pak kalau Bapak menyampaikan ke publik bahwa kita surplus cabe merah, surplus cabe rawit tiba-tiba bulan Ramadhan ini harganya 2 kali lipat dan menjadi penyumbang inflasi terbesar. Bapak kena tuh Pak. Dan ini kejadian persis 2016 Pak. Tapi terlepas dari itu Bapak tidak pernah menampilkan EWS bawang putih Pak. Karena bawang putih sekarang harganya 60.000 Pak. Walaupun Bapak HET tidak tahu tapi sudah diingatkan sama Ketua 38.000 Pak, bawang putih ini. Sekarang naiknya 60.000 Pak. 2 kali lipat Pak, hampir 2 kali lipat. Ini jangan-jangan bawang putih menjadi penyumbang terbesar inflasi Pak sepanjang Bulan Maret, April, Mei. Nah saya mau tanya EWS-nya bagaimana Pak. Early Warning System yang sekarang terjadi. Ini RIPH sudah ada Pak. Sudah dikeluarkan per Jumat lalu. Ini

totalnya berapa? Berapa kebutuhan stok menjelang lebaran? Berapa produksi dalam negeri? Dan berapa yang akan dikeluarkan RIPH Pak? Itu pertama.

Yang kedua, kita sudah dapat RIPH-nya Pak. Siapa perusahaan-perusahaan yang mendapatkan RIPH. Bapak kriterianya apa? Nanti kita coba kroscek Pak. Dari data RIPH 2017-2018, apakah ada didalam perusahaan-perusahaan ini yang tadi saya bilang, jangan-jangan ini cuma ganti nama saja Pak. Saya ingat 2016-2017 kita pernah mengingatkan terkait dengan Permentan itu. Bisa jadi orangnya sama tapi perusahaannya beda Pak. Bapak pernah mengklarifikasi tidak kalau dari perusahaan-perusahaan. Ada berapa nih. Saya hitung. Ada berapa Pak yang RIPH bawang putih Pak? 10 Pak. Totalnya berapa RIPH yang diterbitkan?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Kurang lebih sekitar 103.000 ton.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

103.000 ton itu untuk kebutuhan sampai lebaran itu Pak?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Itu kebutuhan sampai lebaran.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Sampai lebaran 103.000 itu?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Iya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Oke. Artinya 103.000 apa kriterianya mereka sanggup atau. Untuk mendapatkan RIPH itu apa kriteria perusahaan itu Pak? 2 hal pertanyaan itu Pak. Saya minta EWS-nya minta bawang putih. Betul tidak 103.000 itu cukup untuk kebutuhan ditambah plus produksi Pak. Sepengetahuan saya bawang putih itu panennya bulan Mei iya kan Pak? Betul kan? Bulan Mei itu menjelang lebaran Pak. Puasa Pak 21 April Pak. 21 April sampai 21 Mei. Kalau panennya di Bulan Mei kapan kita nikmatinnya Pak konsumennya Pak. Nah ini yang maksud saya EWS ini coba dianalisis, terus kemudian kriterianya apa? Kedua Pak.

Yang ketiga pendalaman. Saya minta klarifikasi data ini Pak. Bapak belum jawab ini Pak. Ini apakah, ini terkait dengan penggunaan anggaran. Tahun 2020 kawasan bawang putih itu 5.453 hektar dengan anggaran 220 Miliar. Nah sedangkan pertanyaan saya adalah kok datanya ini tidak sinkron gitu Pak. Data yang ditampilkan ini. Saya khawatir 220 Miliar ini hilang lagi

Pak. Kalau anggaphlah kemudian didalam APBN 2017 = 1923 hektar, 2018 = 3885 hektar kalau dijumlahkan Pak ini bisa 12.000 Pak. Kalau ditambah lagi 5453 hektar Tahun 2020 berapa jumlahnya Pak. Apakah yang di APBN-kan pengembangan kawasan atau pemeliharaan kawasan Pak? Kalau pengembangan kawasan saya setuju Pak. Biar kita kata tadi teman-teman Komisi IV biar kita swasembada bawang putih. Tapi kalau pemeliharaan bawang putih ini berarti kita membuat garam di laut Pak, karena tidak ada kemandirian tadi Pak Trisno bilang. Saya minta klarifikasi itu Pak.

Terima kasih Pak.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Terima kasih.

Mohon ijin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini waktunya kita mau ISOMA atau mau kita lanjutkan dulu?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Lanjut dulu Ketua.

KETUA RAPAT:

Lanjut?

Sampai pukul 18.00 nanti kita ISOMA atau kita lanjutan. Saya terserah Anggota. Jadi dijawab dulu pertanyaan Pak Ichsan tadi. Nanti, Mba Alien mau nanya? Nanti satu-satu dijawabnya. Supaya Pak Dirjennya jangan bingung. Sudah bingung bolak balik dokumen dari tadi dia. Coba bikin kopi dulu kasih Pak Dirjennya. Jawab dulu Pak.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Siap Pak Ketua.

Jadi yang pertama mengenai ini dulu Pak. Jadi Tahun 2019 sejak kita mencanangkan penanaman bawang putih untuk swasembada Pak ya di Tahun 2017 itu kita identifikasi yang mendapatkan bantuan APBN itu ada lebih dari 100 Kabupaten Pak 2017-2018. Namun begitu kita evaluasi banyak yang gagal Pak. Jadi yang gagal Kabupaten-Kabupaten tersebut. Nah sehingga sekarang yang tersisa yang sudah cukup berhasil penanaman bawang putihnya itu ada 38 Pak. Inilah yang menyebabkan data itu karena awalnya 2017, 2018, terus 2019 ini Kabupatennya berubah-ubah Pak. Terus yang kedua, permasalahan data tadi mengenai bawang putih. Bawang putih rata-rata di Indonesia itu ditanamnya itu antara Bulan November-Desember. Nah sehingga antara luas tanam dan luas panen itu pasti akan ada

perbedaan. Namun ada beberapa Kabupaten yang namanya itu. Contohnya di Lombok Timur. Lombok Timur bisa ditanam 1 tahun itu bisa 3 kali menanam bawang putih. Nah karena suhunya yang relatif dingin khususnya di Sembalun jadi dia bisa ditanam setiap saat. Nah inilah perbedaan-perbedaan seperti inilah yang berpengaruh terhadap pendataan pendataannya Pak.

Terus kami sampaikan juga. Mohon ijin Pak. Jadi bawang putih stok yang sekarang untuk diimpor itu dari China itu adalah bawang putih yang masih stok dari Tahun 2019. Bawang putih ini masih bisa disimpan cukup lama Pak. Jadi 2019 ini adalah bawang putih yang Tahun 2020. Sekarang kalau RIPH-nya itu dibuka dan ada importasi itu adalah bawang putih Tahun 2019. Karena apa? Di China musim panennya itu baru Bulan Mei sama Bulan Juni. Mereka tanam bawang putih di China itu antara Bulan Oktober, Bulan November. Nanti panennya di Bulan Mei-Juni. Dan ini bisa disimpan cukup lama untuk sampai 2021. Demikian pola seterusnya di China itu untuk bawang putih itu demikian.

Nah terkait dengan stok kami Pak, ini ada data kami. Jadi informasi data yang kami dapatkan. Jadi ini produksi nasional kita per bulan. Jadi sampai Bulan Februari kita identifikasi. Perkiraan kebutuhannya ada disini. Pak Jadi ini bisa kita katakan untuk early warning system. Terus berapa neraca perkiraan domestiknya antara kebutuhan dikurangi produksi nasionalnya. Ini ketemu sekian. Berapa realisasi impornya di Tahun 2019. Ini demikian Pak. Jadi terakhir Bulan Desember ada 108.000 ton realisasi impor. Nah ini tidak ada lagi realisasi impor disini sehingga dilihat dari stoknya. Terakhir Bulan Februari itu kita masih ada stok kurang lebih 38.200 ton Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak, itu 38.200 bukan. Itu harga Pak. Harga rata-rata bulanan pasar induk Pak.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Ya-ya mohon maaf Pak. Jadi ini neracanya ada 69.000 ton.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

68 Pak.

KETUA RAPAT:

Bikin kopi dulu.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Kurang konsentrasi Pak.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Mohon maaf Pak, ada 69.000 ton.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua ijin, pendalaman lagi.

Pak Dirjen, yang ingin saya tanya tanyakan adalah ini ada luas tanam 2019 = 12.461 coba lihat slidenya Pak. 2018 = 8073, berarti ada kenaikan luas tanam 4000 Pak. Itu sumbernya dari mana Pak? apakah sumbernya dari APBN yang 3885 hektar plus wajib tanam 4160. Kalau kemudian itu sumbernya dari 2 hal itu berarti tingkat kegagalan dari 2018 ke 2019 itu 50%. Kegagalan wajib tanam dan APBN Pak. Yang mana yang gagal sesungguhnya untuk luas tanamnya bawang putih, pengembangan luas tanam bawang putih Pak. 3885, 4160 itu totalnya adalah kalau kemudian 2018 ditanam dengan memakai APBN yang wajib tanam berarti ada penambahan luas lahan tanam bawang putih sekitar 8000 Pak. Tetapi kalau kita kurangi 2019 ke 2018 itu 4400 Pak. Berarti ada 50% gagal Pak kita luas tanamnya. Yang gagalnya apakah wajib tanam apakah APBN. Kalau kita hitung juga 2017 Pak sama juga Pak. Nah sekarang 2020 Bapak mengajukan kawasan bawang putih 5453 sejumlah 220 miliar Pak. Kalau kemudian memakai APBN Pak. Berarti kegagalan APBN itu 50%. Artinya 50% luas tanam yang sudah di alokasikan untuk APBN itu gagal Pak. Nah artinya kalau anggaran 220 daripada kita gagal buat apa kita buang-buang Pak uang di 220 Miliar ini Pak, logika saya begitu Pak mengatakan. Nah itu belum ditambah Pak, saya mau tanyakan lagi tadi belum terjawab. Dimana lokasi yang ditanam memakai anggaran APBN, dimana lokasi yang ditanam oleh para importir yang wajib tanam. Harus terpisah Pak. Ini belum tumpang tindih Pak. Tadi Bapak belum menjawab dan belum menampilkan data itu bahwa dimana lokasi yang wajib tanam, dimana yang ditanam di APBN. Kalau itu tidak kami dapatkan Pak agak sulit kami kemudian menyetujui anggaran untuk alokasi anggaran ini Pak. Itu maksud saya. Nah ada kegagalan. Kalau pakai time series 2017, 2018, 2019 ada juga potensi tumpang tindih tanam Pak. Coba Pak, saya minta penjelasannya Pak.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Mohon ijin Pak Ketua.

Jadi seperti tadi yang saya sampaikan Pak. 2 hari sejak dicanangkan sejak Tahun 2017, 2018 itu ada lebih dari 100 Kabupaten yang kita berikan bantuan APBN.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Datanya diberikan Pak, minta tolong Pak.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Nah dari itu kita indentifikasi. Terakhir itu kita evaluasi hanya ada 38 Kabupaten yang berhasil dari sekian Kabupaten Pak. Nah inilah data-datanya Pak. Ini di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ini ada Kabupaten-Kabupatennya Pak sampai Tegal. Terus slide berikutnya, ini 38 Kabupaten.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Tanya saja Pak, itu dananya dalam bentuk DAK apa itu?

Pak Dirjen,

Dananya DAK atau apa ini?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Ini dananya dari APBN Pak, dari pengembangan kawasan dari hortikultura sendiri Pak. Diserahkan ke Dinas. Dekonnya Pak. Tadi yang Bapak sampaikan apakah kegagalan ini disebabkan oleh APBN, oleh importir. Saya sampaikan disini, dua-duanya Pak. Jadi dari APBN tadi seperti yang saya sebutkan ada 100 Kabupaten lebih yang kita alokasikan sejak Tahun 2017. Dan kita indentifikasi termasuk mohon ijin dari Pak Ketua yang di Lampung, itu termasuk Kabupaten yang gagal Pak. Jadi karena ada kesalahan benih Pak ya disana sehingga akhirnya gagal disana. Nah jadi kami indentifikasi tinggal 38 Kabupaten inilah. Nah yang 5400.

KETUA RAPAT:

Itu yang di Lampung itu ABPN atau apa? APBN ya.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

APBN Pak.

KETUA RAPAT:

Tadi APBN mengatakan bahwa kesalahannya benih. Pengadaan benih siapa Pak?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Dari Dinas sana Pak. Kalau dananya kan di dekonkan disana Pak.

KETUA RAPAT:

Setahu saya di Lampung itu tidak ada yang tanam bawang putih loh. Saya sudah cek. Disitu tadi ada saya lihat 100 hektar. Setahu saya tidak pernah dengar ada itu. Di Kabupaten mana coba ditampilkan.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Coba ditampilkan cyber foodnya. Ini yang 38 Kabupaten yang berhasil Pak. Yang tidak berhasil tidak kami tampilkan disini.

KETUA RAPAT:

Tadi anda mengatakan Lampung tidak berhasil.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Tidak berhasil, betul.

KETUA RAPAT:

Tidak apa-apa. Cuma setahu saya di Lampung itu tidak ada yang tanam bawang putih.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Ada Lampung Barat sama Tanggamus ya. Kita alokasikan untuk Lampung Barat dan Tanggamus Pak.

KETUA RAPAT:

Bu, saya jelaskan. Lampung Barat tidak ada. Yang ada Tanggamus. Kalau tidak salah pengusaha yang berkewajiban tanam. Bukan APBN. Tolong dicek ulang. Kecamatan Ulu Belu. Ya. Coba dicek lagi. Karena di atas 800 permukaan laut Cuma 2 wilayah antara lain Sekincau itu di Lampung Barat, sama di Ulu Belu di Kabupaten ... (suara rekaman terputus) ... di bawah 800 permukaan laut. Jadi saya minta tolong di cek ulang. Karena di Lampung pun pernah kejadian bibit jagung yang didekonkan tidak berhasil. Tadi kalau tidak salah awalnya angka keseluruhannya 100 hektar loh. Bukan 19 sama itu loh. Coba dicek lagi tadi. Berarti kan itu Cuma 29 sama Tanggamus toh. Berarti Cuma 29, bukan 100. Tadi disini tulisannya ada yang 100 ini, dicek ulang lagi. Tanggamus itu Bupati orang saya. Lampung Barat itu dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD orang saya. Jadi sangat paham sekali. Setiap ada apa mereka melaporkan ke saya. Ya sudah Pak, tidak perlu dibahas lagi Pak. Jadi kalau di Lampung tidak berhasil jangan dipaksakan. Untuk wilayah-wilayah yang tidak pas tidak produktif, tidak berhasil jangan di kasih lagi. Walaupun anggotanya minta tetapi harus dijelaskan bahwa wilayah tersebut tidak cocok atau bisa ditanam tetapi tidak ada hasil. Gitu kan.

Mau kita skors apa lanjut?

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA., M.M.):

Usul Ketua. Saya boleh usul Ketua urusan skors ini.

Saya usul begini Ketua, karena sesuai dengan rapat kita. Ini kan RDP juga dengan Dirjen Tanaman Pangan. Beliau sudah menunggu dari jam 2 siang. Saya usulkan itu kita skors sampai jam 10 pagi besok Ketua. Tapi

setelah ini kita lanjutkan untuk Dirjen Tanaman Pangan. Kasihan Dirjen Tanaman Pangan sudah menunggu dari jam 14.00. Kita skors saja. Nanti mengenai waktunya saya serahkan sama Pimpinan terkait dengan Dirjen Hortikultura ini. Saya usul Ketua.

KETUA RAPAT:

Kalau saya boleh berpendapat, hari ini kita selesaikan dulu hortikultura dan Sekjen. Yang tanaman pangan besok pagi. Kita tunda. Ini kan kalau sudah begini. Tapi ya terserah Anggota, saya ikut saja. Kalau mau bilang skors, besok pagi dimulai lagi, kemudian tanaman pangan disuruh masuk tanaman pangan pun percuma. Tidak mungkin selesai dari jam 7 sampai jam 11 malam. Jelas Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Saya usul saja Ketua. Jadi kasihan juga karena mereka menunggu dari jam 2 tadi. Saya lihat Pak Dirjenya juga sudah salaman sama beberapa orang. Kasihan juga. Termasuk salaman ke saya. Beliau bisik juga, jangan lama-lama Pak Hortinya katanya.

KETUA RAPAT:

Ya resiko jadi Pejabat. Kalau tidak mau resiko jangan punya jabatan bilang.

Sebelah kiri?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Saya kira Pak Ketua habiskan saja yang ini sekarang. Kemudian besok sekalian semua. Bukan hanya Dirjen Tanaman Pangan. Perkebunan juga ada, Balitbang, ada PPSDM.

KETUA RAPAT:

Besok itu Cuma 2 Pak tadinya Pak. PSP dan Perkebunan. Tapi rencana karena tanaman pangan hari ini tidak bisa ya kita tambahkan.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Gabungkan saja.

KETUA RAPAT:

Kita tambahkan saja. Jadi Bapak setuju?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju. Gabungkan saja.

KETUA RAPAT:

Kita break dulu ISOMA. Kok ngambek.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Ke toilet Ketua.

KETUA RAPAT:

Sore ini saya skors dulu untuk ISOMA.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan, bisa interupsi Pimpinan sebentar.

KETUA RAPAT:

Boleh Pak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Mumpung ada waktu break sehingga saya mengusulkan. Permintaan saya lama dari pekan beberapa RDP yang lalu juga. Untuk disiapkan data. Ini juga terkait dengan wajib tanam. Tadi kita juga minta dititik mana belum ada. Nah ini juga ada perusahaan 2017 itu 38 perusahaan yang blacklist wajib tanam, 2018 = 32 blacklist, 2019 belum ada. Nah dalam jangka.

KETUA RAPAT:

Boleh saya menjelaskan Pak sama Bapak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Mangga.

KETUA RAPAT:

Jadi Dirjen, Pak Slamet ini minta, 1. Perusahaan yang di blacklist, 2. Perusahaan yang mendapat hortikultura, 3. Luasan yang menanam dan hasilnya dan wilayah mana. Itu Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Iya.

KETUA RAPAT:

Termasuk itu 2017, 2018, 2019. Termasuk tadi pertanyaan Pak Ichsan yang belum dijawab 10 perusahaan itu mana saja, milik siapa, apakah sudah ada perjanjiannya bagaimana. Begitu Pak Ichsan?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Tambah lagi Ketua.

Data luas lahan yang ditanam pakai dana APBN itu.

KETUA RAPAT:

Nah termasuk itu tadi juga Pak Slamet minta ya.

Oke. Kita skors. Nanti kita kembali lagi kesini pukul.

Jadi RDP hari ini saya skors. Kita kembali ke ruangan ini pukul 19.00. Tolong jangan telat.

(KETOK PALU 1 KALI)

(SKORS DICABUT)

Tadi setelah Rapat Konsultasi Pimpinan dan Kapoksi maka malam ini RDP kami skors dulu dikarenakan Pak Sekjen akan konsultasi dengan Pak Menteri supaya jangan ada salah persepsi antara Pimpinan, Anggota, dan Kementerian Pertanian. Begitu Pak Momon.

Sekali lagi saya mohon maaf.

Saya skors dulu.

(KETOK PALU 1 KALI)

Saya akhiri.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
196301221991031001

